



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2014 - 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2014**



**DRAFT AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2014 - 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Berkaitan dengan konsep perencanaan daerah maka dalam kerangka otonomi daerah mengisyaratkan pelaksanaan kewenangan secara maksimal di daerah Kabupaten /Kota yang memberi peluang yang besar bagi daerah untuk berinovasi dan berinisiatif dalam menentukan secara terencana konteks pembangunan daerah yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi daerah. Kondisi ini kemudian secara legal formal terakomodir dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika perencanaan pembangunan daerah, telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dan sistematis mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek seperti diuraikan di bawah ini.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari pada visi, misi, dan program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum daerah, program dan indikator sasaran disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Terbentuknya Kabupaten Luwu merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah baik dalam hal pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih nyata sehingga usaha untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam rentang waktu berjalannya pemerintahan daerah Kabupaten Luwu sejak tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menunjukkan progres pada pembangunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terimplementasinya sejumlah kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang tertuang dalam kerangka pembangunan jangka menengah 2014-2019 telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkeadilan. Sehingga dalam perjalanan rencana pembangunan lima tahun kedepan, pemerintah daerah mencanangkan visi

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LUWU YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING YANG BERNUANSA RELIGIUS ”

Dalam perjalanan pembangunan lima tahun berikutnya menjadi sebuah tantangan tersendiri, dimana pemerintah Kabupaten Luwu dituntut untuk mengoptimalkan berbagai potensi dan hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Optimalisasi berbagai potensi dan kemampuan daerah baik itu kapasitas sumber daya manusia, potensi – potensi alam baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sejumlah sektor lainnya dalam pemerintahan, diarahkan untuk lebih memperkecil kesenjangan yang ada baik itu masalah kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur wilayah.

Berbagai kesenjangan yang ada tersebut tentunya membutuhkan alur pemecahan yang sistematis dan terstruktur yang hanya bisa terakomodir dalam sebuah sistem perencanaan terpadu dan terukur baik dari kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan, indikator capaian dan batas waktu capaian dari kebijakan tersebut. Kesemuanya kemudian dikemas dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, janji – janji serta program strategis Bupati Luwu A.MUDZAKKAR dan Wakil Bupati Luwu AMRU SAHER (dilantik pada Bulan Februari 2014) yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu 2011 – 2031, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Luwu disamping itu juga memuat arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas pembangunan

dan program Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan kedua dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, sekaligus dalam kerangka penyusunan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota lain, Desa dan Kecamatan, dunia usaha, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan pelaku pembangunan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

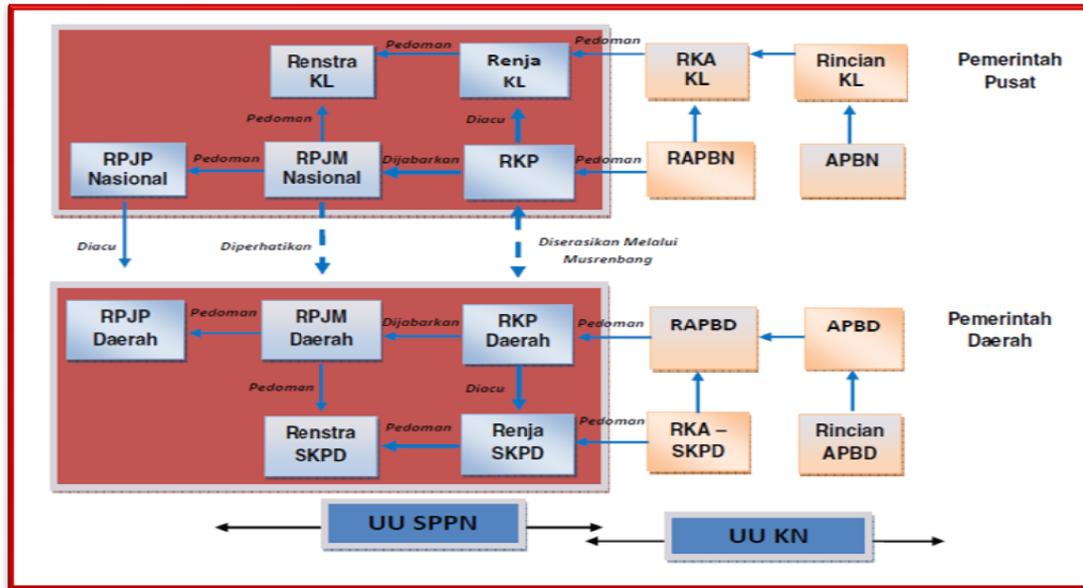
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
17. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 9);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Suatu dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan dari berbagai rencana sektoral. Pengembangan suatu RPJMD tidak bisa hanya dilakukan atas dasar kemauan saja, akan tetapi juga atas kebutuhan dan kemampuan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pada dasarnya dalam gambaran lebih makro, RPJMD termasuk RPJMD Kabupaten Luwu 2014-2019, merupakan bagian integral dari dua sistem peraturan perundangan dan interelasi berbagai dokumen perencanaan dalam kerangka Undang-Undang Sistem Pembangunan Nasional (UUSPN) dan Undang-Undang Kementerian Negara (UUKN). Pada dasarnya Kajian Akademik ini mencoba menyoroti alur keterkaitan antar dokumen tersebut secara kritis dan argumentatif. Diagramatikal keterkaitan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan



Keterangan: UU SPPN= Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU KN= Undang-Undang Kementrian Negara); Renstra= Rencana Strategik; KL= Kementerian Lembaga; Renja= Rencana Kerja; RPJP= Rencana Pembangunan Jangka Panjang; RPJM= Rencana Jangka Menengah; RKP= Rencana Kerja Pemerintah; SKPD= Satuan kerja pemerintah Daerah; RKA= Rencana Keuangan dan Anggaran; RAPBN/D= Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; A(PBN/D= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).

1. RPJMD dan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu dalam perencanaannya memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan peningkatan nilai lebih pembangunan Kabupaten Luwu adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

2. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu memperhatikan visi Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”, yang tertuang dalam misinya yaitu Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama; meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global; Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum; Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa; Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. Keseluruhan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu diarahkan untuk memperkuat akselerasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Luwu.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025. RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang penyusunannya tetap berpedoman pada RPJP Kabupaten Luwu tahun 2005 – 2025. Dengan Visi **“Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi ”** dengan Misi : Mewujudkan Kualitas Manusia yang tinggi; Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah; Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata; Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah.

Dalam dokumen RPJP Kabupaten juga memuat fokus pembangunan yang dilaksanakan pada setiap RPJM, dimana dalam RPJM tahun 2014-2019 pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk memantapkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam pembangunan dengan menekankan pada

pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan kemampuan inovasi teknologi yang terus berkembang, sehingga dalam tahapan ini diharapkan terjadi peningkatan nilai lebih atas capaian pada tahapan sebelumnya.

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 74,68 dan meningkatnya berbagai indikator pembangunan sumberdaya manusia antara lain: meningkatnya pendapatan per kapita pada tahun 2012 yang mencapai Rp.14.856.356,30; menurunnya angka kemiskinan menjadi 7,35 persen; tingkat pengangguran menurun menjadi 3,85 persen; meningkatnya derajat kesehatan dengan ditandai AHH mencapai 74 tahun; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan rata-rata lama sekolah 7,69 tahun, dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,1 persen

4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Luwu.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

5. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD, terutama arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD dan aspirasi masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau Musrenbang.

7. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Tahun 2014-2019, memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kab. Luwu 2014-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Luwu Tahun 2005-2025 dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Luwu Tahun. Selain itu memperhatikan pula RPJP Nasional dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 serta dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RPJMD memperhatikan pula dokumen RPJMD dan RTRW kabupaten tetangga. Keterkaitannya terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial masyarakat.

Dokumen perencanaan teknis lainnya yang menjadi bahan perhatian dan pembandingan dalam penyusunan RPJMD ini seperti Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan dokumen pencapaian Millenium Development Goal's (MDG'S)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Arah RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025, Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2019.
- BAB VI BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam agenda dan prioritas pembangunan daerah.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam Pencapaian outcome tahunan selama periode 2014-2019.
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPD transisi, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah Kabupaten Luwu, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu, supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu dokumen RPJMD dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan tahunan Kabupaten Luwu, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu dilingkup Pemerintah Daerah, lintas sektor, dan wilayah. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun kedepan.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

1.5.2. Tujuan

Tujuan dari pembentukan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan media untuk mewujudkan janji serta program strategis yang telah disampaikan kepala daerah terpilih kepada masyarakat pada saat kampanye.
- 2) Menjadi pedoman dan penjabaran dari visi dan misi serta arah pelaksanaannya
- 3) Menjadi wadah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, serta sebagai langkah awal dalam membangun koordinasi dan sinergitas antara berbagai insitusi pemerintah daerah.

- 4) Alat untuk mengukur/sebagai indikator capaian kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- 5) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara tiga domain *good governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 6) Merupakan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 7) Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan daerah provinsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-11
1.5. Maksud Dan Tujuan.....	I-13

BAB. II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi.....	II-1
2.2. Aspek Demografi.....	II-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-16
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-47

BAB.III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA

PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
3.3. Kerangka Pendanaan	III-11

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.....	IV-1
4.2. Permasalahan Pembangunan.....	IV-7

4.3. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis.....	IV-17
---	-------

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi.....	V-1
-------------------------	-----

5.2. Tujuan dan Sasaran.....	V-2
------------------------------	-----

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur.....	VI-1
---	------

6.2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.....	VI-2
--	------

6.3. Membangun Desa Menata Kota.....	VI-3
--------------------------------------	------

6.4. Peningkatan Kualitas Infra Struktur dan Tata Wilayah.....	VI-3
--	------

6.5. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.....	VI-5
--	------

6.6. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-7
--	------

6.7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	VI-8
---	------

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum Untuk <i>Meningkatkan Profesionalisme Aparatur</i>	VII-1
--	-------

7.2.a. Kebijakan Umum Untuk <i>Meningkatkan Kualitas Pendidikan</i>	VII-3
---	-------

7.2.b. Kebijakan Umum Untuk <i>Meningkatkan Kualitas Kesehatan</i>	VII-4
--	-------

7.3. Kebijakan Umum Untuk <i>Membangun Desa Menata Kota</i>	VII-6
---	-------

7.4. Kebijakan Umum Untuk <i>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah</i>	VII-6
---	-------

7.5. Kebijakan Umum Untuk <i>Membangun Kemandirian dan Daya Saing Daerah</i>	VII-7
--	-------

7.6. Kebijakan Umum Untuk <i>Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan</i>	VII-9
--	-------

7.7. Kebijakan Umum Untuk <i>Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>	VII-9
--	-------

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....VIII-1**

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Daerah.....	IX-1
9.2. Aspek Fokus dan Indikator Kinerja Memuat Bidang urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kab. Luwu.....	IX-2

BAB X. KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1. Kaidah Pelaksanaan.....	X-1
10.2. Pedoman Transisi.....	X-3

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Gambar 1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-7
--	-----

BAB. II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kec. Kab.Luwu.....	II-2
Gambar 2. Peta Kabupaten Luwu	II-4
Gambar 3. Persentase Kelerengan Atau Kemiringan Lahan dan Ketinggian Tempat.....	II-5
Gambar 4. Persentase Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Kab.Luwu Tahun 2012.....	II-7
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kab.Luwu Tahun 2012.....	II-18
Tabel 2.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kab.Luwu.....	II-21
Tabel 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kab.Luwu.....	II-22
Tabel 2.5. Persentase Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB 2009-2013.....	II-23
Tabel 2.6. PDRB Kab.Luwu 2009-2012.....	II-24
Gambar 5. Angka Melek Huruf Kab.Luwu 2009-2012.....	II-25
Gambar 6. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI-SMA/MA.....	II-27

Gambar 7. Luas Tanah Sawah Menurut Jensi Pengairan di Kab.Luwu.....	II-31
Gambar 8. Tingkat Eletrifikasi di Kab.Luwu Tahun 2012.....	II-32
Gambar 9. Presentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tahun 2012.....	II-33
Gambar 10. Presentase RT Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2012.....	II-33
Gambar 11. Presentase RT Menurut Sumber Air Minum.....	II-34
Gambar 12. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009-2012.....	II-45
Tabel 2.7. IKK (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kab.Luwu 2009-2012.....	II-45
Tabel 2.8. Produktifitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2009-2012.....	II-48
Gambar 13. Persentase Luas Kawasan Hutan Kab.Luwu Tahun 2012.....	II-48

BAB.III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA

PENDANAAN

Tabel 3.1. Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kab.Luwu Tahun 2009-2012	III-4
Tabel 3.2. Realisasi PAD Pemerintah Kab.Luwu Tahun 2009-2013...	III-6
Tabel 3.3. Perkembangan Realisasi dana Pendapatan Transfer Pemerintah Kab.Luwu tahun 2009-2013.....	III-6

Tabel 3.4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kab.Luwu Tahun 2009-2013.....	III-7
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tidak Langsung Kab.Luwu Tahun 2009-2013.....	III-9
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kab.Luwu Tahun 2009-2013.....	III-9
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Luwu Tahun 2009-2013.....	III-11
Tabel 3.8. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013.....	III-13
Tabel 3.9. Proyeksi Pendapatan Daerah Kab.Luwu Tahun 2014-2019.....	III-14
Tabel 3.10. Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung Periodik yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat Kabupaten Luwu Tahun 2009-2013.....	III-17

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Tabel 4.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kab. Luwu 2009 – 2012.....	IV-14
---	-------

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-4
--	-----

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 6. Strategi Dan Arah Kebijakan Kab. Luwu.....	VI-2
---	------

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 7. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Kab.Luwu 2014-2019.....	VII-2
---	-------

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Table 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Untuk Urusan Wajib.....	VIII-3
Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program PrioritasYang Disertai Kebutuhan Pendanaan Untuk Urusan Pilihan.....	VIII-28

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel 9. Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Memuat Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab.Luwu.....	IX-2
--	------

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi

Kondisi Geografi merupakan hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik yaitu gambaran tentang ketersediaan sumber daya alam, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya maupun yang menyangkut fisiografi lahan, flora dan fauna beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Sedangkan kondisi demografi merupakan studi ilmiah tentang kependudukan, utamanya yang berkaitan dengan jumlah (size) penduduk, dimana di dalamnya meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau Kelompok tertentu yang di dasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu dalam rangka mendukung pembangunan.

Berdasarkan Aspek Geografi Maka **Karakteristik Wilayah** Kab. Luwu dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2012 yang dibagi habis menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau sekitar 8,66 persen dan 247,13 km² atau sekitar 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas wilayah kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar

1,16 persen. Luas masing-masing kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas kecamatan dan jumlah desa/kelurahan tiap kecamatan Kabupaten Luwu, 2012.

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas	Jumlah Desa
1	Larompong	225,25	7,51	13
2	Larompong Selatan	131,00	4,37	10
3	Suli	81,75	2,72	13
4	Suli Barat	153,50	5,12	8
5	Belopa	59,26	1,98	9
6	Kamanre	52,44	1,75	8
7	Belopa Utara	34,73	1,16	8
8	Bajo	68,52	2,28	12
9	Bajo Barat	66,30	2,21	9
10	Bassesang Tempe	181,7	6,06	12
11	Bassesang Tempe Utara	119,3	3,98	12
12	Latimojong	467,75	15,59	12
13	Bupon	182,67	6,09	10
14	Ponrang	107,09	3,57	10
15	Ponrang Selatan	99,98	3,33	13
16	Bua	204,01	6,80	15
17	Walenrang	94,60	3,15	9
18	Walenrang Timur	63,65	2,12	8
19	Lamasi	42,20	1,41	10
20	Walenrang Utara	259,77	8,66	11
21	Walenrang Barat	247,13	8,24	6
22	Lamasi Timur	57,65	1,92	9
Total		3.000,25	100	227

Sumber : Kabupaten Luwu dalam Angka, BPS Luwu, 2012.

B. Kondisi Geografis

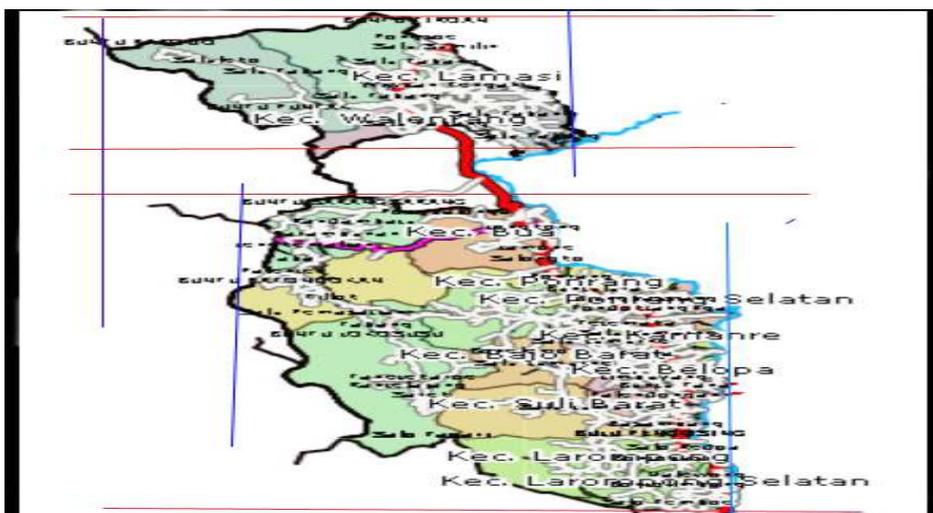
Secara geografis letak wilayah Kabupaten Luwu Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2°3'45" sampai 3°37'30" Lintang Selatan dan 119°15" sampai 121°43'11" Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi ibu kota Kabupaten Luwu berada pada bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar yang merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki dua wilayah yang dipisahkan oleh wilayah daerah lain yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota

Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo, sehingga Kota Palopo menjadi bagian dari batas di sebelah utara dan sebelah selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Sidrap, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Luwu memiliki Geostrategis yang wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, dengan panjang pantai 72 mil, luas wilayah pegunungan 63,99 persen dan wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01 persen, dengan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan, dataran dan pesisir merupakan potensi perekonomian yang sangat strategis dan potensi untuk mandiri sangat dimungkinkan. Kemudian adanya dukungan akses jalan transportasi darat antar provinsi yang lancar dan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Pelabuhan Ulo-Ulo dan Pelabuhan Balambang ditambah dengan keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun. Berikut Peta Kabupaten Luwu

Gambar 2. Peta Kabupaten Luwu

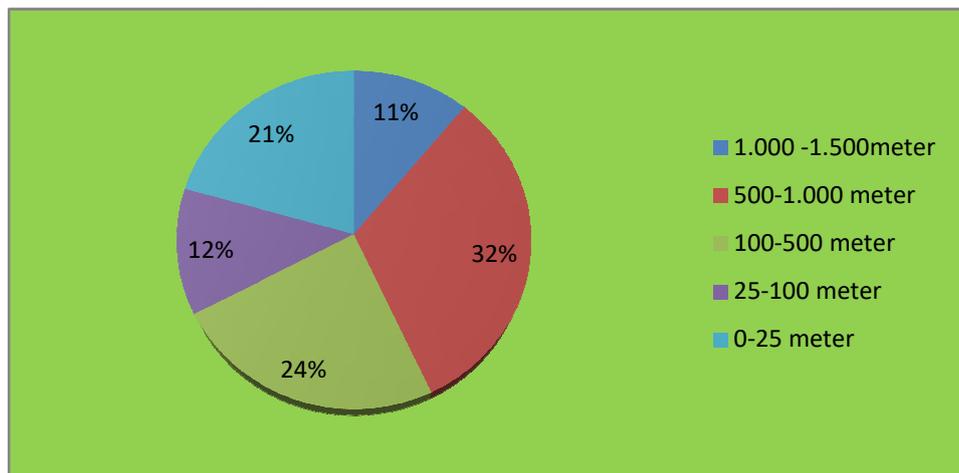


C. Kondisi Topografi

Kondisi kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Kabupaten Luwu sebagian oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40% dan ketinggian kurang dari 1500 meter dpl, dari ketinggian 0 m dpl hingga di atas 1.000 meter dpl. Sebanyak 647,78 km² (21,98%) berketinggian 0-25 meter dpl; seluas 384,76 km² (12,82%) berketinggian 25-100 meter dpl; sekitar 774,82 (25,83) wilayah lainnya berada

pada ketinggian 100-500 meter dpl; seluas 841,54 (34,16) berketinggian 500-1.000 meter dpl; dan seluas 351,34 km² (11,71%) berketinggian diatas 1.000 meter dpl. Dengan sebaran topografi wilayah, sebanyak 44 desa/kelurahan yang berada di daerah pantai dan 182 desa/kelurahan yang berada di daerahbukan pantai.

Gambar 3. Persentase kelerengan atau kemiringan lahan dan Ketinggian tempat



Sumber: BPS Kab.Luwu 2012.

Dengan memperhatikan kondisi kemiringan dan kelerengan akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan. Lahan datar dan pesisir di Kabupaten Luwu pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai besar, sungai kecil, tambak dan sawah serta perkebunan. Untuk lahan pegunungan terdapat juga aliran sungai besar, sungai kecil persawahan teraseling, perkebunan dan sebagian besar adalah kawasan hutan konservasi. Pemanfaatan lahan sebaiknya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu.

D. Kondisi Geologi

Bentuk permukaan struktur bumi di Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha. Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu,kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di

Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, *Batu Gamping* di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, *Granodiorit* di Kecamatan Bajo, *Rijang (Chert)* di Kecamatan Latimojong, *Kuarsa* di Kecamatan Walenrang, *Batu Sabak* di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, *Andesit* di Kecamatan Bajo, *Basalt* di Kecamatan Latimojong, Bajo, *Gabro* di Kecamatan Latimojong, *Diorit* di Kecamatan Latimojong, *Monzonit* di Kecamatan Latimojong, Larompong, *Besi* di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, *Lempung* di Kecamatan Bajo.

E. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat ke arah timur atau ke wilayah Teluk Bone kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman (Noling) melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 – 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

F. Kondisi Iklim

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran, pertemuan arus udara. Pada dasarnya di Kabupaten Luwu terdapat dua musim pada satu periode yang sama. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai bulan maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan

Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan april sampai dengan bulan september. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2012 berkisar 203,14 mm per bulan.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2012 berkisar dari 22,17°C sampai dengan 32,03°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 22,17 °C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 21 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun.

G. Kondisi Penggunaan Lahan

Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01 persen digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/ tebat/ empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2012 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 273.372 hektar (91,12 persen), sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 26.653 hektar (8,88 persen), dari 273.372 hektar lahan pertanian

tersebut 14,49 persen diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah 85,51 persen, persentase lahan persawahan akan mengalami peningkatan diakibatkan oleh adanya kegiatan percontakan sawah yang mencapai kurang lebih 3.500 ha.

Gambar 4. Persentase Luas Lahan Pertanian dan Bukan pertanian di Kab. Luwu tahun 2012



Sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10 – 15 m namun demikian jumlahnya arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim, untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone, penggunaan lahan pada wilayah ini digunakan untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha.

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan sebagian kecil terdapat areal persawahan terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, Kerbau, kambing dll).

Berdasarkan aspek Geografi maka **Potensi Pengembangan Wilayah** Kab. Luwu sebagai berikut :

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu didasarkan pada karakteristik dan keunikan yang dimiliki untuk

dikembangkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Hektar diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 hektar.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 hektar.
3. Kawasan perlindungan setempat kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa, dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 sampai dengan 15 meter.
4. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Benteng Tajojok terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan

Suli Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.

5. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
6. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 hektar. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 hektar.
7. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 hektar.
 - b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 hektar.
 - c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 hektar tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 hektar tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong; kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli

Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem; kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 hektar.

d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan.

8. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;

b. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan

c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

9. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.

b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.

- c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara , Walenrang Barat, Lamsi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa ,Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di Teluk Bone Utara.
10. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
- a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
 - b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
 - c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.
11. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu berupa kawasan adat /upacara adat perkawinan dan upacara penguburan mayat di Kecamatan Bastem. Kemudian kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
- a. wisata alam air terjun terdiri atas :
 - 1. Air Terjun Magandang di Kecamatan Walenrang Barat;
 - 2. Air Terjun Toga Tipayo, Salonsa di Kecamatan Walenrang Utara;
 - 3. Air Terjun Sarasa Katapuk di Kecamatan Latimojong;
 - 4. Air Terjun Buntu Sawa di Kecamatan Larompong;
 - 5. Air Terjun Paraposoang dan Karang Titala di Kecamatan Bua;
 - 6. Air Terjun Bungalo di Kecamatan Ponrang;
 - 7. Air Terjun Rumaju dan Sarasa Jambong di Kecamatan Bajo;
 - 8. Air Terjun Salosawa di Kecamatan Bastem;
 - 9. Air Terjun Tampumea dan Bilante di Kecamatan Bupon;

10. Air Terjun Salotodang, Serambu Masiang dan Tombanbai di Kecamatan Suli Barat; dan
 11. Air Terjun Tumbubara di Kecamatan Bajo Barat
- b. Wisata alam pantai terdiri dari:
 1. Pantai Bonepute di Kecamatan Larompong Selatan;
 2. Pantai Buntu Mata'bing di Kecamatan Larompong;
 3. Pantai Pannori di Kecamatan di Larompong Selatan;
 4. Pantai Batu Killong di Kecamatan Suli;
 5. Pantai Talumae di Kecamatan Belopa;
 6. Pantai Mamonta di Kecamatan Belopa Utara;
 7. Pantai Lare-Lare di Kecamatan Bua; dan
 8. Pantai Bone Pance, Bone Jambong dan Salolo di Kecamatan Ponrang Selatan.
 - c. Wisata alam pemandian terdiri atas:
 1. pemandian alam Bonto Tolle di Kecamatan Walenrang;
 2. pemandian alam Sapuangirat di Kecamatan Suli Barat; dan
 3. pemandian alam Makawa di Kecamatan Walenrang Utara.
 - d. Wisata alam goa terdiri atas:
 1. Goa Liang Andulan dan Goa Pompessak di Kecamatan Walenrang Utara Bastem;
 2. Goa Illanbatu di Kecamatan Walenrang Barat;
 3. Goa Lebani di Kecamatan Belopa Utara; dan
 4. Goa Palar di Kecamatan Larompong.
 - e. Wisata laut di Teluk Bone; dan
 - f. Wisata alam hutan penelitian Simoma Kecamatan Larompong Selatan.
12. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 hektar tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

13. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
- b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Selain potensi pengembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.

Selain karakteristik wilayah dan potensi pengembangan wilayah, geografi Kab. Luwu mencakup pula **Wilayah Rawan Bencana Alam**, Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana hingga tahun 2012 sebesar 1.134 jiwa (BPS Kab. Luwu 2012). Kondisi ini memerlukan sinergitas yang tinggi untuk mengurangi angka tersebut.

Tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;

Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta

mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencana angin kencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran *run-off* sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embun seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dalam mengelolah lingkungan hidup.

2.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan sebagai pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitannya peran penduduk tersebut, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Berdasarkan data BPS Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2012 adalah sebesar 338.609 jiwa terdiri dari 167.102 jiwa laki-laki dan 171.507 jiwa perempuan. Suku yang mendiami Kabupaten Luwu pada umumnya terdiri dari Suku Bugis, Suku Toraja, dan Suku Jawa.

Banyaknya Agama dan Penduduk menurut Agama di Kabupaten Luwu pada tahun 2012 terdiri dari Agama Islam sebesar 337.850 jiwa. Agama Kristen Protestan sebesar 10.336 jiwa. Agama Kristen Katolik sebesar 13.801 jiwa. Agama Budha sebesar 104 jiwa. Sarana peribadatan di Kabupaten Luwu yang tersebar keseluruh pelosok wilayah saat ini cukup memadai, yang terdiri dari 659 buah Masjid satu diantaranya adalah Masjid Raya Belopa yang terbesar, 142 Mushollah, 109 buah Gereja.

Perwujudan dari berkembangnya dinamika kehidupan beragama yang secara signifikan berdampak terhadap terciptanya suasana kondusif yang akan tumbuh dan berkembang kreatifitas masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat religius.

B. Pertumbuhan Penduduk

Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Luwu terus bertambah dimana laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan sebesar 0,83 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 335.828 jiwa terdiri dari 165.968 jiwa laki-laki dan 169.860 jiwa penduduk perempuan atau jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 338.609 jiwa terdiri dari 167.102 jiwa laki-laki dan 171.507 jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,31 persen dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,64 persen penduduk. Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km²,

Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 491,42 penduduk per kilometer persegi (km²) dengan luas wilayah hanya 1,4 persen dari luas kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di kecamatan Latimojong yaitu hanya 11,88 penduduk per kilometer persegi (km²) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas Kabupaten Luwu.

Persebaran penduduk Kabupaten menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah, terutama antar daerah ibu kota Kecamatan dan Desa sekitarnya, jumlah kepadatan penduduk pada 22 ibu kota kecamatan.

Tabel 2.2. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2012

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex Rasio
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Larompong	4.486	9.551	9.628	19.179	99,20
2	Larompong Selatan	3.688	7.948	8.143	16.091	97,61
3	Suli	3.907	8.993	9.827	18.820	91,51
4	Suli Barat	1.998	4.397	4.250	8.647	103,45
5	Belopa	3.173	7.081	8.005	15.086	88,46
6	Kamanre	2.544	5.571	5.875	11.446	94,83
7	Belopa Utara	3.264	7.222	7.592	14.814	95,13
8	Bajo	2.975	6.896	7.605	14.501	90,68
9	Bajo Barat	2.035	4.710	4.786	9.496	98,41
10	Bassesangtempe	3.566	7.425	6.948	14.373	106,87
11	Latimojong	1.523	2.846	2.712	5.558	104,94
12	Bupon	3.340	7.311	7.405	14.716	98,73
13	Ponrang	5.629	13.249	13.346	26.595	99,27
14	Ponrang Selatan	4.976	11.756	12.429	24.185	94,59
15	Bua	6.950	15.279	16.248	31.527	94,04
16	Walenrang	3.685	8.807	8.947	17.754	98,44
17	Walenrang Timur	3.299	7.746	7.818	15.564	99,08
18	Lamasi	4.894	10.358	10.380	20.738	99,79
19	Walenrang Utara	4.029	9.048	9.023	18.071	100,28
21	Walenrang Barat	4.757	4.732	4.327	9.059	109,36
22	Lamasi Timur	2.667	6.176	6.213	12.389	99,40
	Jumlah	74.385	167.102	171.507	338.609	97,43

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Tahun 2012

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Proses pembangunan di Kabupaten Luwu masih terdapat ketimpangan kewilayahan akibat dari kegiatan ekonomi yang belum merata. Secara makro terdapat kesenjangan kewilayahan khususnya antara daerah pegunungan

(Kecamatan Suli Barat, Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat) dan daerah dataran dan pesisir. Kesenjangan ini perlu diselesaikan secara simultan, komprehensif dan berkelanjutan mengingat bahwa potensi kemiskinan dapat timbul akibat adanya kesejangan wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dimana Nilai PDRB yang digunakan itu adalah Nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 menunjukkan trend yang terus menerus mengalami kenaikan. Angka 6,82 persen pada tahun 2009 dapat dikatakan mengalami kenaikan drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,74 persen. Hal ini berarti ekonomi Kabupaten Luwu bertumbuh lebih cepat 1,08 persen dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2010, ekonomi Kabupaten Luwu semakin cepat bertumbuh mencapai 6,95 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2011, pertumbuhannya mencapai 7,47 persen, meningkat 0,52 persen dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2012, pertumbuhannya mencapai 7,49, atau sedikit meningkat 0,02 persen dari tahun lalu. Selama periode tahun 2008 – 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 6,89 persen per tahun, sedikit lebih baik dibanding rata-rata sebelumnya yang mencapai 6,50 per tahun.

Kemudian untuk perhitungan PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu mencapai nilai 5.030.495,95 juta rupiah. Dibandingkan tahun 2011, angka PDRB ini meningkat cukup signifikan yaitu sekitar 679.345,55 juta rupiah atau naik sekitar 15,61 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011, 2010, dan 2009. Selama kurun waktu tersebut, PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu secara terus-menerus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu mencapai angka 2.696.359,13 juta rupiah, di tahun 2009 meningkat sekitar 18,52 persen menjadi 3.195.646,48 juta rupiah, di tahun 2010

meningkat sekitar 16,33 persen menjadi 3.195.646,47 juta rupiah, dan di tahun 2011 meningkat sekitar 17,04 persen menjadi 4.351.150,40

Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Luwu setiap tahunnya juga mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2012, PDRB ADH Konstan 2000 Kabupaten Luwu mencapai 1.954.090,35 juta rupiah atau naik sekitar 136.146,77 juta rupiah, bertumbuh sekitar 7,49 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2011 mencapai 1.817.943,58 juta rupiah atau naik sekitar 126.431,84 juta rupiah atau bertumbuh sekitar 7,47 persen dibandingkan tahun 2010 yang nilainya mencapai 1.691.511,74 juta rupiah. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2009, yaitu sekitar 100.994,34 juta rupiah atau sekitar 6,82 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 masih didominasi oleh sektor Pertanian. Pada tahun 2012 kontribusi sektor Pertanian dalam pembentukan nilai Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Luwu sekitar 49,71 persen atau hampir separuh nilai total PDRB Kabupaten Luwu berasal sektor Pertanian. Besarnya kontribusi sektor Pertanian erat kaitannya dengan peranan sub sektor Tanaman Perkebunan, sub sektor Perikanan, dan sub sektor Tanaman Bahan Makanan masing-masing sebesar 23,70 persen, 14,14 persen, dan 9,66 persen. Selain peranan sektor Pertanian, sektor lainnya yang juga cukup berperan dalam pembentukan nilai total PDRB Kabupaten Luwu adalah sektor Jasa-Jasa dengan kontribusi tercatat 19,64 persen, disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 12,07 persen, serta sektor Bangunan dan sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar 7,22 persen dan 5,87 persen.

Tabel2.3. Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu (Juta Rupiah) 2009-2012

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	1.638.294,88	1.850.037,78	2.151.037,38	2.500.663,94
a. Tanaman Bahan Makanan	385,089,85	416.869,66	433.166,25	486.087,55
b. Tanaman Perkebunan	865,706,71	930.625,15	1.070.043,57	1.192.279,48
c. Peternakan dan Hasilnya	45.421,87	63.520,29	72.781,76	82.802,13
d. Kehutanan	318.218,46	22.995,89	25.509,39	28.224,56
e. Perikanan		416.026,78	549.536,42	711.270,22
2. Pertambangan dan Galian	27.273,81	28.075,20	34.419,20	40.162,16
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-
c. Penggalian	27.273,81	28.075,20	34.419,20	40.162,16

3. Industri Pengolahan	255.442,53	266.232,00	279.998,25	295.222,09
a. Industri Migas	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	255.442,53	266.232,00	279.998,25	295.222,09
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	11.018,07	12.808,57	14.605,31	16.2200,67
2. Tekstil, kulit & alas kaki	1.313,71	1.615,24	1.973,15	2.393,58
3. Kayu & Hasil Hutan lainnya	229.101,01	234.613,81	242.670,82	255.262,56
4. Kertas & Barang Cetak	495,54	451,31	491,53	533,90
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	1.653,66	2.484,64	3.201,45	3.673,19
6. Semen dan Barang Galian bukan logam	-	1.028,47	1.148,51	-
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	74,75	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	5.744,78	6.477,21	8.564,59	9.395,87
9. Barang Lainnya	6.115,76	6.677,99	7.342,88	7.742,33
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6.081,18	7.230,06	8.747,36	10.523,31
a. Listrik	4.750,71	5.675,07	6.876,27	8.036,21
b. Gas	-	-	-	-
c. Air Bersih	1.330,46	1.554,99	1.871,09	2.487,10
5. Bangunan	241.942,34	263.191,85	316.708,54	363.395,13
6. Perdag., Hotel & Restoran	304.848,43	415.081,91	519.683,09	603.335,89
a. Perdagangan Besar & Eceran	300.299,23	409.650,86	513.118,15	599.840,29
b. Hotel	553,39	895,27	1.302,09	1.449,50
c. Restoran	3.995,80	4.535,77	5.262,85	6.066,09
7. Angkutan & Komunikasi	39.392,68	65.677,26	83.840,50	101.866,60
a. Angkutan	39.392,68	47.736,90	62.112,52	74.619,40
1. Angk. Rel	-	-	-	-
2. Angk. Jalan Raya	36.254,11	44.346,43	61.215,65	73.674,77
3. Angk. Laut	2.498,15	2.575,92	-	-
4. Angk. Sungai, Danau, & Pnybr.	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	29,61	110,89	107,48	83,97
6. Jasa Penunjang Angk.	610,81	703,67	789,39	860,66
b. Komunikasi	15.967,86	17.940,36	21.727,98	27.247,20
1. Pos & Telekomunikasi	15.967,86	17.940,36	21.727,98	27.247,20
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	70.735,54	92.480,57	106.279,29	123.314,80
a. Bank	25.968,00	42.998,00	49.504,45	56.719,21
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1.368,72	1.544,41	1.961,96	2.241,57
c. Jasa penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	43.007,40	47.466,81	54.178,40	63.581,47
e. Jasa Perusahaan	391,42	471,35	634,48	772,55
9. Jasa – Jasa	595.667,23	729.626,30	850.436,78	987.992,02
a. Pemerintahan Umum	591.272,19	724.092,41	843.724,41	979.118,25
1. Adm. Pemerintah & Pertanahan	366.588,76	453.908,67	532.386,99	572.583,77
2. Jasa Pemerintah Lainnya	224.683,43	270.183,73	311.337,42	406.534,48
b. Swasta	4.395,04	5.533,90	6.712,38	8.873,77
1. Sosial Masyarakat	2.555,14	3.274,26	3.795,97	4.973,77
2. Hiburan & Rekreasi	121,45	159,58	213,28	268,59
3. Perorangan dan rumah tangga	1.718,45	2.100,05	2.703,12	3.631,96
PDRB	3.195.646,47	3.717.632,93	4.351.150,40	5.030.495,95

Sumber : BPS Kab. Luwu 2012

Tabel2.4. Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu (Juta Rupiah) 2009-2012

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	902.772,24	956.202,28	1.020.778,57	1.098.390,68
a. Tanaman Bahan Makanan	172.531,51	175.813,67	172.286,75	180.543,27
b. Tanaman Perkebunan	540.019,38	556.030,73	583.735,02	605.542,18
c. Peternakan dan Hasilnya	23.711,68	25.742,23	27.836,47	29.814,80
d. Kehutanan	12.160,58	11.420,36	11.948,97	12.417,83
e. Perikanan	154.349,09	187.195,29	224.971,37	270.072,61
2. Pertambangan dan Galian	15.899,81	15.760,67	18.461,31	20.255,05
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-
c. Penggalan	15.899,81	15.760,67	18.461,31	20.255,05
3. Industri Pengolahan	152.711,57	158.152,31	160.911,02	163.816,24
a. Industri Migas	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	152.711,57	158.152,31	160.911,02	163.816,24
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	6.406,21	7.097,16	7.783,54	8.230,23
2. Tekstil, kulit & alas kaki	740,90	870,14	954,37	1.081,10
3. Kayu & Hasil Hutan lainnya	136.582,47	139.862,17	141.013,38	143.589,10
4. Kertas & Barang Cetak	305,21	254,26	267,02	282,96
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	1.165,94	1.358,91	1.510,69	1.708,20
6. Semen dan Barang Galian bukan logam	-	785,02	841,11	-
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	52,70	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	3.421,59	3.748,39	4.191,68	4.532,29
9. Barang Lainnya	4.089,24	4.123,57	4.349,24	4.392,34
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.441,59	3.821,20	4.450,15	5.201,77
a. Listrik	2.737,35	3.070,14	3.620,52	4.126,76
b. Gas	-	-	-	-
c. Air Bersih	704,24	751,07	829,63	1.075,01
5. Bangunan	103.606,76	107.681,56	121.344,16	131.542,29
6. Perdag., Hotel & Restoran	154.973,02	183.784,45	211.208,87	236.576,25
a. Perdagangan Besar & Eceran	152.568,38	181.088,77	208.193,51	233.334,97
b. Hotel	316,71	479,55	599,23	622,33
c. Restoran	2.087,93	2.216,14	2.416,13	2.618,95
7. Angkutan & Komunikasi	29.077,95	32.260,22	35.924,78	42.100,66
a. Angkutan	20.416,25	22.573,56	24.500,39	28.173,23
1. Angk. Rel	-	-	-	-
2. Angk. Jalan Raya	18.736,25	20.793,74	24.041,97	27.698,67
3. Angk. Laut	1.314,82	1.340,57	-	-
4. Angk. Sungai, Danau, & Pnybr.	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	18,54	67,71	64,31	49,52
6. Jasa Penunjang Angk.	346,64	371,55	394,11	425,04
b. Komunikasi	8.661,70	9.686,65	11.424,38	13.927,43
1. Pos & Telekomunikasi	8.661,70	9.686,65	11.424,38	13.927,43
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	36.177,84	44.651,86	49.311,68	55.436,13
a. Bank	12.576,40	19.752,77	21.948,12	24.763,37
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	720,79	776,65	921,71	1.037,66
c. Jasa penunjang Keuangan	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	22.666,43	23.882,15	26.163,57	29.307,48

e. Jasa Perusahaan	214,22	240,29	278,28	327,63
9. Jasa – Jasa	183.002,65	189.197,19	195.553,05	200.771,29
a. Pemerintahan Umum	180.501,93	186.177,56	192.104,13	196.344,01
1. Adm. Pemerintah & Pertanahan	111.911,20	116.708,32	121.217,00	124.874,79
2. Jasa Pemerintah Lain-nya	68.590,73	69.469,24	70.887,13	71.469,22
b. Swasta	2.500,72	3.019,63	3.448,92	4.427,28
1. Sosial Kemasyarakatan	1.521,50	1.864,98	2.101,20	2.689,92
2. Hiburan & Rekreasi	61,67	78,91	98,11	120,21
3. Perorangan dan rumah tangga	917,55	1.075,74	1.249,60	1.608,15
PDRB	1.581.663,42	1.691.511,74	1.817.943,58	1.954.090,35

Sumber : BPS Kab. Luwu 2012

Tabel 2. 5. Persentase Perkembangan kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2009 –2013 ADH Berlaku (HB) dan ADH Konstan (HK) Kabupaten Luwu

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Pertanian	51,27	57,08	49,76	56,53	49,44	56,15	49,71	56,21
2	Pertambangan & penggalian	0,85	1,01	0,76	0,93	0,79	1,02	0,80	1,04
3	Industri Pengolahan	7,99	9,66	7,16	9,35	6,44	8,85	5,87	8,38
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,19	0,22	0,19	0,23	0,20	0,24	0,21	0,27
5	Konstruksi	7,57	6,55	7,08	6,37	7,28	6,67	7,22	6,73
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	9,54	9,80	11,17	10,87	11,94	11,62	12,07	12,11
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,73	1,84	1,77	1,91	1,93	1,98	2,02	2,15
8	Keu, Persewaa & Jasa Persh	2,21	2,29	2,49	2,64	2,44	2,71	2,45	2,84
9	Jasa - jasa	18,64	11,57	19,63	11,19	19,55	10,76	19,64	10,27

Sumber : BPS Kab. Luwu 2012

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu, 2009 – 2012

Tahun	PDRBADH Berlaku (JutaRupiah)	Perkembangan Ekonomi (Persen)	PDRBADH Konstan 2000 (JutaRupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	3.195.646,47	18,52	1.581.663,42	6,82
2010	3.717.632,93	16,33	1.691.511,74	6,95
2011	4.351.150,40	17,04	1.817.943,58	7,47
2012	5.030.495,95	15,61	1.954.090,35	7,49

Sumber : BPS Kab. Luwu 2012

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sebagai regulator roda perekonomian di Kabupaten Luwu berhasil menerapkan program-program yang menunjang perekonomian namun demikian perlu pengembangan sektor lain yang dapat mengiringi sektor pertanian dengan melakukan pengembangan sektor industri pengolahan sehingga peningkatan nilai

tambah dengan harapan perekonomian lebih tahan terhadap pergerakan krisis finansial global, dan lain sebagainya.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan, sebaliknya makin tinggi persentase penduduk yang buta huruf mengindikasikan kurang berhasilnya program pendidikan. Data BPS Kabupaten Luwu tahun 2012 menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca/menulis sebesar 9,26 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu pada akhir tahun 2009 mencapai 5.365 orang. Kemudian pada akhir tahun 2009 dibelajarkan sebanyak 1.597 orang, sisa 3.768 orang, kemudian pada akhir tahun 2010 dibelajarkan sebanyak 763 orang, sisa 3.005 orang, selanjutnya awal tahun 2011 dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Luwu melakukan pendataan ulang terhadap peserta AMH dari 3.005 bertambah 50 orang peserta, sehingga peserta AMH berjumlah sebanyak 3.055 orang, kemudian dibelajarkan sebanyak 900 orang pada tahun 2011, sisa 2.105 orang dan selanjutnya pada akhir tahun 2012 telah dibelajarkan sebanyak 260 Orang dan masih tersisa sebanyak 1.845 orang.

Gambar 5. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2012



Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu 2012

Merujuk pada jenjang pendidikan maka penduduk usia sekolah biasanya dikelompokkan ke dalam empat (4) kelompok umur, yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), 16-18 tahun (SMA) dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Pada tahun 2012 penduduk usia sekolah adalah sekitar 37,07 persen dari total penduduk Kabupaten Luwu. Diantara penduduk usia sekolah ini, terdapat 70,09 persen yang berstatus masih sekolah, 28,66 persen pernah bersekolah (saat ini tidak bersekolah lagi) dan 1,25 persen belum pernah sekolah (Tabel 4.1.4).

Ketersediaan dan penyebaran guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru dan peserta didik, di Kabupaten Luwu pada kurun waktu 2011 – 2012, rasio murid guru SD mengalami penurunan yaitu sekitar 17 pada tahun 2011 menjadi 11 di tahun 2012. Sedangkan rasio murid-guru SLTP pada tahun 2011 di angka 12 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 15. Sedangkan rasio murid-guru SLTA mengalami sedikit peningkatan pada angka 15 di tahun 2011 dan 16 di tahun 2012. Dari angka-angka di atas, dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 11 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar, 15 murid SLTP serta 16 murid SLTA yang

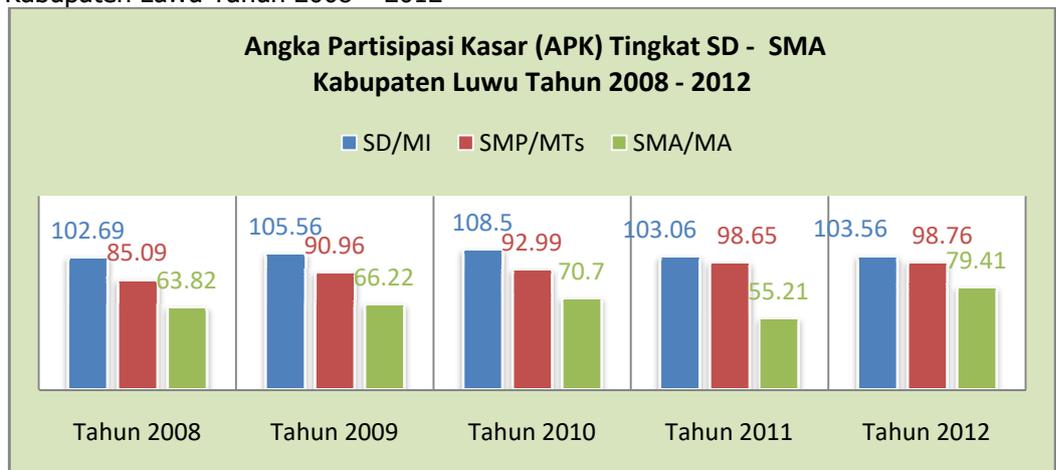
harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Luwu periode 2008 –2012 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan, dimana APK untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2008 sebesar 102,69 persen, meningkat menjadi 105,56 persen, meningkat lagi menjadi 108,50 pada tahun 2010, sedangkan APK pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 103,06 persen, selanjutnya mengalami peningkatan kembali menjadi 103,65 persen pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan rata-rata dalam setiap tahun sebesar 1,16 persen.

Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2008 sebesar 85,09 persen, dan selanjutnya meningkat pada tahun 2012 menjadi 98,76 persen atau mengalami peningkatan rata-rata dalam setiap tahun sebesar 2,73 persen.

Sementara untuk jenjang SMA/MA periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2008 sebesar 63,82 persen, meningkat menjadi 66,22 persen pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi 70,70 persen pada tahun 2010, sementara pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 55,21 persen, dan selanjutnya kembali mengalami peningkatan menjadi 79,41 persen di tahun 2012.

Gambar 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/MI – SMA/MA Kabupaten Luwu Tahun 2008 – 2012



Sumber Data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu 2012

Perkembangan APK pada semua jenjang pendidikan selain dukungan sumber daya tenaga pendidik (guru) juga dipengaruhi oleh adanya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, khusus di Ibukota KabupatenLuwu (Belopa) telah didirikan fasilitas perpustakaan yang telah memenuhi standar perpustakaan Nasional sementara untuk disetiap kecamatan terdapat minimal satu perpustakaan dan bebrapa desa di Kabupaten Luwu telah tersedia perpustakaan dan tenaga kepastakaan. Upaya yang telah dilakukan pula yakni dengan menyediakan perpustakaan keliling yang mampu mengakses kantong-kantong buta aksara di Kabupaten Luwu.

2. Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan tenaga yang mengerti di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pada tahun 2012 telah tersedia Rumah Sakit Umum yang berada di Kecamatan Belopa Utara, dan telah terdapat 21 Puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, sehingga sudah terdapat Puskesmas di setiap kecamatan. Rasio penduduk per Puskesmas di tahun 2010 adalah sekitar 15.832 orang, kemudian angka ini meningkat menjadi sekitar 15.992 orang pada tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi sekitar 16,124 orang di tahun 2012. Terjadinya peningkatan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Sementara untuk tenaga medis keperawatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2010 sebanyak 234 orang, lalu berkurang menjadi 223 orang pada tahun 2011, dan kembali berkurang di tahun 2012 menjadi 214 orang. Sedangkan tenaga medis dokter (dokter ahli, dokter umum, dan dokter gigi) pada tahun 2010 berjumlah 29 orang, lalu bertambah menjadi 31 orang pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 berkurang menjadi 30 orang.

Sedangkan untuk tenaga medis bidan pada tahun 2010 sebanyak 164 orang, berkurang menjadi 162 orang pada tahun 2011, dan berkurang lagi menjadi 157 orang pada tahun 2012. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 dari 11.464 orang penduduk terdapat seorang dokter. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja tenaga medis (Dokter, Bidan, dan Tenaga Paramedis Lain) yaitu dengan memperhatikan data Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (Dokter, Bidan, dan Tenaga Paramedis Lain) adapun data yang dimaksud adalah pada tahun 2010 sekitar 66,71 persen mengalami penurunan menjadi 60,46 persen pada tahun 2011. Namun di tahun 2012, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 67,90 persen dari seluruh kasus kelahiran yang ada.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan juga dapat dilihat indikator derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH; e0). Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu pada tahun 2012 adalah sekitar 74,14 tahun mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74,04 tahun.

Perkembangan pencapaian indikator kesehatan merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan memperhatikan banyaknya Kader Posyandu di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2010, jumlah Kader Posyandu di Kabupaten Luwu berjumlah 1.512 orang Kader, mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi berjumlah 1.704 orang Kader, dan kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 1.746 orang Kader.

Perkembangan Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu perlu terus di tingkatkan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk peningkatan kinerja pada perencanaan mendatang adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Puskesmas, melakukan peninglatan kapasitas rumah sakit umum daerah (RSUD Sawerigading), Pemerataan layanan kesehatan ke daerah terpencil dan peningkatan pelayanan masyarakat miskin, peningkatan

kemampuan tenaga medis dalam melayani masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya melalui perbaikan gizi, pengembangan lingkungan sehat dan peningkatan pola hidup sehat.

3. Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui pengembangan simpul-simpul kegiatan ekonomi rakyat perlu dukungan infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan jaringan listrik, pengembangan pembangunan pelabuhan, pengembangan pembangunan Bandara Bua. Mengingat basis dari kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu adalah pertanian maka infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penyediaan dan pengelolaan air baku; Pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya; serta rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Untuk panjang jalan di Kabupaten Luwu pada tahun 2013 mencapai 1.865,83 km. terdiri dari jalan negara sepanjang 115,50 km, jalan Provinsisepanjang 32,00 km dan jalan Kabupaten sepanjang 1.718,33. Berdasarkan kondisi jalan tersebut, tercatat sekitar 445,3 km dalam kondisi baik, 492,18 km dalam kondisi rusak sedang kerikil, 548,27 km dalam kondisi rusak dan 232,52 dalam kondisi rusak berat. Hubungan transportasi antara ibu kota Kabupaten dengan beberapa kecamatan serta beberapa hubungan antar kecamatan secara umum sudah berlangsung dengan baik namun demikian masih ada beberapa Kecamatan yang mengalami kondisi dalam kondisi kurang baik utamanya Kecamatan yang berada pada wilayah pegunungan seperti Kecamatan Latimojong, Kecamatan Basesangtempe, Kecamatan Basesangtempe Utara dan Kecamatan Walenrang Barat. Akses jalan yang telah tersedia memacu kepemilikan kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kabupaten Luwuhingga tahun 2012 sebanyak 43.123 kendaraan, dari jumlah tersebut 39.103 diantaranya sepeda motor dan sisanya sebesar 4.020 adalah jenis kendaraan roda empat (mobil).

Kedepan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perlu terus ditingkatkan utamanya pada daerah penyangga ibu Kota Kabupaten Luwu dan pada wilayah Kecamatan yang dilalui oleh jalur trans Makassaragar dibuatkan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Sementara pada wilayah pegunungan perencanaan lebih banyak diarahkan ke pembangunan jembatan, pembangunan saluran drainase, pembangunan plat dekker serta peningkatan kapasitas jalan yang tergolong rusak parah. Selain itu kegiatan yang perlu terus ditingkatkan adalah perintisan jalan produksi, perintisan jalan tani dan perintisan jalan tambak.

Pengembangan pembangunan pelabuhan yang telah dilaksanakan perlu terus ditingkatkan utamanya pada Pelabuhan Taddatta, Pelabuhan Ulo-ulo dan Pelabuhan Balambang. Selain pelabuhan moderen perlu juga dikembangkan pelabuhan rakyat tradisional agar ditingkatkan menjadi pelabuhan semi moderen untuk tempat pelelangan ikan dan aktifitas lainnya sehingga kegiatan pada wilayah pesisir dapat terakses secara maksimal.

Infrastruktur yang mendukung usaha pertanian adalah irigasi bertikut luas tanah sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Luwu tahun 2011 adalah 20.618 ha, terdiri dari irigasi teknis seluas 13.144 ha. Irigasi setengah teknis seluas 1.738 dan irigasi sederhana seluas 5.736 ha.

Perencanaan pengembangan infrastruktur pertanian kedepan agar memaksimalkan sumber daya alam, seperti pembuatan embun, peningkatan jangkauan irigasi, pengembangan jaringan rawa, konservasi sungaidengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

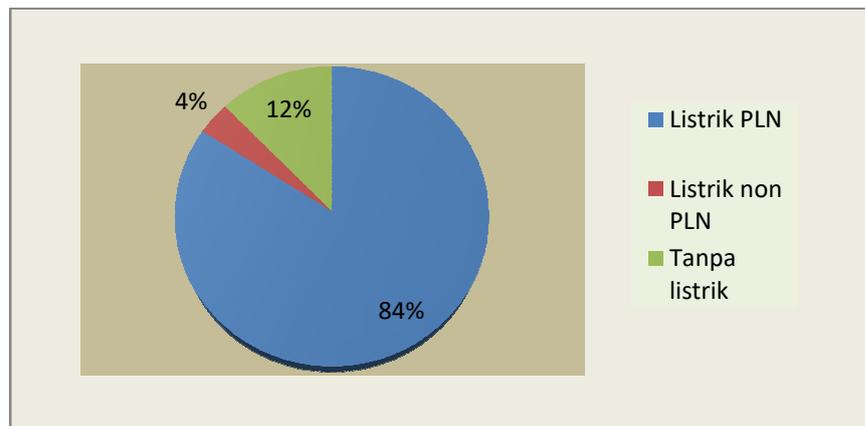
Gambar 7. Luas tanah sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Luwu Tahun 2011



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga pengelolaan kebutuhan listrik perlu terus ditingkatkan untuk Kabupaten Luwu jumlah sambungan pelanggan PLN pada Tahun 2012 sebesar 47.684 sambungan. Tingkat elektrifikasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2012 sebesar 84,17 persen terdiri dari 80,61 persen listrik PLN dan 3,56 persen listrik non PLN. Dengan data tersebut pengelolaan kebutuhan listrik diarahkan melalui penggunaan listrik tenaga surya untuk wilayah pesisir yang jauh dari sambungan tiang listrik dan pada wilayah pegunungan diupayakan penggunaan listrik tenaga hidro mikro mengingat jumlah aliran sungai cukup banyak pada wilayah tersebut.

Gambar 8. Tingkat Elektrifikasi di Kabupaten Luwu tahun 2012



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Dengan perkembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian maka aksesibilitas bidang perhubungan udara perlu terus ditingkatkan dengan mengupayakan pengembangan pembangunan

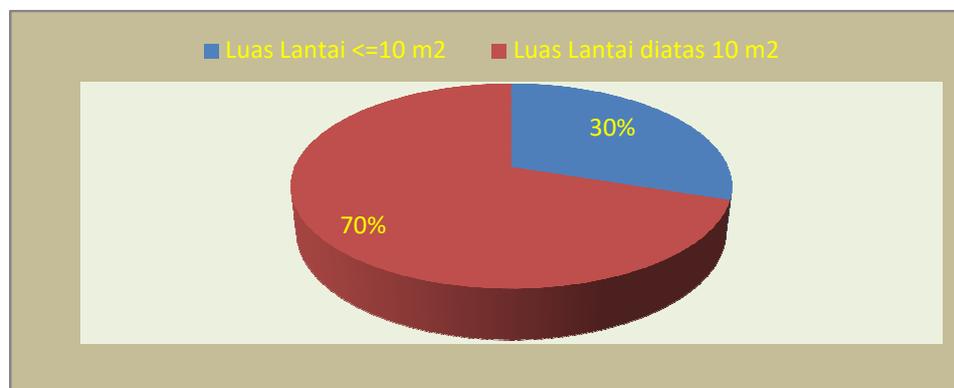
Bandara Bua, mengingat Bandara Bua memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Perumahan dan Tata Ruang.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 6 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berbasis pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam.

Berkembangnya sektor pertanian di Kabupaten Luwu berdampak pada meningkatnya jumlah bangunan perumahan, pertokoan, dan ruko selain jumlahnya yang bertambah kualitas dari pada bangunannya juga ikut bertambah berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan sekitar 68,89 persen rumah tangga di Kabupaten Luwu menempati rumah dengan luas lantai perkapitanya lebih dari 10 m², sedangkan yang kurang dari sama dengan 10 m² sekitar 31,11 persen.

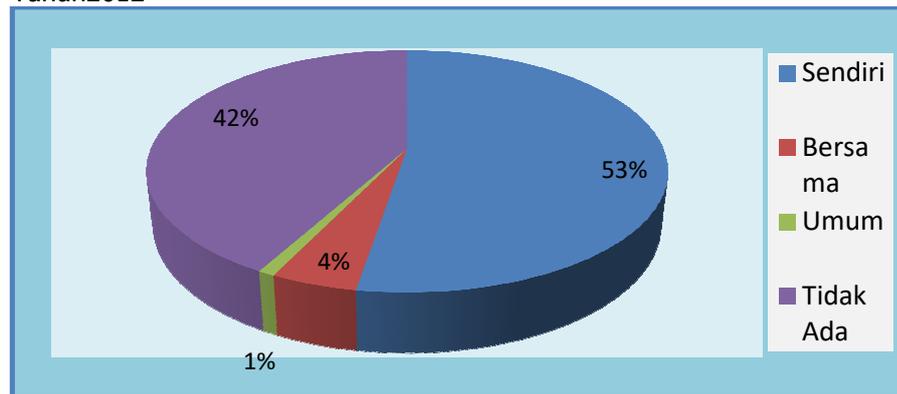
Gambar 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tahun 2012



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Gambaran fasilitas rumah lainnya yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan yaitu penggunaan tempat buang air besar dimana sekitar 52,60 persen memiliki tempat buang air besar sendiri.

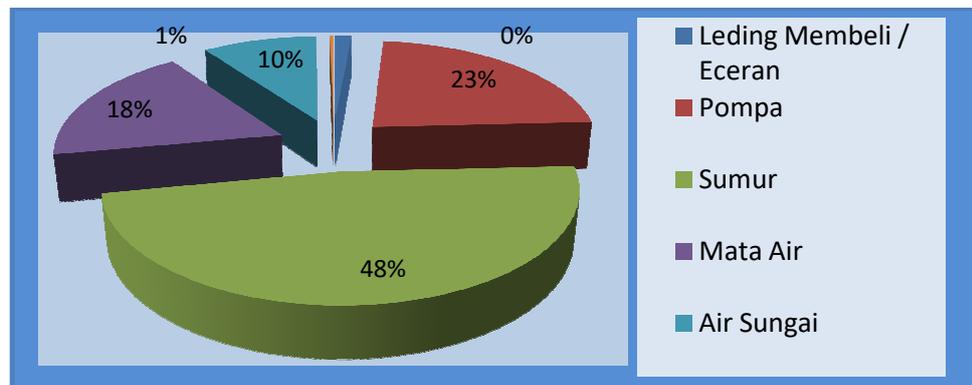
Gambar 10. Persentase RT Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2012



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Selain hal tersebut air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup, sampai dengan tahun 2012 jumlah konsumen/pelanggan yang telah tersambung dengan jaringan air minum PDAM sebanyak 2.476 pelanggan dengan kemampuan kapasitas produksi PDAM yang dikelola sebanyak 460.943 M3 masih memungkinkan penambahan jumlah konsumen/pelanggan dimasa mendatang. Secara umum penggunaan air bersih untuk rumah tangga di Kabupaten Luwu masih mengkonsumsi air minum yang berasal dari sumur dengan besaran 48 persen.

Gambar 11. Persentase RT Menurut Menurut Sumber Air Minum. Tahun 2012



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Kondisi perumahan yang masih tidak layak huni sebagian besar berada pada wilayah pesisir dan pegunungan, melihat kondisi tersebut telah dilaksanakan beberapa solusi untuk peningkatan kualitas perumahan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, rehabilitasi rumah nelayan, pembangunan sanitasi berbasis masyarakat

serta bantuan lain yang dianggap mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan pemilik rumah tersebut.

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang juga sangat mendukung kelangsungan dan kenyamanan tempat tinggal adalah drainase dan persampahan. Kondisi drainase saat ini beragam antar Kecamatan di Kabupaten Luwu, hal ini terkait dengan topografi setempat. Di daerah yang terletak pada dataran tinggi drainasenya lebih lancar dibandingkan dengan dataran rendah. Keadaan ini terjadi karena sistem drainase yang dibuat relatif sama, sehingga kelancarannya lebih tinggi di daerah yang topografinya tidak datar. Kemudian khusus di ibukota Kabupaten masih sering terjadi genangan pada musim penghujan akibat dari saluran drainase sering tersumbat karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah ke dalam saluran drainase, disamping relatif rendahnya pemeliharaan saluran tersebut.

Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dengan aktifitas yang meningkat, menyebabkan pengelolaan limbah perlu ditingkatkan dan direncanakan antisipasi untuk masa yang akan datang dengan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dengan menyediakan kendaraan penyedot mengingat rata-rata penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga.

Kabupaten Luwu sebagai jalur utama trans Sulawesi memiliki potensi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang cukup tinggi, dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan penataan pada beberapa wilayah yang telah memenuhi kriteria tersebut untuk terus dipacu dalam hal penataan dan regulasinya.

Tantangan penataan ruang di Kabupaten Luwu kedepan akan mengalami peningkatan diakibatkan oleh perkembangan kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk meminimalisir terjadinya pola Kabupaten yang kurang baik dalam penataan ruangnya maka peranan dan kerjasama semua pihak dalam menjalankan Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah adalah hal yang harus dilaksanakan.

5. Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana; keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD Lembaga masyarakat lainnya, organisasi profesi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD, dan Forum *Multistakeholder*;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan yang berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*) dengan mencakup lima aspek, yaitu : Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*).

Dari pengembangan SDM Bappeda Kabupaten Luwu telah menghasilkan beberapa kajian dan dokumen perencanaan meliputi RPJPD, RPJMD RTRW, RKPD, KUA-PPAS, data base pembangunan, data base kemiskinan, dan data-data pembangunan serta kajian – kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; Meningkatnya fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan *focusedgroup discussion* (FGD); Serta meningkatnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dalam kurung waktu lima tahun terakhir selain capaian tersebut di atas juga telah dibuat perencanaan yang bersifat khusus, misalnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya antara lain Penyusunan *Grand Design* Penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Luwu, Penyusunan laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Bidang ekonomi Ekonomi dan Penanaman modal antara lain Penyusunan *Grand Design* Industri Unggulan Kabupaten Luwu, *Grand Design* Budidaya rumput laut kabupaten Luwu. Bidang fisik dan prasarana antara lain Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Partisipatif (PPSIP) dan Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) serta fasilitasi kerjasama LSM internasional seperti Care dan Usaid.

Kompleksitas pembangunan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat membuat sisi perencanaan pembangunan memerlukan upaya peningkatan secara terus menerus baik dari segi peningkatan SDM maupun fasilitas lainnya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi

perencanaan yang tidak tepat sasaran dan perencanaan yang kurang terintegrasi.

6. Pemerintahan Umum.

Agenda pembangunan bidang pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berbagai prioritas program yang akan dicapai, terutama berkaitan dengan: Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara makro penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada Kabupaten merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh Desa dan Kelurahan yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Luwu. Berdasarkan hal itu pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sangat ditentukan oleh keterpaduan kebijakan pemerintahan Kabupaten, SKPD dan Desa/kelurahan.

Sebagai agenda yang sangat strategis dalam pencapaian RPJMD pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, wajib mendapat perhatian khusus diantaranya peningkatan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang otonomi dan pemerintahan umum, dan administrasi keuangan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mantap dan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada *good governance*; Peningkatan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Peningkatan koordinasi penyelenggaraan, penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai penataan kelembagaan melalui penetapan berbagai peraturan daerah.

Pelaksanaan prioritas pengembangan SDM masih perlu ditingkatkan karena masih banyak hal yang perlu dicapai untuk mewujudkan *good governance*, seperti antara lain belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good*

Governance); Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan; Masih belum optimalnya standarisasi baik untuk rekrutmen pegawai dalam penentuan jabatan publik (promosi); Masih lemahnya koordinasi antara pemerintahan dan antar instansi; Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan dan jenis, dan sifat pekerjaan; Terbatasnya kualitas SDM aparatur sehingga dapat mengurangi kinerja pemerintahan; Sistem insentif/perbaikan penghasilan yang belum didasarkan atas beban kerja, tanggung jawab dan kompetensi/kecakapan, kerajinan aparatur; Terbatasnya SDM pengelola Diklat dan belum terpenuhi semua spesialisasi/mengajar terutama keuangan dan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Luwu baik pada aspek, ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan lainnya dengan tetap memperhatikan materi Peraturan Daerah yang akomodatif terhadap pengembangan nilai-nilai lokal. Adapun Peraturan Daerah yang dihasilkan dalam periode jabatan Bupati Luwu tahun 2014 - 2019 sebanyak 55 buah peraturan daerah.

Upaya peningkatan dalam menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan berkualitas, melalui melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumberdaya aparatur perancang perundang-undangan, pengkajian produk hukum yang melanggar HAM, pengembangan jaringan informasi hukum. Untuk penegakan hukum yang optimal, perlu dilakukan koordinasi antar berbagai aparatur penegak hukum, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang merupakan kewenangan dari daerah, terutama dalam penegakan peraturan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat, juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum yang dibentuk.

Pada bidang pelayanan publik secara umum telah dilakukan perbaikan dengan penetapan standar pelayanan, penetapan kebijakan pelayanan, penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan dan

perlibatan masyarakat dalam kontrol pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Untuk pengembangan manajemen pelayanan publik, peningkatan pengembangan partisipasi, pengembangan sistem informasi penduduk sesuai dengan amanat RPJMD perlu dicapai sesuai agenda yang ditetapkan.

7. Pemuda dan Olahraga

Salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat di Kabupaten Luwu adalah pembangunan bidang pemuda dan olah raga melalui pendidikan, pemberdayaan dan prestasi olah raga. Berbagai kemajuan yang telah dicapai di bidang kepemudaan seperti menurunnya angka Putus Sekolah (APtS) pemuda, yaitu APtS penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2009 sebesar 1,05 persen menurun menjadi 0,83 persen pada tahun 2012; Meningkatnya program peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan antara lain Paskibraka, Pramuka, Siswa/Osis; Percepatan/Akselerasi program sekolah sehat, pada TP UKS, UKS SD/MI, UKS SMP/MTs/UKS SMA/MA/K, UKS PONPES dan UKS PAUD; Meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam membangun Desa/Kelurahan.

Untuk pembangunan di bidang olahraga, kemajuan yang telah dicapai antara lain tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan; Meningkatnya program pemasyarakatan olahraga; Meningkatnya program sarana dan prasarana olahraga. Kemajuan yang telah dicapai perlu terus ditingkatkan mengingat tantangan pada era globalisasi semakin kompleks dimana penyalagunaan narkoba dan penyebaran HIV AIDS akan menjadi rintangan berat bagi pemuda.

8. Pemberdayaan Perempuan

Komitmen dan kompetensi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pembangunan berbasis gender telah berkembang secara bertahap sejak dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Tim pokja Gender di Kabupaten Luwu. Data perempuan berhadapan dengan hukum dan telah diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Luwu pada tahun 2012 sebanyak 17 orang,

meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 6 orang, sementara untuk data anak berhadapan dengan hukum dan telah diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Luwu pada tahun 2012 sebanyak 58 orang, juga meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 53 orang.

Dengan memperhatikan indikator tersebut di atas maka diperlukan perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi pembangunan berbasis gender perlu terus diperhatikan dengan mengedepankan rumusan strategi pengarusutamaan gender mencakup antara lain :

1. Kesetaraan Gender Dalam Perluasan dan Pemerataan Akses Pembangunan

Pembentukan Forum komunikasi dalam rangka bertukar informasi dan gagasan tentang pengalaman masing-masing sebagai best practice (kisah sukses) di tingkat kabupaten melalui kerjasama dengan LSM dan organisasi perempuan untuk memberikan fasilitasi bagi keluarga miskin/orang tua sehingga anak-anak mereka mempunyai hak yang sama dalam proses pembangunan; Memperluas informasi tentang kesetaraan dan keadilan gender kepada semua lapisan masyarakat dan meningkatkan program advokasi dan program lainnya melalui pengembangan komunikasi informasi dan edukasi dalam perspektif gender; Meningkatkan proses sosialisasi program PUG dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pejabat di tingkat kabupaten dalam rangka membangun komitmen di antara para penentu kebijakan dalam pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program berbasis gender; dan Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung lainnya.

2. Kesetaraan Gender dalam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembangunan.

Mengembangkan PSW untuk memperluas wilayah kerja hingga tingkat Kecamatan dalam menghadapi permasalahan gender sebagai partner pemerintah di dalam mengatur pembangunan berwawasan

gender termasuk mengelola berbagai studi kasus permasalahan gender dalam bidang pembangunan; Pemanfaatan sistem informasi dan pendataan pembangunan berdasarkan gender secara intensif dan menganalisis data untuk mengetahui perencanaan dan kinerja pembangunan berwawasan gender di tingkat kabupaten dalam rangka memformulasikan kebijakan dan pembangunan dalam perspektif gender; Mengadakan analisis kebijakan di dalam melihat bias gender baik dalam PERDA, maupun melalui berbagai macam studi mengenai pembangunan yang menyebabkan tidak responsif gender, dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil temuan dan melakukan Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, termasuk didalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3. Kesetaraan gender dalam Peningkatan Tatakelola dan Akuntabilitas Pembangunan

Meningkatkan pembangunan dalam perspektif gender bagi keluarga miskin dan pada wilayah perdesaan dan perkotaan tertentu; Meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan dalam rangka implementasi bagi keluarga miskin dalam perspektif gender; Mengembangkan sistem informasi berkesinambungan dan proses pendataan untuk menjamin jangkauan yang cukup terhadap permasalahan kesetaraan gender, termasuk melengkapi pemetaan dan peningkatan pendataan pada keluarga miskin; Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang peduli terhadap Kesetaraan gender.

9. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, bersama dan terintegrasi pada seluruh bidang dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar manusia. Kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi.

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar secara umum berkaitan dengan kurangnya kepemilikan aset terutama tanah dan modal; terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat; lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial; serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu meliputi lima garis besar kegiatan pokok yakni ; Penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah; Bantuan kebutuhan dasar rumah tangga miskin; Penanganan fakir-miskin dan anak terlantar; Sosialisasi pemantauan, pengendalian, dan pendistribusian/penyaluran beras untuk keluarga miskin; Monitiring dan evaluasi. Kelima kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan sasaran jumlah rumah tangga miskin lima terkecil di Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan. Dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka ditingkat kabupaten telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 476 / IX / 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu ditinjau dari sisi indikator tingkat kemiskinan, pada tahun 2009 persentase tingkat penduduk miskin Kabupaten Luwu adalah 16,96 persen, menurun lagi menjadi 15,43 persen pada tahun 2010, menurun menjadi 13,93 persen

pada tahun 2011 dan selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 13,33 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2009 – 2012 mengalami penurunan rata – rata 0,91 persen.

Sementara untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada tahun 2009 sebesar 55.200 jiwa, menurun menjadi 51.400 jiwa pada tahun 2010, menurun menjadi 46.903 jiwa pada tahun 2011, dan selanjutnya menurun menjadi 45.200 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 338.609 jiwa pada tahun 2012.

Untuk persentase dan jumlah penduduk miskin tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Gambar 12. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009 – 2012



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu Tahun 2012

Poverty Gap Index/Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan suatu daerah, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan *Poverty Severity Indeks/Indeks keparahan kemiskinan (P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, yaitu semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin suatu daerah.

Tabel 2.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2012

No	Uraian	Tahun				Ket.
		2009	2010	2011	2012	
1	P1	3,62	2,36	1,86	1,99	
2	P2	1,32	0,62	0,42	0,48	

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2012

Dari tabel tersebut diatas, nilai Indeks Kedalaman kemiskinan (**P1**) Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2009 indeks P1 sebesar 3,63 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 2,36 pada tahun 2010, menurun lagi menjadi 1,86 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1,99, menurunnya angka P1 pada periode 2009 – 2011 tentunya dipengaruhi oleh adanya upaya pengidentifikasian karakteristik penduduk miskin serta penyaluran bantuan tepat sasaran sehingga rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan kemiskinan (**P2**) mengalami peningkatan menjadi 0,48 persen pada tahun 2012, dimana pada tahun 2009 sebesar 1,32 persen, menurun menjadi 0,62 persen pada tahun 2010 dan selanjutnya menurun lagi pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,42 persen, peningkatan indeks P2 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin melebar pada tahun 2012.

C. Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan

1. Pertanian dan Kehutanan

Dalam sektor pertanian ada dua komponen dasar yang memegang peranan penting yakni petani dan lahan pertanian. Sebagai penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu yang mencapai nilai 49,71 persen menunjukkan keberhasilan pada komponen dasar pertanian. Dalam rangka mendukung surplus satu juta

ton beras Nasional, Pemerintah Kabupaten Luwu terus mengadakan program kegiatan yang dapat mencapai nilai tersebut dengan mengadakan mekanisasi pertanian seperti penerapan teknologi pertanian.

Peningkatan hasil produksi dan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan melalui pemberdayaan penyuluh, peningkatan pengelolaan lahan dan air, pengembangan tanaman hortikultura, Pengembangan agrobisnis, Peningkatan produksi perkebunan (gernas kakao) dan peningkatan pemasaran hasil produksi terus dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Luwu.

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar yang terus meningkat. Secara umum produktifitas komoditi utama pangan mengalami kenaikan, (Tabel 8).

Tabel 2.8. Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2009-2012 (ton)

No	Komoditi	2009	2010	2011	2012
1	Padi	408.861,22	330.392,29	195.360,13	423.005,00
2	Jagung	8.971,95	9.263,62	17.416,64	15.213,08
3	Kedelei	1.293,50	243,27	1.169,53	577,66
4	Kacang Tanah	216,15	260,75	301,07	130,64
5	Kacang Hijau	200,75	252	376,11	185,47
6	Ubi Kayu	3.718,48	4.445,70	7.081,72	5.211,69
7	Ubi Jalar	2.865,14	3.115,88	3.445,32	2.985,86

Sumber : Dinas tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Kab. Luwu Tahun 2012

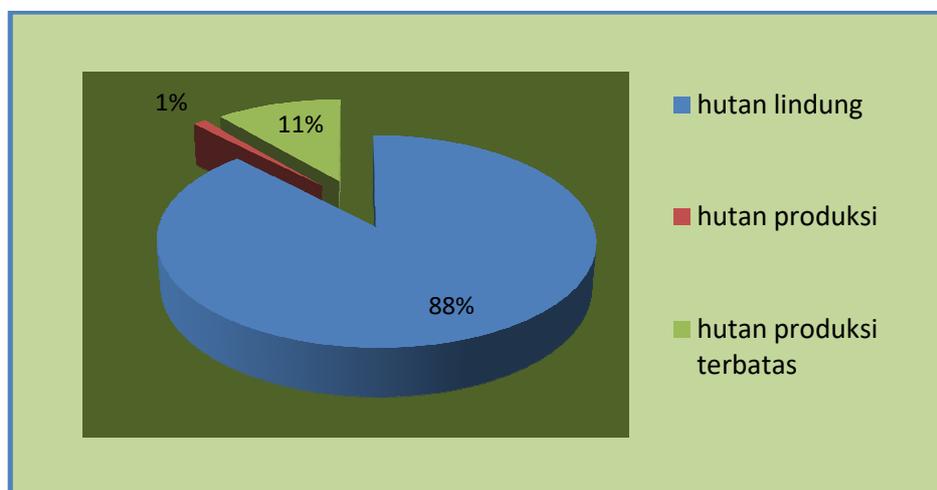
Produksi pertanian dikembangkan kearah peningkatan nilai tambah produknya dengan melangkah ke agroprosesing dan agroindustri. Pengembangan industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat untuk peningkatan kualitas perekonomian Kabupaten Luwu, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani,

pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Kemudian dilakukan pula pengembangan kawasan / sentra produksi pertanian organik khusus diterapkan pada komoditi tanaman pangan terutama padi dan komoditi hortikultura.

Produk hortikultura di Kabuapten Luwu relatif rendah dimana sayur - sayuran lebih banyak didatangkan dari daerah lain sementara luas lahan yang belum tergarap di Kabupaten Luwu mencapai 26.653 ha. Potensi ini akan lebih maksimal jika di kelola untuk lahan pertanian hortikultura minimal untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan pengembangan kawasan pertanian hortikultura organik di daerah pegunungan.

Berdasarkan data BPS Kabuapten Luwu tahun 2012 luas kawasan hutan sekitar 199.339,67 ha yang terdiri atas kawasan hutan lindung tercatat seluas 175.143,30 Ha, hutan produksi terbatas seluas 2.191,54 Ha, dan hutan produksi tetap 22.004,83 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut terdapat lahan kritis di kawasan hutan dan luar kawasan hutan sekitar 128.244 Ha dengan rincian 63.907 Ha lahan kritis dalam kawasan hutan dan 64.337 Ha di luarkawasan hutan.

Gambar 13. Persentase Luas kawasan hutan Kabupaten Luwu Tahun 2012



sumber: BPS Kab.Luwu 2012

Memperhatikan kondisi tersebut Perencanaan dan pengembangan hutan diarahkan ke peningkatan SDM pengelola hutan produksi, peningkatan partisipasi masyarakat yang bermukim di

perbatasan wilayah hutan lindung, Rehabiltasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan serta dengan melaksanakan peningkatan pengawasan perizinan dan peredaran hasil hutan.

2. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemakaian energi di Kabupaten Luwu tahun 2012 pada umumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 205.024.000 liter, Pemakaian sumber energi yang didominasi oleh BBM Maka diperlukan beberapa terobosan diantaranya penggunaan sumber energi terbarukan seperti penggunaan energi tenaga air, bio massa, energi matahari, energi ombak dan energi alternatif lainnya. Upaya fasilitasi pembuatan energi terbarukan melalui teknologi dan sistem yang dapat dilakukan oleh industri pada skala rumah tangga, atau skala kecil.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu tercatat sebesar 0,80 persen sangat kurang jika dibandingkan dengan sektor lain. Produksi pertambangan masih dikelola secara sederhana seperti hasil tambang berupa pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Jenis produk hasil galian dari produksi tertinggi secara berurutan adalah pasir, sirtu dan batu kali/batu gunung dengan produksi sebesar 83.160 m³, 78.480 m³, dan 52.920 m³.

3. Perikanan dan Kelautan

Salah satu andalan masa depan Kabupaten Luwu untuk mendukung sektor ekonomi adalah sub sektor Kelautan dan Perikanan, karena sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sebagai pemasok kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Pertimbangan ini didasarkan pada panjang pantai Kabupaten Luwu yang mencapai 72 mil dengan luas kawasan budidaya tambak mencapai 10.041,41 ha. Untuk pengembangan perikanan budidaya dapat dikembangkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar.

Komoditi yang menjadi unggulan dari perikanan dan kelautan, adalah rumput laut dan ikan bandeng produksi masing-masing pada

tahun 2012 sebesar 235.260,95 ton dan 5.545 ton. Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan kedepan diarahkan pada peningkatan sistem penyuluhan, pengolahan, pembinaan mutu, dan pemasaran hasil perikanan; Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan yang terpenting adalah peningkatan SDM perikanan dan kelautan.

Persoalan perikanan dan kelautan yang masih dihadapi di Kabupaten Luwu adalah masih adanya sejumlah masyarakat yang menggunakan jalan pintas dengan illegal fishing dan pengerusakan hutan mangrove untuk perluasan tambak, penanganan persoalan ini diperlukan terobosan program yang bertujuan dengan merubah pola pikir masyarakat pesisir dalam mengelolah sumber daya perikanan dan kelautan secara bijaksana dan berkelanjutan.

4. Perdagangan dan Industri

Perkembangan kegiatan perdagangan di Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya perkembangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perkembangan pembangunan pasar semi modern dan pasar Desa, perlindungan konsumen atas barang dan jasa. Perkembangan pemberian izin usaha perdagangan di Kabupaten Luwu Sampai pada akhir 2012 jumlah perusahaan perdagangan yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mencapai 100 perusahaan, yang terdiri dari 0 perusahaan perdagangan kecil, 82 perusahaan perdagangan menengah, dan 18 perusahaan besar. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat 31 perusahaan besar dan 84 perusahaan menengah dan 7 perusahaan perdagangan kecil.

Bila dilihat pemberian SIUP tersebut menurut jenisnya ternyata perkembangan distribusi barang ditekankan pada distribusi 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama masyarakat secara umum, seperti; beras, minuman dan dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. Barang-barang

daerah lain di Indonesia, maupun dari luar negeri. Sedangkan jenis barang kebutuhan lainnya umumnya merupakan peralatan mesin dan

elektronik untuk kebutuhan rumah tangga yang umumnya di datangkan dari Makassar.

Kegiatan Industri di Kabupaten Luwu perlu terus dikembangkan utamanya industri yang mendukung sektor pertanian dengan mengedepankan pengolahan industri kecil menengah yang tepat guna serta peningkatan kemampuan penguasaan teknologi industri. Dengan adanya perkembangan sektor industri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Seperti pada data Peningkatan jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produksi. Angka nilai produksi industri tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 87.159 juta rupiah pada tahun 2012 dari angka 76.095 juta rupiah pada tahun 2011.

Kondisi industri di Kabupaten Luwu tahun 2012 yang jika dilihat sisi jumlah industri yang kegiatannya di Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) semakin meningkat. Jumlahnya meningkat sekitar 7,20 persen yaitu dari 500 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 536 perusahaan tahun 2012. Demikian juga halnya perusahaan industri yang melakukan kegiatannya pada pengolahan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) meningkat tapi tidak signifikan yaitu sekitar 4,03 persen yaitu dari 602 perusahaan tahun 2011 menjadi 645 perusahaan tahun 2012.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Visi RPJPN 2005 – 2025 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur dimana salah satu misi guna mewujudkan visi RPJPN 2005-2025 Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

Daya saing adalah kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan regional serta nasional. Untuk mensinergikan dengan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2014-2019 diperlukan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya alam (SDA), serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kemampuan perekonomian daerah dapat ditinjau dari PDRB perkapita dimana PDRB perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2012 mencapai Rp. 14.856.356,30,- , Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Luwu relatif lebih rendah dimana PDRB pendapatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 19.465.540,37,-

Untuk mengejar ketertinggalan PDRB pendapatan penduduk Kabupaten Luwu maka perlu dilakukan upaya percepatan perluasan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang tersedia serta melihat dinamika global yang terjadi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Arah pembangunan juga diharapkan mampu menjadi stimulan yang mampu menciptakan *multiplier-effect* dan tidak bersifat konsumtif.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah keuangan daerah dan Anggaran daerah. Anggaran daerah atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan daerah yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah harusnya dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan menjadi ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat kontrol dan koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Secara spesifik Pengelolaan Keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incremental menjadi APBD yang berbasis kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan dan sasarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasil.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD yang dimulai awal Januari tahun berikutnya.

APBD merupakan instrument yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administrative dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, adalah diuraikan seperti berikut.

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran

(*budget*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

3.1.1. Pendapatan Daerah

APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber - sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktifitas dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing, prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi ke depan.

Belanja daerah APBD, secara makro dilandasi atas pemahaman efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009-2013. Dengan asumsi dan kondisi tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan, pada :

- a. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan Analisis Standar Belanja dan standar harga serta

intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya maupun masyarakat;

- d. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah direncanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu terdiri atas tiga komponen yaitu *pertama*, Pendapatan Asli Daerah (PAD); *kedua*, Dana Perimbangan dan *ketiga*, Lain - Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu terdiri atas tiga komponen yaitu *pertama*, Pendapatan Asli Daerah (PAD); *kedua*, Dana Perimbangan dan *ketiga*, LainLain Pendapatan Yang Sah. Jumlah masing - masing komponen dari Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini

Tabel 3.1. Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kabupaten Luwu Tahun 2009–2013

Tahun	Jenis Pendapatan (Rp)			Total Pendapatan (Rp)
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
2009	19.337.923.976,93	431.631.277.192,00	20.253.831.588,50	471.223.032.757,093
2010	17.930.679.544,81	466.315.280.097,80	65.871.050.894,00	550.117.010.536,61
2011	18.318.366.436,00	639.046.821.638,03	16.163.516.708,00	673.528.704.782,03
2012	29.322.233.932,36	639.759.165.734,49	18.378.089.681,00	687.459.489.347,85
2013	33.623.004.017,24	725.628.861.567,27	20.923.317.235,00	780.139.631.464,01

Sumber Data : *Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013*

Berdasarkan Tabel 3.1. diatas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Luwu masih sangat tergantung pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara untuk pendapatan asli daerah sendiri belum dapat menunjang pendapatan daerah, sehingga untuk selanjutnya pemerintah Kabupaten Luwu

diharapkan dapat mengelolah secara maksimal sumber-sumber dan aset pendapatan daerah yang dimiliki agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

3.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas.

Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomiannya daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu, seperti halnya daerah lain, bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau dari BUMD dan Lain- Lain. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Luwu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembuatan peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendataan obyek pajak, retribusi, PBB dan penerimaan lain-lain.
- 2). Penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu untuk tahun 2011-2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010 yang tingkat

pertumbuhan mengalami penurunan dimana pada tahun 2009 nilai PAD Kabupaten Luwu secara keseluruhan berjumlah Rp. 19.337.923.976,93 namun pada tahun 2010 menurun senilai Rp. 1.407.244.432,12 atau sekitar 7,2 persen hal ini dapat kita lihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kab.Luwu Tahun 2009 - 2013

No	Jenis P A D	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp)
1	Pajak daerah	3.889.529.966,00	2.575.633.387,00	4.529.004.191,00	5.962.461.964,00	7.421.384.015,74
2	Retribusi Daerah	7.370.347.818,00	8.173.469.527,00	6.341.672.334,00	9.695.008.388,25	14.963.335.893,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.814.333.071,87	2.126.450.445,83	2.552.517.616,00	2.813.724.224,03	2.985.829.629,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.263.713.121,06	5.055.126.184,98	4.895.172.295,00	10.851.039.356,08	8.216.903.122,00
	J u m l a h	19.337.923.976,93	17.930.679.544,81	18.318.366.436,00	29.322.233.932,36	33.587.452.659,74

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

3.1.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah serta menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah. Kebijakan pemerintah di bidang perimbangan keuangan daerah diarahkan pada penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran bagi hasil, terutama yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), penyempurnaan formula Dana Alokasi Umum (DAU), peningkatan peran Dana Alokasi Khusus (DAK) secara selektif dan bertahap dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD untuk mencapai tujuan komitmen nasional. Rincian Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Luwu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Perkembangan Realisasi Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2013

No	Pendapatan Transfer	2009	2010	2011	2012	2013
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	422.559.720.624	446.225.577.774	480.929.930.812,00	556.600.330.583,00	625.469.748.581,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak	21.509.011.511	28.184.690	24.924.326.077,00	25.033.153.532,00	22.122.472.273,00
-	Dana Bagi Hasil SDA	989.831.113	889.913.005	1.934.407.735,00	1.465.664.051,00	1.538.868.308,00
-	Dana Alokasi Umum	338.393.478.000	366.703.274.200	396.747.997.000,00	475.295.053.000,00	542.118.008.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	61.667.400,000	50.447.700.000	57.323.200.000,00	54.806.460.000,00	59.690.400.000,00

2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	7.551.000.000	142.001.558.560,00	65.139.570.000,00	0
-	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
-	Dana Penyesuaian	0	7.551.000.000	142.001.558.560,00	65.139.570.000,00	79.074.141.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	9.071.556.568,00	12.538.702.323,80	16.115.332.266,03	18.019.265.151,49	0
-	Bagi Hasil Pajak	9.071.556.568,00	12.538.702.323,80	16.115.332.266,03	18.019.265.151,49	21.084.971.988,27
-	Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0
	J u m l a h	431.631.277.192,00	466.315.280.097,80	639.046.821.638,03	639.759.165.734,49	725.628.861.569,27

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Realisasi Dana Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dana Pendapatan Transfer tahun 2010 sebesar 8,03 Persen dari Tahun 2009 yang sebesar Rp. 431.631.277.192,00. Dana Pendapatan Transfer tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 172.731.541.541,00 atau 37,04 % dari Dana Pendapatan Transfer tahun 2010. Dana Pendapatan Transfer tahun 2012 sebesar Rp. 639.759.165.734,49 mengalami peningkatan sebesar 01,1 persen dari Dana Pendapatan Transfer tahun 2011. Untuk tahun 2013 dimana data yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 Realisasi Dana Pendapatan Transfer tahun adalah sebesar Rp. 367.525.062.602,03 atau 47,48 % dari rencana anggaran sebesar Rp. 773.533.208.700,00

3.1.4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang diterima pemerintah Kabupaten Luwu terdiri atas Dana Hibah, Dana Darurat, Bantuan Keuangan dan pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat , Provinsi maupun pihak lainnya. Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pda tabel 12 berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2013

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2009	2010	2011	2012	2013
1	Hibah	250.367.000,00	0	0	157.445.000,00	1.052.702.155,00
2	Dana Darurat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	18.278.883.152,00	13.903.683.000,00	15.163.286.456,00	17.466.480.120,00	0
4	Pendapatan lainnya	1.674.581.436,50	51.917.367.894,00	1.000.230.252,00	754.164.561,00	19.970.615.080,00
	J u m l a h	20.253.831.588,50	65.871.050.894,00	16.163.516.708,00	18.378.089.681,00	20.923.317.235,00

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik, dengan demikian secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program kegiatan yang dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan dan pembangunan diberbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis-jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi yang akan datang.

3.2.1. Belanja Daerah (Proporsi Penggunaan Anggaran)

Pengklasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait dengan metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang mulai diterapkan dalam era otonomi daerah merupakan manifestasi untuk meningkatkan dan mempercepat efektivitas proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran daripada menitikberatkan alokasi biaya atau input semata dan mengabaikan keluaran yang akan dicapai. **Output** (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. **Input** (masukan) adalah besarnya

sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Proporsi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel - tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2013

No	Jenis Belanja Tidak Langsung	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
1	Belanja Pegawai	219.167.599.125	284.911.762.155	316.677.543.120	360.145.043.499	390.201.863.379
2	Bunga	0	0	0	0	0
3	Subsidi	0	0	0	0	0
4	Hibah	1.844.632.000	3.020.000.000	5.332.132.000	5.679.500.000	27.073.723.561
5	Bantuan Sosial	12.174.372.997	13.900.300.000	13.969.928.688	205.500.000	1.520.750.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	26.777.825.106	0	0	0
7	Bantuan Keuangan	26.159.494.425	0	26.929.274.638	29.392.987.602	30.311.650.570
8	Belanja Tak Terduga	549.660.000	291.405.600	642.174.100	269.792.984	0
J u m l a h		259.895.758.547	328.901.292.861	363.551.052.546	395.692.824.085	449.107.987.510

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2013

No	Jenis Belanja Langsung	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Belanja Pegawai	17.670.734.429	18.193.002.600	19.675.427.399	27.577.947.628	32.816.219.995
2.	Belanja Barang & Jasa	77.173.854.333	81.874.818.833	124.977.090.047	124.436.967.597	154.200.037.833
3.	Belanja Modal	108.499.836.233	109.954.046.445	161.544.847.302	109.452.567.904	151.449.669.920
J u m l a h		203.344.424.995	210.021.867.878	306.197.364.748	261.467.483.129	338.465.927.708

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

Berdasarkan tabel 13 dan 14 dapat dilihat bahwa jumlah belanja tidak langsung Kabupaten Luwu lebih besar jika dibanding dengan jumlah belanja langsung, berdasarkan elemen pembentuk belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2009 hingga tahun 2013 penggunaan anggaran untuk aparatur daerah /belanja pegawai jauh lebih besar jika dibandingkan belanja tidak langsung lainnya seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tak terduga, hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan gaji dan peningkatan jumlah pegawai.

3.2.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defesit yang terjadi, namun jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pada masa yang akan datang. Analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2009 – tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan belanja, surplus yang terjadi pada tahun 2009 senilai Rp. 7.982.849.215,43 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 11.193.849.797,61, tahun 2011 surplus lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp. 3.708.287.488,03 untuk tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai Rp. 30.299.182.133,19, namun untuk tahun 2013 pemerintah Kabupaten Luwu mengalami defesit anggaran senilai (Rp. 7.434.283.753,99). Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009–2013

No	JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN DAERAH						
1.	Pendapatan Asli Daerah	19.337.923.976,93	17.930.679.544,81	18.318.366.436,00	29.322.233.932,36	33.587.452.659,00
2.	Dana Perimbangan	431.631.277.192,00	466.315.280.097,80	639.046.821.638,03	639.759.165.734,49	725.628.861.569,27
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	20.253.831.588,50	65.871.050.894,00	16.163.516.708,00	18.378.089.681,00	20.923.317.235,00
	Jumlah Pendapatan	471.223.032.757,43	550.117.010.536,61	673.528.704.782,03	687.459.489.347,85	780.139.631.464,01
BELANJA DAERAH						
1.	Belanja Tidak Langsung	259.895.758.547	328.901.292.861,00	363.551.052.546,00	395.692.824.085	449.107.987.510,00
2.	Belanja Langsung	203.344.424.995	210.021.867.878,00	306.197.364.748,00	261.467.483.129	338.465.927.708,00
	Jumlah Belanja	463.240.183.542,00	538.923.160.739,00	669.748.417.294,00	657.160.307.214,00	787.573.915.218,00
	Surplus/(Defisit)	7.982.849.215,43	11.193.849.797,61	3.780.287.488,03	30.299.182.133,19	(7.434.283.753,99)
PEMBIAYAAN DAERAH						
1.	Penerimaan Pembiayaan	23.649.708.335,93	27.312.354.032,55	37.647.482.705,16	39.177.325.181,19	63.534.442.808,04
2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.963.536.506,81	1.362.541.255,00	2.654.840.355,00	5.306.388.385,00	1.305.884.250,00
	Pembiayaan Neto	19.686.171.829,12	25.949.812.777,55	34.992.642.350,16	33.807.760.651,19	62.285.139.305,54
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	27.669.021.044,55	37.143.662.575,16	38.772.929.838,19	64.170.118.930,04	54.850.855.551,55

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu dalam periode 2009 – 2013 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

3.3.1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2019 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan pembiayaan. Analisis keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan dan untuk mengetahui pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta pengeluaran prioritas utama daerah, belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah

pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor atau belanja jasa lainnya sedangkan pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah seperti tenaga pendidikan dan kesehatan serta belanja jenis lainnya, dengan menganalisis jumlah kebutuhan dana yang harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik berdasarkan peraturan ataupun dikarenakan perjanjian maka akan membatasi pengeluaran dana yang akan digunakan untuk tujuan lain yang tidak terikat.

3.3.1.1. Penerimaan Pendapatan

Perubahan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-undang Tahun 2009, dengan mengizinkan pengenaan tarif pajak progresif sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Luwu . Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 2009 - 2013, tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu sebesar 15,87 % dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang paling besar memberikan kontribusi adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dimana tingkat pertumbuhannya mencapai 48,63 %, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,27% dan untuk lain-lain pendapatan yang sah rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 41,26 %, sebagaimana pada table berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2009–2013

NO	URAIAN JENIS PENERIMAAN	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Per Tumbuhan
1	PAD	19.337.923.976,93	17.930.679.544,81	18.318.366.436,00	29.322.233.932,25	33.587.452.659,74	15,87
2	DanaTransfer Pemerintah-Perimbangan	431.631.277.192,00	466.315.280.097,80	639.046.821.638,00	639.759.165.734,49	725.628.861.569,27	12,27
3	Lain-lain pendapatan daerahyang sah	20.253.831.588,50	65.871.050.894,00	16.163.516.708,00	18.378.089.681,00	20.923.317.235,00	41,26

Sumber Data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

Untuk mengetahui kapasitas riil terhadap kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan proyeksi terhadap kemampuan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang, berdasarkan tabel berikut dapat dilihat kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun 2014-2019.

Tabel 3.9. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dari Tahun 2014 – 2019

NO	URAIAN JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.403.783.200	32.188.877.780	32.993.599.725	33.818.439.718	34.663.900.711	35.530.498.228
1	Pajak Daerah	8.735.000.000	8.953.375.000	9.177.209.375	9.406.639.609	9.641.805.599	9.882.850.739
2	Retribusi Daerah	16.379.153.200	16.788.632.030	17.208.347.831,00	17.638.556.527	18.079.520.440	18.531.508.451
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.800.000.000	2.870.000.000	2.941.750.000	3.015.293.750	3.090.676.094	3.167.942.996
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.489.630.000	3.576.870.750	3.666.292.519	3.757.949.832	3.851.898.578	3.948.196.042
B	Dana Transfer Perimbangan	676.632.777.500	693.548.596.938	710.887.311.862	728.659.494.659	746.875.982.025	765.547.881.576
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.923.307.500	13.246.390.188	13.577.549.943	13.916.988.692	14.264.913.409	14.621.536.244
2	Dana Alokasi Umum	595.699.150.000	610.591.628.750	625.856.419.469	641.502.829.956	657.540.400.705	673.978.910.723
3	Dana Alokasi Khusus	68.010.320.000	69.710.578.000	71.453.342.450	73.239.676.011	75.070.667.911	76.947.434.609

C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	142.304.805.000	145.862.425.125	149.508.985.753	153.346.710.397	157.180.378.157	161.109.887.612
1	Pendapatan Hibah	1.154.450.000	1.183.311.250	1.212.894.031	1.243.216.382	1.274.296.792	1.306.154.212
2	Pendapatan Dana Darurat						
3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi & Dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.600.000.000	21.115.000.000	21.642.875.000	22.183.946.875	22.738.545.547	23.307.009.186
4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	102.960.956.000	105.534.979.900	108.173.354.398	110.977.688.258	113.752.130.464	116.595.933.726
5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	17.589.399.000	18.029.133.975	18.479.862.324	18.941.858.882	19.415.405.354	19.900.790.488
Total (A+B+C)		850.341.365.700	871.599.899.843	893.389.897.340	915.824.644.774	938.720.260.893	962.188.267.416

Sumber Data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

3.3.1.2. Prakiraan Kapasitas Pendanaan

Berdasarkan data pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di masa lalu maka kita dapat menganalisis kapasitas riil keuangan dimasa yang akan datang dimana total penerimaan daerah yang telah disusun dalam 5 tahun kedepan dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk mengetahui proyeksi keuangan 5 tahun kedepan maka terlebih dahulu kita menyusun pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Luwu tahun 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel 3.10. Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung Periodik Yang Wajib dan Mengikat Setra Prioritas Utama, Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Kab. Luwu Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Belanja Tidak Langsung	524.946.216.957	536.069.872.381	549.471.618.918	563.208.409.390	577.288.601.625	591.720.816.664
1	Belanja Pegawai	482.216.657.569	492.272.074.008	504.578.875.858	517.193.347.754	530.123.181.448	543.376.260.984
2	Belanja Hibah	2.816.500.000	2.886.912.500	2.959.085.313	3.033.062.446	3.108.889.007	3.186.611.232
3	Belanja Bantuan Sosial	1.856.750.000	1.903.168.750	1.950.747.696	1.999.516.388	2.049.504.298	2.100.741.905
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	2.270.607.700	2.327.372.893	2.385.557.215	2.445.196.145	2.506.326.049	2.568.984.200
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	30.785.701.688	31.555.344.230	32.344.227.836	33.152.833.532	33.981.654.370	34.831.195.729
6	Belanja Tidak terduga	5.000.000.000	5.125.000.000	5.253.125.000	5.384.453.125	5.519.046.453	5.657.022.614
B	Belanja Langsung	360.205.317.780	369.210.450.725	378.440.711.992	387.901.729.792	397.599.273.036	407.539.254.862
1	Belanja Pegawai	18.169.699.800	18.623.942.295	19.089.540.852	19.566.779.373	20.055.948.857	20.557.347.578
2	Belanja Barang dan Jasa	183.276.045.630	187.857.946.771	192.554.395.440	197.368.255.326	202.302.461.709	207.360.023.252
3	Belanja Modal	158.759.572.350	162.728.561.659	166.796.775.700	170.966.695.093	175.240.862.470	179.621.884.032

C	Pembiayaan Pengeluaran	5.000.000.000	5.125.000.000	5.253.125.000	5.384.453.125	5.519.046.453	5.657.022.614
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000	5.125.000.000	5.253.125.000	5.384.453.125	5.519.046.453	5.657.022.614
3	Pembayaran Pokok Utang						
Total (A+B+C)		890.151.534.737	910.405.323.106	933.165.455.910	956.494.592.307	980.406.921.114	999.260.071.542

Sumber data : *Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013*

Pada awal tahun 2014 tersedia SILPA sebesar Rp. 39.810.169.037,- sehingga kapasitas rill keuangan daerah pada tahun 2014 mencapai jumlah Rp 427.558.583.747,42, namun untuk tahun 2015 diperkirakan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu akan mengalami penurunan sekitar 2,16 % jika dibanding dengan tahun 2014, walaupun untuk tahun 2014 - 2018 kapasitas rill kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu akan mengalami kenaikan.

Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dari Tahun 2014 – 2019

NO	URAIAN JENIS PENERIMAAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.403.783.200	38.576.996.411,56	41.071.768.287,47	43.566.540.163,39	46.061.312.039,30	
1	Pajak Daerah	8.735.000.000	8.163.522.417,31	8.534.591.618,10	8.905.660.818,89	9.276.730.019,68	
2	Retribusi Daerah	16.379.153.200	18.000.893.079,28	19.519.671.672,42	21.038.450.265,56	22.557.228.858,70	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.800.000.000	3.373.987.480,77	3.568.066.406,66	3.762.145.332,54	3.956.224.258,43	
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.489.630.000	9.038.593.434,20	9.449.438.590,30	9.860.283.746,40	10.271.128.902,50	
B	Dana Transfer Perimbangan	799.153.144.203,03	872.677.426.836,80	946.201.709.470,56	1.019.725.992.104,32	1.093.250.274.748,09	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	23.228.595.886,65	24.334.719.500,30	25.440.843.113,95	26.546.966.727,60	27.653.090.341,25	
2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.577.340.015,70	1.615.811.723,40	1.654.283.431,10	1.692.755.138,80	1.731.226.846,50	
3	Dana Alokasi Umum	603.648.401.908,00	665.178.795.816,00	726.709.189.724,00	788.239.583.632,00	849.769.977.540,00	

4	Dana Alokasi Khusus	61.182.660.000,00	62.674.920.000,00	64.167.180.000,00	65.659.440.000,00	67.151.700.000,00	
5	Dana Penyesuaian	87.376.925.805,00	95.679.710.610,00	103.982.495.415,00	112.285.280.220,00	120.588.065.025,00	
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.139.220.587,68	23.193.469.187,10	24.247.717.786,51	25.301.966.385,92	26.356.214.985,34	
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21.969.483.096,75	23.015.648.958,50	24.061.814.820,25	25.107.980.682,00	26.154.146.543,75	
1	Pendapatan Hibah	1.105.337.262,75	1.157.972.370,50	1.210.607.478,25	1.263.242.586,00	1.315.877.693,75	
2	Pendapatan Dana Darurat						
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya						
4	Pendapatan Lainnya	20.864.145.834,00	21.857.676.588,00	22.851.207.432,00	23.844.738.096,00	24.838.268.850,00	
Total (A+B+C)		857.204.851.835,44	934.270.072.206,86	1.011.335.292.578,29	1.088.400.512.949,71	1.165.465.733.321,14	

Sumber Data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2013

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	476.661.304.873,26	531.423.773.781,51	586.186.242.689,77	640.948.711.598,03	695.711.180.506,29
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	440.850.065.245,59	491.498.267.112,19	542.146.468.978,78	592.794.670.845,38	643.442.872.711,97
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/KWDH	2.289.426.720,00	2.552.453.440,00	2.815.480.160,00	3.078.506.880,00	3.341.533.600,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	33.521.812.907,66	37.373.053.229,33	41.224.293.550,99	45.075.533.872,65	48.926.774.194,31
B	Belanja Langsung	45.615.366.246,00	50.856.005.773,99	56.096.645.301,99	61.337.284.829,99	66.577.924.357,98
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	920.408.517,00	1.026.152.034,00	1.131.895.551,00	1.237.639.068,00	1.343.382.585,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	514.059.000,00	573.118.000,00	632.177.000,00	691.236.000,00	750.295.000,00
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor, Listrik, Air Telepon dan Jenisnya)	44.180.898.729,00	49.256.735.739,99	54.332.572.750,99	59.408.409.761,99	64.484.246.772,98

4	Belanja Sewa Gedung Kantor	-	-	-	-	-
5	Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Yang telah ada kontrak jangka panjang)	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		522.276.671.119,25	582.279.779.555,51	642.282.887.991,76	702.285.996.428,01	762.289.104.864,27

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Pada dasarnya Isu-isu strategis adalah hal yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan suatu daerah. Karakteristik isu - isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak serta menentukan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu- isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang. Ini berarti bahwa, apabila isu – isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atau akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis mencakup berbagai aspek pembangunan daerah yang meliputi bidang agama dan budaya ekonomi, social dan fisik prasarana. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa yang lebih baik. Kesemua aspek ini akan dihadapi dan harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan kabupaten Luwu dimasa depan yang lebih baik dan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu untuk periode 2014 - 2019.

4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan internal dan eksternal merupakan bentuk dari *Scanning* lingkungan dalam rangka mengidentifikasi komponen – komponen yang dapat menjadi peluang dan tantangan disatu sisi dan kekuatan dan kelemahan pada sisi lain. Untuk hal tersebut maka perlu dilakukan identifikasi apa yang menjadi bagian dari aspek eksternal dan apa yang menjadi bagian dari aspek internal.

a. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal merupakan aspek yang berada di luar organisasi dalam hal ini Kabupaten Luwu. Kondisi ini terdiri dari aspek peluang

dan tantangan yang dapat menjadi penguatan atau melemahkan posisi Kabupaten Luwu.

1. *Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah*

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diwarnai dengan semakin mudahnya untuk melakukan akses dan hubungan antara berbagai pihak berkepentingan berkaitan dengan informasi pembangunan.

- Meningkatnya akses informasi membuka peluang yang besar bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah baik itu peningkatan transaksi ekonomi, kapasitas pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif serta peningkatan kapasitas pengetahuan sumber daya manusia.
- Inovasi – inovasi dibidang teknologi pada gilirannya akan memicu kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah yang lebih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah.
- Terobosan dibidang perhubungan khususnya pemanfaatan teknologi informasi semakin membuka peluang untuk pembaharuan diberbagai sektor pembangunan, mengingat arus informasi yang semakin baik dalam melakukan *updating* berbagai fungsi yang dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi

b. Globalisasi, diwarnai dengan semakin terbukanya arus transaksi ekonomi, barang maupun jasa baik dalam lingkup domestik, regional maupun internasional yang semakin tanpa batas, yang pada gilirannya memberi peluang bagi Kabupaten Luwu untuk semakin meningkatkan :

- Jaringan dan interaksi dalam perdagangan, investasi dan produksi terutama produksi pertanian yang menjadi potensi wilayah Kabupaten Luwu.
- Pembangunan dan akses melalui jalur perhubungan antar wilayah secara domestik, regional dan internasional dalam rangka mempermudah akses terhadap produk – produk unggulan Kabupaten Luwu

- Intensitas promosi baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional akan potensi – potensi pariwisata dengan meningkatkan kualitas pembangunan objek wisata alam yang pada gilirannya akan merangsang investasi , membuka lapangan kerja dan peningkatan sumber pendapatan daerah.
- c. Demokratisasi** yang ditandai oleh perkembangan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang lebih mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang pada gilirannya membuka peluang bagi Kabupaten Luwu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan yaitu :
- Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi pada pemenuhan hak – hak masyarakat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
 - Perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.;
 - Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
- d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**, berpeluang memberi kebebasan yang seluas – luasnya kepada daerah secara bertanggungjawab dalam berinisiatif, dan berinovasi dalam pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat;
- Dengan kewenangan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Luwu akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif

dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;

- Pemerintah Kabupaten Luwu akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

2. Identifikasi Analisis Tantangan Daerah

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Meningkatnya arus informasi melalui perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya dan tanpa batas juga mengikutsertakan berbagai konteks budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan nilai budaya lokal sehingga mempunyai kecenderungan adanya perubahan tata nilai yang berlaku di tanah luwu
- Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian meluas berdampak pada pemanfaatan teknologi pada sisi negatif seperti pada kejahatan dunia maya (*cyber crime*), potensi penyebaran isu – isu sara secara cepat yang dapat mengganggu stabilitas wilayah, penayangan dan penyampaian informasi yang pada umumnya bermuatan pornografi dan pornoaksi yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.
- Meningkatnya potensi transaksi – transaksi kejahatan seperti transaksi obat – obatan, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan teknologi untuk transaksi keuangan baik pada individu maupun terhadap lembaga – lembaga yang mengelola keuangan.

b. Globalisasi

- Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam termasuk laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya seperti hutan dan tambang secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan;
- Arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara regional maupun pasar internasional akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Luwu dalam menghadapi AFTA 2015;

- Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Luwu.

c. Demokratisasi

- Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
- Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;
- Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.

d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

- Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
- Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
- Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

b. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Daerah

- a. Komitmen kepemimpinan daerah, potensi kepemimpinan daerah yang mempunyai niat dan komitmen untuk menjalankan proses pembangunan secara berkesinambungan di Kabupaten Luwu.
- b. Potensi Sumber Daya Alam, Kabupaten Luwu memiliki wilayah yang

memiliki sumber daya alam yang potensial bagi upaya untuk memaksimal berbagai komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta wilayah yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi wilayah.

- c. Potensi wisata, Kabupaten Luwu memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan agrowisata dan wisata bahari.
- d. Lapangan terbang, Kabupaten Luwu memiliki lapangan terbang yang melayani angkutan domestik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan dan dapat menunjang potensi investasi.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Daerah

- a. Profesionalisme Aparatur; berkaitan dengan minimnya pemahaman aparatur atas tugas pokok yang harus dilaksanakan yang juga berkenaan *Standard Operational Procedure (SOP)*
- b. Kualitas pendidikan dan kesehatan; kualitas out put pendidikan dan proses pelayanan kesehatan berkaitan dengan minimnya kualitas tenaga pelaksana baik itu tenaga medis dan tenaga pendidik.
- c. Pembangunan perdesaan dan penataan kota; meningkatkan pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sekaligus memacu intensitas dalam membentuk pola sinergitas pembangunan antara wilayah dalam kabupaten.
- d. Kualitas infrastruktur dan tata wilayah; diarahkan pada memaksimal pengaturan tata ruang dan tata wilayah dengan berlandaskan pada tata aturan yang telah ditetapkan
- e. Kemandirian dan daya saing daerah; minimnya keberagaman lapangan usaha yang mengarah pada kewirausahaan mampu menyerap angkatan kerja menjadi kendala tersendiri pada potensi meningkatnya angka pengangguran.
- f. Keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; memaksimalkan penggunaan AMDAL dan ANDAL mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- g. Keamanan dan ketertiban masyarakat; wacana pemekaran wilayah, isu – isu SARA dan berbagai bentuk kejahatan dimasyarakat terkadang lambat untuk diantisipasi sehingga berkembang menjadi

tidak terkendali.

4.2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan atau selisih antara keinginan atau harapan terhadap hasil yang dikerjakan atau dengan kata lain proyeksi yang diinginkan dimasa lalu untuk saat ini terjadi perbedaan. Potensi permasalahan pembangunan di daerah pada umumnya timbul akibat dari adanya kekuatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan atau kekuatan yang belum dioptimalkan atau kelemahan yang tidak diatasi juga peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak teratasi.

4.2.1 Birokrasi

Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki alur perintah yang lebih cenderung bersifat komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif. Pada kondisi yang cenderung bersifat rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam uraian tugas atau lebih dikenal dengan tugas pokok dan fungsi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur yang ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan. Ada juga yang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Salah satu karakteristik birokrasi pada kondisi ideal adalah fungsi pelayanan publik yang terdiri atas orang - orang yang diangkat berdasarkan kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan dan pengujian sehingga diharapkan tercipta birokrasi yang professional dalam menjalankan tugas pelayanan yang pada gilirannya wajib memiliki kualifikasi kemampuan serta jenjang pendidikan formal yang mendukung tugas atau penempatan seorang orang yang menjalankan birokrasi.

Selain yang disebut diatas ada juga yang mengelompokkan empat fungsi birokrasi modern, ke empat fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.2.1. Administrasi

Fungsi administratif pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, artian administrasi secara lebih sempit diartikan pelaksanaan kebijaksanaan umum secara lebih teknis seperti pencatatan, pengarsipan dan sebagainya. Sedang dalam artian yang lebih luas berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, dengan mengsinergikan berbagai peran dalam institusi negara di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

4.1.2.2. Pelayanan

Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat baik itu diperuntukkan bagi masyarakat sebagai individu maupun masyarakat dalam konsep kelompok - kelompok, dimana pemenuhan itu baik dalam bentuk barang maupun jasa. Peran ini akan semakin nyata apabila kita melihat peran pelayanan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan menjadi lebih nyata dalam konteks otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah menjadi lebih dekat kemasyarakat. Dalam konteks ini peran – peran institusi negara yang ada di daerah ditujukan untuk memenuhi keseluruhan hak – hak sipil yang ada di masyarakat khususnya di daerah seperti pelayanan dalam hal pencatatan sipil yang meliputi pembuatan KTP, Akte Kelahiran dan lain – lain yang merupakan salah satu contoh riil dimana tujuan pelayanan tersebut untuk memenuhi legalitas formal dalam hal kependudukan. Selain itu di daerah terdapat pula bentuk pelayanan yang berorientasi pada profit seperti halnya PDAM, Jawatan POS

maupun Perusahaan Telekomunikasi yang juga menjalankan fungsi *Public Service*.

4.1.2.3. Pengaturan (Regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anantara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini. Fungsi pengaturan ini kemudian terkejewantahkan dalam bentuk lahirnya aturan – aturan yang bersifat formal (Yuridis Formal) seperti Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan sebagainya, yang ditujukan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan tata kehidupan bernegara. Dalam konteks ini tata kehidupan bernegara lebih merujuk pada pembentukan norma – norma formal yang memuat berbagai aturan dan sanksi. Norma – norma formal ini pada gilirannya akan menyasikan hubungan antara kepentingan individu, kepentingan kelompok dan pada puncaknya untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara.

4.1.2.4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

Fungsi – fungsi tersebut di atas oleh aparatur yang menjalankan birokrasi di kabupaten luwu telah dilaksanakan, namun masih saja banyak yang bekerja semaunya, utamanya kedisiplinan terhadap jam yang mencerminkan kemalasan seperti terlambat masuk kerja dan kembali ke rumah sebelum jam kerja berakhir fenomena ini hampir bisa ditemui disetiap SKPD, hingga ke level pemerintahan yang paling rendah yakni desa dan kelurahan , juga tidak kurang jumlahnya aparatur yang masih asing terhadap teknologi informasi yang bisa memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya, misalnya penggunaan sistim informasi yang telah banyak digunakan oleh beberapa SKPD dikabupaten luwu, Sebutlah sistim informasi musrenbang yang ada pada kantor Bappeda , atau Sistim informasi keuangan daerah yang ada pada Dinas Pengelolaan keuangan Daerah yang kesemuanya itu butuh keterampilan khusus untuk dapat mengaksesnya dan banyak lagi realita-realita yang di tunjukkan yang pada akhirnya membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa **“Profesionalisme Aparatur di Kabupaten Luwu Masih Rendah”**.

4.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri serta organisasi.

Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.

Penting untuk diingat bahwa setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan pengembangan yang bersifat pengetahuan dan ketrampilan teknis bagi pegawai yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, bagian kepegawaian dalam hal pengembangan tersebut berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan dan berhubungan dengan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan teknis dari setiap unit kerja, bagian kepegawaian dapat melakukan perencanaan pengembangan karier pegawai agar organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk posisi atau jabatan baru

Sudah sering kita mendengar bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta layanan kesehatan yang maksimal, Oleh pemerintah pusat pun setiap tahunnya senantiasa mengalokasikan anggaran yang jauh lebih tinggi diatas yang lainnya seperti pada tahun 2014 ini pemerintah pusat menganggarkan ABPP sebesar 80,66 Triliun untuk kementerian pendidikan dan ABPP sebesar 46,459 triliun untuk kementerian kesehatan dari total ABPP sebesar 1.249,943 triliun di tahun 2014.

Tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh seluruh bentuk lembaga pendidikan adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005). Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau Dan tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis (undang undang nomor 38 tahun 2009), untuk mencapai ke dua tujuan tersebut yakni tujuan pendidikan dan pembangunan kesehatan tidak bisa terlepas dari Sumber daya manusia yang mengemban kedua hal tersebut. Sementara data serapan perguruan tinggi negeri untuk lulusan sekolah asal Kabupaten Luwu yang membutuhkan uji kompetensi masih rendah serta data yang menunjukkan rasio

perbandingan guru sertifikasi dan guru non sertifikasi juga masih tinggi. Begitupun kenyataan yang bisa dilihat pada sektor kesehatan menunjukkan kebanyakan yang berkecimpung di sektor ini dari sisi pendidikan formal masih didominasi lulusan sekolah menengah keperawatan yang tentunya tingkat pemahaman dan keilmuannya masih standar sehingga pencapaian tujuan utama dua sector ini belum bisa maksimal karena kualitas SDM yang terlibat di kedua sector ini menunjukkan bahwa “ **Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masih Rendah** ” karena hal-hal yang disebutkan di atas.

4.2.3 Membangun Desa dan Menata Kota.

Masyarakat pedesaan selalu identik dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional, yang dilawankan dengan sikap dan perilaku orang kota yang majudan modern. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhansubsisten (kebutuhan pokok yang paling dasar), dan budaya *sharedpoverty* (berbagikemiskinanbersama) (BambangPrakoso, 2008). Cara pandang seperti itu, saya kira saatnya harus dirubah secara total. Karena perilaku dan sikap yang dinisbatkan kemasyarakat pedesaan yang cenderung negatif itu tidak seluruhnya benar secara empiris. Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Mereka miskin bukan karena mereka malas dan sulit menerima perubahan tetapi karena faktor struktur yang ada yang kurang berpihak pada masyarakat pedesaan.

Pembangunan di desa serta pengembangan kota membutuhkan sinergitas diantaranya akibat adanya keterkaitan hubungan yang didasarkan pada kebutuhan kedua belah pihak.

Pembangunannyapun masing – masing berjalan hanya saja pembangunan di desa dianggap masih kurang karena pemenuhan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang cukup menguras APBD sementara pembangunan di kota belopapun dianggap masih kurang karena masih belum mampu menarik sejumlah pekerja yang aktifitas kesehariannya

di kota belopa namun masih memilih untuk berdomisili di kota tetangga yakni palopo yang dari sisi ekonominya membutuhkan biaya yang relative tinggi untuk kesehariannya. Sehingga **"Pembangunan Di Desa Dan Kota Masih Perlu Ditingkatkan."**

4.2.4 Infrastruktur dan tata ruang wilayah

Infrastruktur dan tata ruang wilayah dapat di artikan sebagai prasarana pendukung dan pemanfaatan ruang dalam satu wilayah. Kabupaten Luwu yang memiliki luas total wilayah 3000,25 km² yang terbagi 22 kecamatan dan sekitar 63,99% wilayah Kabupaten Luwu berada di daerah ketinggian serta ada 11 sungai besar yang membelah dan menyebar di seluruh kecamatan yang ada. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai sarana pendukung pergerakan orang, barang dan jasa yang ada saat ini belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan wilayah.

Kabupaten Luwu setelah peningkatan palopo dari kota administratif menjadi kota otonom, Hal ini memaksa Kabupaten Luwu sebagai induk untuk mencari wilayah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai ibu kota kabupaten dan setelah melalui beberapa kajian dan pertimbangan maka jatuhlah pilihan kepada Belopa yang pada awalnya ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten. Untuk memenuhi infrastruktur guna penguatan belopa sebagai ibu kota kabupaten, maka pembangunan di belopa dalam kurun waktu singkat sangat pesat. Namun demikian pembangunan tersebut tetap terkontrol utamanya kualitas infrastruktur itu sendiri karena diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang lama dan diharapkan dapat menjadi icon kabupaten Luwu. hanya saja ada fakta yang menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur di Indonesia secara skala internasional menduduki peringkat ke 92 di dunia. India, china, Thailand, Malaysia jauh di atas Indonesia dan singapura yang menduduki peringkat ke-2 (*world economic forum 2013*) ini adalah sebuah gambaran bahwa standar kualitas infrastruktur secara nasional masih rendah dibandingkan kualitas infrastruktur negara negara lain di Asia dan bagaimana lagi jika kualitas infrastruktur di daerah diturunkan guna peningkatan profit penyedia jasa konstruksi ini tentu lebih mengkhawatirkan lagi.

Karena demikian pesatnya pembangunan dan pengalihan fungsi

lahan yang sebelumnya adalah sawah atau kebun, mengakibatkan penggunaan ruang yang semraut olehnya itu pemerintah kabupaten melalui Perda No. 6 tahun 2011 tentang RTRW melakukan penataan ruang dan fungsi lahan namun pada tataran pelaksanaan terkadang masih saja ada pembangunan/pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai perda tersebut. Olehnya itu dapatlah dikatakan bahwa "**kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah masih rendah**"

4.2.5 Kemandirian dan daya saing daerah

Secara makro indikator ekonomi Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam data statistik antara lain :

Tabel 4.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kab. Luwu 2009 - 2012

Indikator Ekonomi Makro	2009	2010	2011	2012
Pertumbuhan Ekonomi	6,82 %	6,95 %	7,47 %	7,49 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,56 %	6,81 %	7,41 %	10,55 %
Tingkat Kemiskinan	16,96 %	15,43 %	13,93 %	13,33 %
Infrastruktur Jalan				1,710,37
PDRB ADH	3.195.646,47	3.717.632,93	4.351.150,40	5.030.495,95
IPM	73,59	73,98	74,42	74,68

Sumber: BPS Kab.Luwu 2012.

Secara kasat mata dapat dikatakan bahwa margin untuk indikator keberhasilan dari sisi ekonomi makro masih besar meski setiap tahunnya ada pergerakan menuju ke arah peningkatan.

Untuk skala Nasional Pemerintah telah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga akhir 2014 sebesar 8 - 10 % dengan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, seperti bantuan kesehatan, pendidikan dan juga program keluarga harapan (PKH); Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri; dan Klaster ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil.

Selain itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memperbesar aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastruktur dasar ini

diharapkan akan menunjang dan membantu aktivitas kehidupan masyarakat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka perlunya untuk memaksimalkan fungsi dari indikator – indikator yang berkaitan dengan infrastruktur dasar yang ada dalam suatu wilayah. Dalam buku “Indikator Kesejahteraan – Buku 4: Infrastruktur Dasar” ini secara rinci memaparkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur dasar sebagai salah satu ukuran kesejahteraan pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi masing-masing kabupaten berkaitan dengan kondisi kesejahteraan, khususnya pada bidang infrastruktur dasar.

Melalui buku luwu dalam angka tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Luwu sedang melakukan pemetaan wilayah berdasarkan hasil produksi dan kontribusinya terhadap pergerakan angka – angka yang mempengaruhi indikator ekonomi daerah dengan harapan pemerintah Kabupaten Luwu dapat **“Meningkatkan Kemandirian Dan Meningkatkan Daya Saing Daerah”** sehingga pemerintah daerah Kabupaten Luwu dapat mengambil peran dalam ikut membantu program pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan secara nasional yang juga berdampak langsung terhadap masyarakat Luwu pada khususnya.

4.2.6. Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan tahapan – tahapan dari pembangunan itu sendiri yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan dalam segala aspeknya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat namun itikad baik ini juga menyisakan persoalan lingkungan yang pada akhirnya juga akan mengganggu tujuan awal dari pembangunan itu sendiri.

Belopa saat ini yang lagi giatnya membangun sebagai ibu kota kabupaten dalam rangka pemenuhan infrastruktur perkotaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan. Pengalihan fungsi lahan

adalah hal yang paling sering ditemui utamanya pengalihan dari lahan pertanian menjadi lahan hunian yang dalam waktu singkat akan mempengaruhi kualitas tanah pertanian yang ada disekitarnya juga bisa ditimbulkan akibat sampah dan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Ada dua hal yang paling menggoncangkan keseimbangan lingkungan, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi serta ledakan penduduk (Salim, 1981). Perkembangan IPTEK telah mengubah keadaan lingkungan tempat hidup sehingga menimbulkan gangguan. Ledakan penduduk yang terjadi telah memicu percepatan perubahan lingkungan agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ledakan penduduk telah mendorong keharusan untuk melancarkan pembangunan sekaligus dengan pengembangan lingkungan.

Proses pembangunan tidak boleh terhenti tetapi alam ini harus tetap dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam keadaan yang tetap baik, sehingga pantaslah jika proses pembangunan yang kita laksanakan sebagaimana hakekat pembangunan nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya yang sasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga **“Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”** tetap menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan.

4.2.7 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Negara kita adalah Negara hukum kalimat yang sering kita ucapkan ketika kita berada dalam sebuah kondisi yang tidak aman atau ada hak-hak kita yang terlanggar atau barangkali seorang pemimpin yang ingin menghimbau kepada masyarakatnya agar dapat berlaku teratur sebagaimana hukum yang berlaku.

Kabupaten Luwu sebagai daerah otonom yang memiliki wilayah dan pemerintahan serta kewenangan dalam mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lain sebagainya yang bertujuan membawa masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan. Sehingga **Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat** adalah harga mati bagi pemerintah daerah agar masyarakat dengan leluasa menjalankan aktifitasnya, serta menjadi nilai tawar tersendiri bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya

selain daripada sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Dalam perjalanannya sebagai kabupaten, Luwu telah sering kali terjadi pergolakan atau lebih tepatnya disebut kerusuhan. Kerusuhan yang pada awalnya hanya dipicu dari persoalan sepele. Sebut saja peristiwa dandang di pertengahan tahun 90-an, padang sappa di tahun 2000-an serta peristiwa-peristiwa lainnya yang kemudian berlanjut menjadi perkelahian antar desa yang sudah barang pasti berakibat pada jatuhnya korban, baik jiwa maupun materi dari kedua belah pihak. Selain daripada hal ini juga bisa berarti gambaran bahwa pemerintah setempat (pemerintah dan institusi hukum lainnya) tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik yang berakibat pada pencitraan kabupaten yang rawan konflik sehingga menghambat laju investasi dikabupaten. Sehingga persoalan **“Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”** tetap berada dalam hitungan guna pencapaian visi dan misi kabupaten untuk tahun 2014 – 2019.

4.3. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis.

Kabupaten Luwu dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta sumber daya manusia yang mengelolanya didukung oleh birokrasi pemerintahan yang mengatur, mengeksploitasi dan mensinergikan dengan seluruh komponen ada yang ada guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun demikian melalui fakta-fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan hal – hal yang akan menjadi hambatan dalam pencapaian visi misi baik RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2014-2019 yang sudah merupakan paruh ke tiga dalam pelaksanaan pencapaian RPJPD 2005-2025.

Adapun permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai isu strategis untuk RPJMD tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Profesionalisme Aparatur;
- b. Kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembangunan perdesaan dan penataan kota;
- d. Kualitas infrastruktur dan tata wilayah;
- e. Kemandirian dan daya saing daerah;
- f. Keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

g. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat kembali tentang kondisi yang diinginkan oleh RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata;
4. Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah;

isu strategis tersebut di atas dapat di uraikan sebagai berikut :

- a) Profesionalisme Aparatur,** Bahwa pelayanan public sebagai salah satu fakta membenaran akan profesinallisme birokrasi yang masih kurang ini sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari aparatur serta sarana dan prasarana pendukungnya yang masih dianggap kurang dan hal tersebut semakin diperparah dengan ketidak profesionalan aparatur akibat ketidak tahuan akan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang menjadi acuan sebagai pelayan masyarakat untuk urusan tertentu;
- b) Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan,** Bahwa telah sama-sama difahami jika ingin mendapatkan siswa yang berprestasi dan pelayanan kesehatan yang maksimal salah satu faktornya adalah SDM pendidik (Guru) dan SDM tenaga kesehatan selain factor sarana dan prasarana penunjang dan lain sebagainya yang menunjukkan kualitas dikedua sector ini. Untuk itu diharapkan dari Dinas pendidikan dan Dinas kesehatan sebagai leading ke dua sector ini untuk lebih berkonsentrasi dalam menetapkan program kegiatan sehingga di akhir masa RPJMD ini kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan terjadi peningkatan;
- c) Pembangunan Perdesaan Dan Penataan Kota ,** Bahwa pembangunan desa adalah upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi dan diharapkan adanya sinergitas antar desa, desa dengan kota guna mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam wilayahnya akibat adanya keterkaitan hubungan yang didasarkan pada kebutuhan kedua belah pihak dan disinilah diharapkan adanya etos kerja yang tinggi oleh seluruh komponen pelaku agar tujuan dari upaya tersebut dapat diraih;

- d) Kualitas Infrastruktur Dan Tata Ruang Wilayah,** Bahwa Pencegahan itu jauh lebih baik ketimbang penanganan. Pembangunan Infrastruktur di belopa maju pesat guna penguatan sebagai ibu kota kabupaten serta penataan wilayah yang harus berpedoman pada perturan daerah no. 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah.
- e) Kemandirian Dan Daya Saing Daerah,** menyiasati pengangguran akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada, salah satu upaya pemerintah adalah membantu dan memfasilitasi tumbuhnya industri kecil dan menengah di tengah-tengah masyarakat, menggalakkan ekonomi kreatif yang digagas pemerintah melalui inpres no. 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif serta menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan bantuan permodalan, alat, pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta memaksimalkan potensi daerah sehingga setiap daerah memiliki daya saing tersendiri dan pada akhirnya ikut berkontribusi positif terhadap angka-angka yang menjadi indikator ekonomi.
- f) Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan,** Bahwa pembangunan tidak akan pernah berhenti karena pemenuhan kebutuhan penduduk yang terus tumbuh namun harus tetap memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan disekitarnya seperti, penurunan kualitas tanah, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Baik menjaga keseimbangan sebelum pelaksanaan pembangunan dengan adanya AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) atau penanganan dampak setelah pembangunan seperti pembangunan IPAL pada rumah sakit atau pelaksanaan kebijakan nasional seperti pemenuhan 30% wilayah kota dijadikan ruang terbuka hijau.
- g) Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,** Adalah penting dan sudah menjadi sebuah tugas utama pemerintah daerah dan jajarannya serta institusi hukum lainnya yang ada di kabupaten luwu, untuk menciptakan situasi yang kondusif guna kelangsungan hidup bermasyarakat, menjaga investasi serta stabilitas keamanan untuk penanganan potensi konflik untuk pemilu legislative dan pemilihan presiden baik sebelum dan sesudahnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019 Kab. Luwu saat ini telah memasuki tahapan ke dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang mengemban visi dalam RPJPD adalah **“Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dalam Nuansa Religi”**. Yang dalam pencapaiannya telah ditetapkan pula 4 misi, ke-empat misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata;
4. Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah;

Setelah memperhatikan potensi wilayah, permasalahan pembangunan serta visi bupati terpilih yang kemudian disandingkan dengan visi RPJPD Kab. Luwu 2005 – 2025 maka visi RPJMD kab. Luwu Tahun 2014 – 2019 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius”**.

Dalam Rumusan Visi tersebut ada tiga pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Lebih Maju** artinya : Mengarah kepada kondisi yang mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
- **Lebih Mandiri** artinya : Merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada daerah lain sejak berdirinya Kabupaten sudah terbiasa sehingga bebas dari ketergantungan pada daerah lain.
- **Lebih Berdaya saing** artinya : Adalah kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan regional serta nasional.

Adapun kalimat lebih bernuansa religius bukan termasuk didalam pokok Visi akan tetapi merupakan wadah dari tiga pokok Visi diatas.

Hal tersebut di atas kemudian diterjemahkan ke dalam misi sebagai bentuk upaya untuk pencapaian visi tersebut, Pemerintah kab. Luwu juga telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan;
3. Membangunan desa dan menata kota;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6. Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut di atas sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, dalam setiap misi pembangunannya adalah sebagai berikut:

5.2.1. Misi Pertama : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur,

Tujuan:

1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang professional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan public serta pembangunan partisipatif.

Sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur

5.2.2 Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan,

Tujuan:

Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

5.2.3 Misi Ketiga : Membangunan Desa dan Menata Kota,

Tujuan:

Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar.

Sasaran:

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan serta sarana dan prasarana perkotaan

5.2.4 Misi Keempat : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah,

Tujuan:

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran:

Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas

5.2.5 Misi Kelima : Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Tujuan:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Sasaran:

1. Meningkatnya daya saing usaha pertanian.
2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
4. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan

5.2.6. Misi Keenam : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan:

Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan

Sasaran:

Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.

5.2.7. Misi Ke-tujuh : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

Tujuan:

Meningkatkan stabilitas di daerah

Sasaran:

Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

TERWUJUDNYA KABUPATEN LUWU YANG LEBIH MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERNUANSA RELIGIUS			
POKOK MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Lebih Maju	Meningkatkan profesionalisme Aparatur (Misi 1)	1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public serta pembangunan partisipatif.	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. 2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur
	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan (Misi 2)	Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan. 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
	Membangun desa dan menata kota (Misi 3)	Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan

	Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah (Misi 4)	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan meratanya mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas
	Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Misi 6)	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Misi 7)	Meningkatkan stabilitas di Daerah	Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum
Lebih Mandiri	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan (Misi 2)	Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan. 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
	Membangun desa dan menata kota (Misi 3)	Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan
	Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah (Misi 4)	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan meratanya mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas
	Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah (Misi 5)	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	1. Meningkatnya daya saing usaha pertanian. 2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 3. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. 4. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan
Lebih Berdaya Saing	Meningkatkan profesionalisme Aparatur (Misi 1)	3. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima. 4. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public serta pembangunan partisipatif.	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. 2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparat
	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan (Misi 2)	Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan. 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
	Membangun desa dan menata kota (Misi 3)	Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan

	Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah (Misi 4)	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas
	Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah (Misi 5)	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya saing usaha pertanian. 2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 3. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. 4. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Misi 7)	Meningkatkan stabilitas di Daerah	Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi Kabupaten Luwu telah dirumuskan dan dijelaskan kembali dalam tujuan dan sasaran yang selanjutnya dalam pencapaiannya akan dibantu dengan strategi – strategi serta arah kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah yang juga tertuang dalam RPMD Kab. Luwu 2014-2019.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

TABEL 6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KAB. LUWU

Visi : Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius			
Misi I : Meningkatkan profesionalisme Aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public serta pembangunan partisipatif.</p>	<p>➢ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.</p> <p>➢ Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.</p> <p>➢ Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif</p>	<p>1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah</p> <p>3. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;</p> <p>4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi</p> <p>5. Penataan struktur organisasi yang proporsional</p> <p>6. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi</p> <p>7. Penuntasan kejelasan batas administrasi wilayah dalam Kabupaten Luwu</p> <p>8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran,</p> <p>9. Pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah,</p> <p>10. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>11. Mengusahakan predikat WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah,</p> <p>12. Peningkatan Penerimaan Daerah sesuai dengan Potensi Wilayah,</p>

		<p>2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat</p>	<p>13. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>14. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan asset-aset daerah yang masih bermasalah,</p> <p>15. Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,</p> <p>16. Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>17. Penataan pengelolaan buku dan arsip daerah dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan .</p> <p>1. Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa,</p> <p>2. Peningkatan pembinaan bagi aparat desa,</p> <p>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,</p>
--	--	---	---

Misi II : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan			
Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan ➢ Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan. 2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga medis dalam daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Peningkatan kualifikasi pendidik minimal strata pendidikan D4/S1. 3. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar 2. Meningkatkan kesejahteraan para medis berbasis kinerja. 3. Meningkatkan kemampuan duplikasi kompetensi bagi sesama tenaga medis.
Misi III : Membangun desa dan menata kota			
Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan disentra pertanian, dan wisata 2. Sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. 3. Pembangunan sumber-sumber air bersih di desa. 4. Penyediaan air minum daerah perkotaan dengan kategori daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

			5. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro.
Misi IV : Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah			
Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa 2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air 3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 	<p>Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan konservasi sumber daya air; 2. peningkatan pendayagunaan sumber daya air 3. peningkatan pengendalian daya rusak air, 4. pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; 2. Peningkatan cakupan layanan persampahan; 3. Peningkatan ketersediaan drainase perkotaan; 4. Pengembangan lingkungan permukiman sehat;

		<p>4. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pemanfaatan ruang</p> <p>5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan</p> <p>6. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman</p> <p>7. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman.</p> <p>8. Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenaga listrikan</p>	<p>1. Perwujudan mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten Luwu;</p> <p>2. Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian.</p> <p>2. Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni</p> <p>1. Peningkatan cakupan layanan persampahan;</p> <p>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perhubungan.</p> <p>1. Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan.</p>
--	--	--	--

		9. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah	1. Meningkatkan teknologi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 2. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah;
MISI V : Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya daya saing usaha pertanian. ➢ Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. ➢ Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. ➢ Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan 	1. Melalui strategi memperluas kesempatan kerja 2. Meningkatkan investasi. 3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. 4. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan.	1. penempatan dan perluasan kesempatan kerja. 1. penciptaan iklim usaha yang kondusif. 1. peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; 2. peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. 1. Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.

		<p>5. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.</p> <p>6. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.</p> <p>7. Meningkatkan produksi dan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan.</p>	<p>1. mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan.</p> <p>1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan;</p> <p>2. peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan;</p> <p>3. peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak</p> <p>4. pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.</p> <p>1. peningkatan produksi perikanan dan kelautan</p> <p>2. peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.</p>
--	--	--	---

		<p>8. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan.</p> <p>9. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli.</p> <p>10. Meningkatkan daya saing industri.</p> <p>11. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional.</p>	<p>1. Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.</p> <p>1. Pengembangan pariwisata dan produk wisata;</p> <p>1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri;</p> <p>2. Peningkatan produksi dan kualitas produk unggulan (industri kreatif)</p> <p>1. peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;</p>
MISI VI : Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan			
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana	1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana.	1. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung. 3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 1. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan lindung dan non hutan. 1. peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan 2. peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.
MISI VII : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat			
Meningkatkan stabilitas di Daerah	Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban Politik sebagai Warga Negara. 2. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara. 3. Menata sistem hukum di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. 3. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pemilu. 1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. 1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

		<p>4. Meningkatkan budaya taat hukum.</p> <p>5. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p>	<p>2. Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah.</p> <p>1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM.</p> <p>1. Peningkatan pembinaan siskamling</p> <p>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Satpol Pamong Praja</p>
--	--	---	---

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Umum adalah merupakan bentuk dukungan terhadap pencapaian visi misi RPJMD 2014 – 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu serta bentuk respon Pemerintah Daerah terhadap Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Umum Pemerintah Daerah ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya melalui SKPD dengan fungsinya masing-masing. SKPD kemudian membuat program kerja yang berisikan beberapa kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri maupun kegiatan yang melibatkan SKPD lain.

Adapun kebijakan umum pemerintah Kabupaten Luwu untuk RPJMD Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kab. Luwu 2014-2019

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Strategi & Arah Kebijakan	Program	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. • Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. • Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur 	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah 3. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; 4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi 5. Penataan struktur organisasi yang proporsional 6. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi 7. Penuntasan kejelasan batas administrasi wilayah dalam Kabupaten Luwu 8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran, 9. Pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah, 10. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Prosedur standar pelayanan . • Menciptakan pelayanan prima yang cepat dan murah. • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan • Memediasi pembentukan Kab.Luwu Tengah. • Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah. • Penataan Peraturan Perundang-undangan. • Mempersiapkan Penataan daerah otonomi baru. 1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3.Program Perencanaan Sosial Budaya 4.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 5.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Sekretariat Daerah

			<p>11.Mengusahakan predikat WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah,</p> <p>12.Peningkatan Penerimaan Daerah sesuai dengan Potensi Wilayah,</p> <p>13.Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>14.Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan asset-aset daerah yang masih bermasalah,</p> <p>15.Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,</p> <p>16.Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>17.Penataan pengelolaan buku dan arsip daerah dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan .</p>	<p>6.Program Pengembangan Sarana Komunikasi & Penyebarluasan Informasi Bid.Kominfo</p> <p>7.Program Peningkatan PAD Sektor Kominfo</p> <p>8.Program Pengembangan Sarana Komunikasi & Penyebarluasan Informasi Bid.Kominfo</p> <p>9.Program Peningkatan PAD Sektor Kominfo</p> <p>10. Program Pembinaan & Pengawasan TV Kabel</p> <p>11. Program Pengembangan SDM Bid.Kominfo</p> <p>12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>13. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>14. Program Peningkatan Pelayanan Informatika dan Telekomunikasi</p> <p>15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>16. Program Pembinaan & Pengawasan Pengusaha</p>	Komunikasi & Informasi	Dinas Perhubungan & Kominfo, Sekretariat Daerah, Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah, Kantor Diklatnaker, RSUD Batara Guru
--	--	--	--	---	------------------------	---

				<p>TV Kabel</p> <p>17. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p> <p>18. Program Intensifikasi Pendapatan Daerah</p> <p>19. Program Eksentifikasi Pendapatan Daerah</p> <p>20. Program Peningkatan Pendapatan Daerah</p> <p>21. Program Meteraninsasi Wajib Pajak Air Tanah</p> <p>22. Program Peningkatan Kinerja, Fasilitasi & Pengembangan SDM.</p> <p>23. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawas</p> <p>24. Program Peningkatan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah</p> <p>25. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>26. Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</p>	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah, DPKD, Inspektorat, Sekretariat DPRD, BPMD
--	--	--	--	--	-------------------	---

				<p>27. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan.</p> <p>28. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>29. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>30. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>31. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>32. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</p> <p>33. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>34. Program Penataan Daerah Otonomi Baru</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>35. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan</p> <p>36. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>37. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Alam</p> <p>38. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi kemasyarakatan</p> <p>39. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>40. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perekonomian</p> <p>41. Pembinaan, Pengendalian</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				& Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 42. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pembangunan 43. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Humas dan Protokol 44. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 46. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 47. Program Peningkatan Kinerja Fasilitasi & Pengembangan SDM 48. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur/pemerintah	Kepegawaian	BKD, Kantor Pelatihan & Tenaga Kerja, Inspektorat, Dikpora, DPKD, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Seretariat Korpri
--	--	--	--	--	-------------	---

				49. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pemerintahan	Pertanahan	Sekretariat Daerah
				50. Program Penataan Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Bebas biaya akte kelahiran dan Kartu keluarga & Kartu Tanda Penduduk 	Kependudukan & Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
				51. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Badan KB & Pemeberdayaan Perempuan
				52. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak		
				53. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		
				54. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		
				55. Program Pembangunan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan		

				Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 56. Program Peningkatan Wawasan Kebangasaan 57. Program Peningkatan Kualitas Hidup & perlindungan Perempuan 58. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR 59. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 60. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS 61. Program Keluarga Berencana 62. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 63. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 64. Program Pelayanan	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	Badan KB & Pemberdayaan Perempuan
--	--	--	--	---	---	-----------------------------------

				Kontrasepsi 65. Program Pengembangan Tumbuh Kembang Anak 66. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 67. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 68. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 69. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jom 70. Pembinaan EKS Penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 71. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 72. Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinsosnakertrans
--	--	--	--	--	--------	------------------

				73. Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				74. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
				75. Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
				76. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		
				77. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kepemudaan	Pemuda & Olah Raga	Dikpora
				78. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
				79. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
				80. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		
				81. Program Pembinaan Kepemudaan		
				82. Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah	Statistik	Bappeda, BPS, ,Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan,

			<p>90. Program Transmigrasi Lokal</p> <p>91. Program Transmigrasi Regional</p> <p>92. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</p> <p>1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p> <p>2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</p> <p>3. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</p> <p>6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>7. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat & Desa</p>	<p>BPMD, Sekretariat Daerah</p>
		<p>▪ Strategi Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dengan arah kebijakn :</p> <p>1. Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa,</p> <p>2. Peningkatan pembinaan bagi aparat desa,</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,</p>			

				<p>Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan</p> <p>8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>9. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan • Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan dengan arah kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Peningkatan kualifikasi pendidik minimal strata pendidikan D4/S1. 3. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas biaya pendidikan • Bebas biaya pendidikan bagi guru SD, SMP, SMA bagi yang belum sarjana • Melanjutkan pendidikan gratis dari SD,SMP,SMA (Wajib belajar 12 tahun) dan memberikan beasiswa berprestasi serta melaksanakan program Kelas Tuntas Berkelanjutan (KATUB) • Membangunan spot centre dan pengembangan olah raga di Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 	Pendidikan	Dikpora

			<p>3. Program Pendidikan Menengah</p> <p>4. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan</p> <p>6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p>		
		<p>▪ Strategi Peningkatan kapasitas SDM tenaga medis dalam daerah dengan arah kebijakan :</p> <p>1. Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan para medis berbasis kinerja.</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan duplikasi kompetensi bagi sesama tenaga medis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas biaya pengobatan • Meningkatkan status Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas rawat Inap & menjadikan RSUD Batara Guru menjadi rumah sakit rujukan minimal dalam wilayah Luwu Raya. <p>1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Program Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan</p>	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Batara Guru

				<p>Masyarakat</p> <p>5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</p> <p>10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan anak</p> <p>12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar</p> <p>13. Program Peningkatan</p>	
--	--	--	--	---	--

				Pelayanan Kesehatan 14. Program Peningkatan Pelayanan Rujukan 15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 17. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 18. Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 19. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan 20. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan 21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Minuman Keras dan HIV AIDS</p> <p>22. Program Pendayagunaan Tenaga Kesehatan</p> <p>23. Program Peningkatan Pelayanan KB</p> <p>24. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan 	Membangun Desa & Menata Kota	<ul style="list-style-type: none"> Strategi meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar dengan arah kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan disentra pertanian, dan wisata Sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. Pembangunan sumber-sumber air bersih di desa. Penyediaan air minum daerah perkotaan dengan kategori daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro. 	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin Ketersediaan Pelayanan Air Bersih (PDAM) Di seluruh Kecamatan & Bagi Daerah Ynag Tidak terjangkau Jaringan PDAM Dapat memanfaatkan Sumber Mata Air Lokal Penyelesaian pembangunan bendung, bendungan & jaringan irigasi Membangun jaringan listrik bagi daerah yang belum terjangkau aliran listrik 	Perumahan & tata Ruang	Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Peternakan

				<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Program gerakan membangun desa menata kota 2. Program pembangunan sarana dan prasarana air minum 3. Program pengembangan infrastruktur perdesaan 4. Program pengembangan kota hijau/program pembangunan sarana & prasarana RTH. 5. Program peningkatan sarana & prasarana pertanian 6. Program penyediaan & pengelolaan air baku 7. Program pengembangan pengelolaan & konservasi sungai, danau & sumber daya air. 8. Program pengendalian banjir 9. Program pembangunan saluran darinase/gorong- 	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga, PSDA
--	--	--	--	---	----------------	------------------------

				<p>gorong</p> <p>10. Program pembangunan jalan & jembatan</p> <p>11. Program pembinaan & pengembangan bidang energi & ketenagalistrikan</p>	Energi & Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan & Energi
	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas 	<p>Peningkatan Kualitas Infrastruktur & Tata Ruang Wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Meningkatkan Kondisi Infrastruktur jalan Guna Mendukung Pelayanan Pergerakan Orang, Barang & Jasa Dengan Arah Kebijakan : Pembangunan & Peningkatan serta rehabilitasi jaringan jalan & jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Infrastruktur Sarana Transportasi Dengan Target 1000 km jalan & 100 Unit Jembatan • Peningkatan Status jalan Poros Belopa-Bastem, Palopo-Bastem-Toraja menjadi Jalan Provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 4. Program Pembangunan Turap / Talud Bronjong 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Bronjong 	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga

			<p>6. Program peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan</p> <p>1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> <p>2. Program Penyediaan & Pengelolaan Air Baku</p> <p>3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air</p> <p>4. Program Pengendalian Banjir</p> <p>5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</p> <p>6. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif</p> <p>7. Program Peningkatan</p>	<p>Pekerjaan Umum</p> <p>Pekerjaan Umum</p>	<p>PSDA, Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang</p> <p>BAPPEDA, PSDA, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif</p> <p>8. Program Peningkatan Pengelolaan Lahan & Air</p> <p>1. Program pembangunan sarana & prasarana air minum</p> <p>2. Program perencanaan tata ruang/program penataan ruang</p> <p>3. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh</p> <p>4. Program pengembangan kota hijau/program pembangunan sarana & parasarana RTH</p> <p>5. Program pembangunan sarana & prasarana sanitasi</p> <p>6. Program peningkatan kualitas perumahan layak huni bagi MBR</p> <p>7. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</p> <p>8. Program Percepatan</p>	<p>Penataan Ruang & Perumahan</p>	<p>Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang</p>
		<p>▪ Strategi Peningkatan Kondisi Sarana & Prasarana Dasar Permukiman Dengan Arah Kebijakan :</p> <p>1. Peningkatan Ketersediaan Sarana & Prasarana Air Minum;</p> <p>2. Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan;</p> <p>3. Peningkatan Ketersediaan Drainase Perkotaan;</p> <p>4. Pengembangan Lingkungan Permukiman Sehat;</p>			

				Pembangunan Sanitasi Permukiman 9. Program Pengembangan Perumahan & Permukiman 10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 15. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan- kawasan konservasi laut dan Hutan 16. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas Kebersihan Pertamanan & Pemakaman, Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang
--	--	--	--	--	------------------	---

			<p>Permukiman (PPSP)</p> <p>17. Program Pengembangan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)</p> <p>1. Program Perencanaan Tata Ruang/Program Penataan Ruang</p> <p>2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <p>4. Program Gerakan Membangun Desa Menata Kota</p>	<p>Penataan Ruang</p>	<p>Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang</p>
		<p>▪ Strategi Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pemanfaatan ruang dengan arah kebijakan :</p> <p>1. Perwujudan mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang dalam wilayah Kabupaten Luwu;</p> <p>2. Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang;</p>			
		<p>▪ Strategi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan :</p>			

			<p>1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian.</p> <p>2. Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni</p> <p>▪ Strategi Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan :</p> <p>Peningkatan cakupan layanan persampahan;</p> <p>▪ Strategi Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan arah kebijakan :</p>	<p>1. Program pengembangan perumahan & permukiman</p> <p>1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>2. Program pembangunan sarana & prasarana sanitasi</p> <p>3. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</p>	<p>Perumahan</p> <p>Lingkungan Hidup</p>	<p>Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang</p> <p>BLH, Dinas Kebersihan Pertamanan & Pemakaman, Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang</p>
--	--	--	---	--	--	---

			<p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perhubungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat 2. Program Peningkatan & Pengawasan Lalu Lintas 3. Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 4. Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan Darat 5. Program Peningkatan Akseibilitas Pelayanan Angkutan 6. Program Peningkatan Kualitas & Disiplin SDM Aparatur Perhubungan Darat 7. Program Pengadaan Sarana & Prasarana Perhubungan Laut 8. Program Penataan Regulasi Bid. Perhubungan Laut 9. Program Peningkatan SDM Aparatur 	Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informasi
--	--	--	---	---	-------------	--

			<p>Perhub.Laut</p> <p>10. Program Pengadaan Sarana & Prasarana Perhub. Udara</p> <p>1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>2. Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Bidang Pertambangan Dan Energi</p>		
		<p>▪ Strategi Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenaga listrikan dengan arah kebijakan :</p> <p>Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan.</p>		Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan & Energi
		<p>▪ Strategi Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah dengan arah kebijakan :</p> <p>1. Meningkatkan teknologi pengembangan dan</p>	<p>1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang</p>	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan & Energi

			<p>pemanfaatan energi baru terbarukan;</p> <p>2. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah;</p>	<p>Pertambangan</p> <p>2. Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Geologi Dan Sumber Daya Mineral</p> <p>3. Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Bidang Pertambangan Dan Energi</p> <p>4. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)</p> <p>5. Program Sistem Informasi Geologi Berkala Yang Berkelanjutan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing usaha pertanian. • Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. • Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. • Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan 	<p>Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah</p>	<p>▪ Strategi memperluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan :</p> <p>penempatan dan perluasan kesempatan kerja.</p>	<p>1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>2. Program Peningkatan kesempatan Kerja</p> <p>3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p>	<p>Tenaga Kerja</p>	<p>Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kantor Pelatihan Tenaga Kerja, Dikpora, Sekretariat Daerah</p>	

			<p>4. Program Pendidikan & Pelatihan Bagi Pencari Kerja</p> <p>5. Program pembinaan kepemudaan</p> <p>▪ Strategi Meningkatkan investasi dengan arah kebijakan : penciptaan iklim usaha yang kondusif.</p>	<p>4. Program Pendidikan & Pelatihan Bagi Pencari Kerja</p> <p>5. Program pembinaan kepemudaan</p> <p>• Mendorong investasi dan industrialisasi</p> <p>1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</p> <p>2. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</p> <p>4. Program Peningkatan Pelayanan Kepada Pelaku Ekonomi Dalam Hal Perizinan</p> <p>5. Program Penguatan Kualitas Perizinan Non Perizinan & Penanaman</p>	<p>Penanaman Modal Daerah</p>	<p>BP3M</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------

			<p>Modal</p> <p>6. Program Pengendalian & Pengawasan Perizinan</p>			
			<p>▪ Strategi Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan :</p> <p>1. peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM;</p> <p>2. peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.</p>	<p>• Menciptakan keadilan ekonomi bagi pengusaha kecil serta pemerataan pembangunan</p> <p>1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</p> <p>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>4. Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM</p>	Koperasi & UKM	Dinas Koperindag

			<p>▪ Strategi Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan dengan arah kebijakan :</p> <p>Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekeagaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas biaya pengadaan bibit coklat, cengkeh dan jagung kepada petani serta pemberian hand traktor kepada kelompok tani • Peningkatan produksi petani melalui sistem mekanisasi pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 	<p>Urusan Pertanian</p>	<p>Dinas tanaman Pangan Holtikulturan & Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh & Ketahanan Pangan, Dinas Hutbun</p>
--	--	--	---	---	-------------------------	---

			<p>6.Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>7.Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan</p> <p>8.Program Peningkatan Produksi Hortikultura</p> <p>9.Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian / Perikanan dan Kehutanan</p> <p>10. Program pengendalian organisme pengganggu tanaman</p> <p>▪ Strategi Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan : Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan.</p>	<p>1.Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</p> <p>2.Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan</p> <p>3.Program Peningkatan</p>	<p>Urusan Pertanian</p>	<p>Dinas tanaman Pangan Holtikultur & Peternakan</p>
--	--	--	--	---	-------------------------	--

			<p>Sarana dan Prasarana Pertanian</p> <p>4. Program peningkatan pengelolaan lahan & air</p> <p>5. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif</p> <p>6. Program peningkatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif</p>	<p>Urusan Pertanian</p>	<p>Bappeda, PSDA, Dinas tanaman Pangan Holtikultur & Peternakan</p>
		<p>▪ Strategi Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan :</p> <p>1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan;</p> <p>2. peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan</p>	<p>1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan</p> <p>3. Program Peningkatan</p>	<p>Urusan Pertanian & Perkebunan</p>	<p>Dinas Hutbun, Badan Pelaksana Penyuluh & Ketahanan Pangan, Dinas tanaman Pangan Holtikultur & Peternakan</p>

			<p>pertanian, perkebunan dan peternakan;</p> <p>3. peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak</p> <p>4. pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.</p>	<p>Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan</p> <p>4.Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</p> <p>5.Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>6.Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p> <p>7.Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan</p> <p>8.Program Peningkatan Produksi Hortikultura</p> <p>9.Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian / Perikanan dan Kehutanan</p> <p>10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian</p> <p>11. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Secara</p>	
--	--	--	---	--	--

				Partisipatif 12. Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 13. Program Peningkatan Pengelolaan Lahan & Air 14. Program Optimalisasi Usaha Tani Perkebunan 15. Program Peningkatan Mutu Hasil & Produksi 16. Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 17. Program Peningkatan Prioritas Sumber Daya Petugas & Petani 18. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pendukung 19. Program Pelaksanaan Panen Pengolaan Hasil & Pemasaran 20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 21. Program pemberdayaan petani & keluarganya		
--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Meningkatkan produksi dan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dengan arah kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan produksi perikanan dan kelautan 2. peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, 	Urusan Perikanan & Kelautan	Dinas Perikanan & Kelautan
--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------

			<p>Air Payau dan Air Tawar</p> <p>8. Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut</p> <p>▪ Strategi Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan dengan arah kebijakan : Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.</p>	<p>1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p> <p>2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan</p> <p>4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</p> <p>5. Program Pemberdayaan Petani & Keluarganya</p> <p>6. Program Pengawasan & Pengamanan hutan</p> <p>7. Program Pelayanan</p>	<p>Urusan Kehutanan</p>	<p>Dinas Hutbun</p>
--	--	--	---	---	-------------------------	---------------------

			<p>Perizinan & Peredaran Hasil Hutan</p>			
			<p>▪ Strategi Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli dengan arah kebijakan : Pengembangan pariwisata dan produk wisata;</p>	<p>1. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 4. Program Pengembangan Destinasi Sarana & Prasarana Pariwisata 5. Program revitalisasi kawasan wisata yang bersejarah</p>	<p>Urusan Kepariwisataan</p>	<p>Dinas Pariwisata & Kebudayaan, Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang</p>
			<p>▪ Strategi Meningkatkan daya saing industri dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri;</p>	<p>• Mendorong investasi & industrialisasi 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan</p>	<p>Urusan Perindustrian</p>	<p>Dinas Koperindag</p>

			<p>2. Peningkatan produksi dan kualitas produk unggulan (industri kreatif);</p> <p>▪ Strategi Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta perlindungan konsumen serta pasar tradisional dengan arah kebijakan : Meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat & barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif & efisien</p>	<p>Menengah</p> <p>2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>3. Program Peningkatan Kemampuan IPTEK Sistik Industri</p> <p>4. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial</p> <p>1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan</p> <p>4. Program Pembinaan</p>	<p>Urusan Perdagangan</p>	<p>Dinas Koperindag</p>
--	--	--	--	--	---------------------------	-------------------------

				<p>Pedagang Kaki Lima & Asongan</p> <p>5. Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor</p> <p>6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima & Asongan</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 	<p>Menjaga keseimbangan Lingkungan & Pemb. Berkelanjutan</p>	<p>▪ Strategi Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 	<ol style="list-style-type: none"> Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 	<p>Lingkungan Hidup & Kehutanan</p>	<p>BLH, Dinas Kebersihan Pertamanan & Pemakaman, Dinas Perumahan Cipta Karya & Tata Ruang, BPBD, Dinas Kehutanan & Perkebunan</p>

			<p>4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</p> <p>5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>6. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)</p> <p>7. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana</p> <p>8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.</p> <p>9. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana</p> <p>10. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p>		
		<p>▪ Strategi Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan :</p> <p>Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan lindung dan non hutan.</p>	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</p>	<p>Lingkungan Hidup & kehutanan</p>	<p>BLH, Dinas Kehutanan & Perkebunan , Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan & Kelautan</p>

				<p>Hidup</p> <p>2.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>3.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</p> <p>4.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>5.Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>6.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan</p> <p>7.Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan Hutan</p> <p>8.Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut</p> <p>9.Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>▪ Strategi Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan 2. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Program Pengawasan & Pengamanan hutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan Hutan 2. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 3. Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut 4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan 	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>BLH, Dinas Kehutanan & Perkebunan , Dinas Pariwisata</p>
--	--	--	---	--	---------------------------------------	---

				7. Program Pengawasan & Pengamanan hutan		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum 	Meningkatkan Keamanan & Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Staregi Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban Politik sebagai Warga Negara dengan arah kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> Meningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pemilu. Strategi Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara dengan arah kebijakan : <p>Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara;</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi Pemimpin bagi semua golongan Pemberdayaan tokoh masyarakat & tokoh agama Meningkatkan keamanan & kenyamanan lingkungan <ol style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 	Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Badan Kesbang Linmas, Satpol PP, Sekretariat Daerah
				<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat 	Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Badan Kesbang Linmas, Satpol PP, Sekretariat Daerah

			<p>▪ Strategi Menata sistem hukum di daerah dengan arah kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 2. Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah; <p>▪ Strategi Meningkatkan budaya taat hukum dengan arah kebijakan :</p> <p>Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan 	<p>Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat</p> <p>Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Badan Kesbang Linmas, Satpol PP, Sekretariat Daerah</p> <p>Badan Kesbang Linmas, Satpol PP, Sekretariat Daerah</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Keamanan</p> <p>4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>5. Program Penikatan Kinerja PPNS</p> <p>▪ Strategi Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan arah kebijakan :</p> <p>1. Peningkatan Pembinaan Siskamling</p> <p>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Satpol Pamong Praja</p>	<p>Keamanan</p> <p>4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>5. Program Penikatan Kinerja PPNS</p> <p>1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</p> <p>4. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli</p>	<p>Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Badan Kesbang Linmas, Satpol PP</p>
--	--	--	---	--	--	--

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia, sumber daya alam dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya, kemajuan teknologi dan struktur sosial politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mencapai sasaran pokok yang telah dijabarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, dengan tidak mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, indikasi rencana program prioritas di setiap tahapan berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan harus tetap berkesinambungan untuk mewujudkan sasaran pembangunan. Untuk implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan sesuai dengan bidang-bidang yang akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan perangkat daerah yang ada di sertai dengan kebutuhan pendanaan. Program dan indikator kinerja tersebut di kelompokkan ke dalam 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan,

Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Seiring dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik maka perlu dirumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, untuk itu masing-masing program diikuti dengan kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam program selama lima tahun kedepan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1 untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 8.1.Indikasi Rencana Program PrioritasYang Disertai Kebutuhan Pendanaan Untuk Urusan Wajib

No	Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah 2014-2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2014) Juta	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019		
				RP (Juta)/ Outcome						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN WAJIB										
1	Pendidikan									
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pendidikan Tersedianya Fasilitas Pendidikan 	212 • 2 Keg. • 1 paket	223 • 2 Keg. • 1 paket	234 • 2 Keg. • 1 paket	245 • 2 Keg. • 1 paket	258 • 2 Keg. • 1 paket	271 • 2 Keg. • 1 paket	1231	Dikpora
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan Dasar : - APS SD - APM SD/MI/Paket A - Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah - Rasio Guru/Murid - Rasio Guru/Murid per kelas Pendidikan Menengah : - APS SMP - APM SMP/MTs/Paket B	17.389 97,50 92,50 170 4,17 89,54 83,50	18.258 98,00 93,70 160 38 4,38 90,00 84,70	19.171 98,50 94,50 150 36 4,63 91,00 86,40	20.130 98,62 96,50 140 34 4,90 92,00 88,64	21.136 98,74 98,50 130 32 5,20 93,00 91,30	22.193 99,00 99,50 120 30 5,56 94,00 93,20	22.193 99,00 99,50 120 30 5,56 94,00 93,20	Dikpora
3	Program Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - APS SMA APM SMA/SMK/Paket C 	66,00 54,50	13000 67,00 56,70	14000 68,00 58,50	15000 69,00 61,40	16000 70,00 63,70	17000 71,00 66,30	75000	Dikpora
4	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan Kualitas & Fasilitas Pend.Non Formal	96 3 Keg.	101 3 Keg.	106 3 Keg.	111 3 Keg.	117 3 Keg.	123 3 Keg.	558	Dikpora
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Peningkatan Pembinaan Pend. & tenaga Kependidikan	878 1 Tahun	922 1 Tahun	968 1 Tahun	1016 1 Tahun	1067 1 Tahun	1121 1 Tahun	5104	Dikpora

6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelayanan & Operasional Pendidikan Gratis, BOS, & Operasional Pendidikan Lainnya	33.331 1 Tahun	40000 1 Tahun	45000 Tahun	50000 1 Tahun	55000 1 Tahun	60000 1 Tahun	250000 1 Tahun	Dikpora
II Kesehatan										
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	• Tersedianya Obat & perbekalan Kesehatan (21 PKM)	6000 5 Keg.	1590 4 Keg./21 PKM	9180 4 Keg./21 PKM	11020 4 Keg./21 PKM	13224 4 Keg./21 PKM	15868 4 Keg./21 PKM	50882 4 Keg./21 PKM	Dinkes
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (21 Kec.)	20048 21 Kec.	15313 21 Kec	16266 21 Kec	17316 21 Kec	18498 21 Kec	20053 21 Kec	20053 21 Kec	Dinkes, RSUD Batara Guru
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	• Terlaksananya Upaya Pengawasan Obat & Makanan (21 Kec)	18	34 3 Keg./21 Kec.	37 3 Keg./21 Kec.	39 3 Keg./21 Kec.	45 3 Keg./21 Kec.	50 3 Keg./21 Kec.	205 3 Keg./21 Kec.	Dinkes
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	• Terlaksananya Penyuluhan/Promosi Efektif	555 6 Keg.	405 10 Keg.	330 8 Keg.	446 9 Keg.	420 9 Keg.	527 9 Keg.	2128 10 Keg.	Dinkes
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	• Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	125 21 Kec.	342 5 Keg./21 Kec.	311 4 keg./21 Kec.	343 4 keg./21 Kec.	454 5 keg./21 Kec.	416 4 keg./21 Kec.	1889 4 keg./21 Kec.	Dinkes
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	• Menurunnya Angka kesakitan berbasis Lingkungan	139 21 Kec.	520 21 Kec.	571 21 Kec.	629 21 Kec.	692 21 Kec.	761 21 Kec.	3173 21 Kec.	Dinkes
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	• Menurunnya Angka Kesakitan/Kematian Akibat Penyakit Menular	893 21 Kec.	832 21 Kec./21 PKM	915 21 Kec./21 PKM	1008 21 Kec./21 PKM	1107 21 Kec./21 PKM	1218 21 Kec./21 PKM	5080 21 Kec./21 PKM	Dinkes
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan	294 1 Tahun	296 1 Tahun	323 1 Tahun	265 1 Tahun	292 1 Tahun	321 1 Tahun	1497 1 Tahun	Dinkes, RSUD Batara Guru
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	• Meningkatnya Sarana & Prasana Pendukung Kesehatan	6.803 1 Tahun	8493 1 Tahun	9341 1 Tahun	10277 1 Tahun	10633 1 Tahun	12431 1 Tahun	51175 1 Tahun	Dinkes
10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	• Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (5 Thn Keg.)	5195 1 Thn Keg.	15000 1 Thn Keg.	15500 1 Thn Keg.	16000 1 Thn Keg.	16500 1 Thn Keg.	17000 1 Thn Keg.	80000 5 Thn Keg.	Dinkes, RSUD Batara Guru

11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan anak	• Meningkatkan Perbaikan Layanan Kesehatan Ibu & Anak	327 1 Tahun	343 1 Tahun	361 1 Tahun	379 1 Tahun	397 1 Tahun	417 1 Tahun	1897 1 Tahun	Dinkes
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	10 7 Keg.	504 7 Keg.	552 7 Keg.	609 7 Keg.	669 7 Keg.	736 7 Keg.	3070 7 Keg.	Dinkes
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		443 21 Kec.	508 21 Kec.	558 21 Kec.	613 21 Kec.	644 21 Kec.	2766 21 Kec.	Dinkes
14	Program Peningkatan Pelayanan Rujukan	• Meningkatkan Manajemen Sistem Rujukan		17 21 PKM	48 21 PKM	21 21 PKM	23 21 PKM	62 21 PKM	171 21 PKM	Dinkes
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	• Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	15 1 Keg.	16 1 Keg.	17 1 Keg.	17 1 Keg.	18 1 Keg.	19 1 Keg.	87 1 Keg.	RSUD Batara Guru
16	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	• Meningkatkan Sarana & Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (5 Thn Keg.)	4.684 1 Thn Keg.	4.918 1 Thn Keg.	5.164 1 Thn Keg.	5.422 1 Thn Keg.	5.693 1 Thn Keg.	5.978 1 Thn Keg.	27175 5 Thn Keg.	RSUD Btr Guru
17	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	• Terpeliharanya Sarana & Prasarana kesehatan Rumah Sakit (5 Thn Keg.)	512 1 Thn Keg.	538 1 Thn Keg.	564 1 Thn Keg.	593 1 Thn Keg.	622 1 Thn Keg.	653 1 Thn Keg.	2970 5 Thn Keg.	RSUD Btr Guru
18	Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	• Meningkatkan Pelayanan Tenaga Kesehatan (5 Thn Keg.)	3.770 1 Thn Keg.	3.816 1 Thn Keg.	3.912 1 Thn Keg.	4.010 1 Thn Keg.	4.110 1 Thn Keg.	4.213 1 Thn Keg.	20061 5 Thn Keg.	Dinkes, RSUD Batara Guru
19	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	• Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kesehatan		277 4 Keg.	134 2 Keg.	299 3 keg.	200 3 keg.	178 3 keg.	1088 4 keg.	Dinkes
20	Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan	• Menurunnya Angka Kesakitan/Kematian Ibu Melahirkan		133 4 Keg.	147 4 Keg.	97 3 Keg.	106 3 Keg.	116 3 Keg.	599 3 Keg.	Dinkes
21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Minuman Keras dan HIV AIDS	• Tertanggulangnya Penderita Narkoba, Miras, dan HIV AIDS	36 1 Tahun	50 1 Tahun	55 1 Tahun	60 1 Tahun	65 1 Tahun	70 1 Tahun	300 1 Tahun	Sekretariat Daerah, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinkes
22	Program Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	• Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan (3 Keg.)		110 3 keg.	120 3 keg.	132 3 keg.	145 3 keg.	160 3 keg.	667 3 keg.	Dinkes

23	Program Peningkatan Pelayanan KB	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Cakupan & Pelayanan Akseptor KB 		70 2 Keg.	78 2 Keg.	86 2 Keg.	94 2 Keg.	104 2 Keg.	328 2 Keg.	Dinkes
24	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, Pengadaan Peralatan & Obat-Obatan Rumah Sakit (1 Thn Keg.) 		4000 1 Thn Keg.	4100 1 Thn Keg.	4200 1 Thn Keg.	4300 1 Thn Keg.	4400 1 Thn Keg.	21000 5 Thn Keg.	RSUD Batara Guru
III Pekerjaan Umum										
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunannya Infrastruktur Jalan 1000 Km Terbangunannya Infrastruktur Jembatan 100 Unit Presentase Panjang Jalan Aspal Dengan Kualitas Baik (%) 	20.192 4.317	28.000 200 km 11.000 20 unit 13000 57%	31.000 200 km 12.000 20 unit 15000 58%	34.000 200 km 13.000 20 unit 17000 59%	37.000 200 km 14.000 20 unit 18000 60%	40.000 200 km 15.000 20 unit 20000 61%	170000 1000 km 65929 100 unit 83000 61%	Dinas Bina Marga
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Panjang Jalan dalam keadaan baik Persentase Jumlah/Unit Jembatan Dalam Kondisi Baik (%) Pemeliharaan Rutin & Pemeliharaan Periodik (%) 	13.105 27%	11000 29% 3500 86% 40 1 Thn Keg.	12000 30% 4500 87% 45 1 Thn Keg.	13000 31% 5500 88% 50 1 Thn Keg.	14000 32% 6500 89% 55 1 Thn Keg.	15000 33% 7500 90% 60 1 Thn Keg.	65000 33% 27500 90% 650 5 Thn Keg.	Dinas Bina Marga
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Terpeliharanya Jalan & Jembatan (5 Thn Keg.) 	349	366 1 Thn Keg.	385 1 Thn Keg.	404 1 Thn Keg.	424 1 Thn Keg.	445 1 Thn Keg.	2024 5 Thn Keg.	Dinas Bina Marga
4	Program Pembangunan Turap / Talud Bronjong	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (5 Thn Keg.) 		250 1 Thn Keg.	300 1 Thn Keg.	350 1 Thn Keg.	400 1 Thn Keg.	450 1 Thn Keg.	1750 5 Thn Keg.	Dinas Bina Marga
5	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Bronjong	<ul style="list-style-type: none"> Rehab/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong (5 Thn Keg.) 		150 1 Thn Keg.	175 1 Thn Keg.	200 1 Thn Keg.	225 1 Thn Keg.	250 1 Thn Keg.	1000 5 Thn Keg.	Dinas Bina Marga

6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Sarana & Prasarana Permukiman (5 Thn Keg.) • Pengadaan, • Pemeliharaan & Operasional Alat Berat (5 Thn Keg) 	2.222 1 Tahun	300 1 Thn Keg. 1200 1 Thn Keg.	350 1 Thn Keg. 1300 1 Thn Keg.	400 1 Thn Keg. 1400 1 Thn Keg.	450 1 Thn Keg. 1500 1 Thn Keg.	500 1 Thn Keg. 1600 1 Thn Keg.	2000 5 Thn Keg. 7000 5 Thn Keg.	Dinas Bina Marga, PSDA
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sistem Pengelolaan Jaringan Pengairan 	11685 1 Tahun	12269 1 Tahun	12883 1 Tahun	13527 1 Tahun	14203 1 Tahun	14913 1 Tahun	67795 1 Tahun	PSDA
8	Program Penyediaan & Pengelolaan Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sumber Air untuk irigasi (5 Thn Keg.) 		710 1 Thn Keg.	1180 1 Thn Keg.	1155 1 Thn Keg.	550 1 Thn Keg.	575 1 Thn Keg.	4170 5 Thn Keg.	PSDA
9	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Air (Keg.) 		520 2 Keg.	30 1 Keg.	550 2 Keg.	50 1 Keg.	550 2 Keg.	1700 2 Keg.	PSDA
10	Program Pengendalian Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bahaya Banjir (Thn Keg) 		2810 1 Tahun	5230 1 Tahun	7980 1 Tahun	4530 1 Tahun	5780 1 Tahun	23520 1 Tahun	PSDA
11	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan & Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Thn Keg.) 	3705	3890 1 Thn Keg.	4085 1 Thn Keg.	4289 1 Thn Keg.	4503 1 Thn Keg.	4729 1 Thn Keg.	21476 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana & Prasarana Air Minum 	6426 1 Tahun	6747 1 Tahun	7085 1 Tahun	7439 1 Tahun	7811 1 Tahun	8201 1 Tahun	37283 1 Tahun	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
IV Perumahan										
1	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunannya Saluran Drainase/Gorong-gorong (1 Thn Keg.) 	3705 1 Thn Keg.	3798 1 Thn Keg.	3893 1 Thn Keg.	4080 1 Thn Keg.	4182 1 Thn Keg.	4287 1 Thn Keg.	20240 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan 	350 1 Tahun	359 1 Tahun	368 1 Tahun	378 1 Tahun	388 1 Tahun	398 1 Tahun	1891 1 Tahun	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang

3	Program Pengembangan Perumahan & Permukiman	• Pemb.PSU Perkim (1 Keg.)		300 1 Thn Keg.	310 1 Thn Keg.	320 1 Thn Keg.	330 1 Thn Keg.	340 1 Thn Keg.	1600 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	• Pengelolaan Areal Pemakaman (5 Thn Keg.)	295	310 1 Thn Keg.	325 1 Thn Keg.	341 1 Thn Keg.	359 1 Thn Keg.	377 1 Thn Keg.	1712 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
V Penataan Ruang										
1	Program Perencanaan Tata Ruang/Program Penataan Ruang	• Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang • Perencanaan Pengawasan Pengendalian Ruang	1.939	-	-	-	-	2.000	2.000	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	• Penataan Lingkungan Perkotaan & Perdesaan (5 Thn Keg.)	1599	850 1 Thn Keg.	900 1 Thn Keg.	950 1 Thn Keg.	1000 1 Thn Keg.	1050 1 Thn Keg.	4750 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	• Tertatanya Wilayah Permukiman Penduduk Perdesaan	35 1 Keg.	44 1 Keg.	45 1 Keg.	46 1 Keg.	47 1 Keg.	48 1 Keg.	230 1 Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Program Pengembangan Kota Hijau/Program Pemb.Sarana & Prasarana RTH	• Perencanaan,Pembangunan,Pemeliharaan & Implementasi Fisik RTH	2322 1 Thn Keg.	2380 1 Thn Keg.	2440 1 Thn Keg.	2501 1 Thn Keg.	2564 1 Thn Keg.	2628 1 Thn Keg.	12513 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Program Pemb.Sarana & Parasana Sanitasi	• Perencanaan,Pemb & Pengawasan Sanitasi (5 Thn Keg.)		2000 1 Thn Keg.	2100 1 Thn Keg.	2200 1 Thn Keg.	2300 1 Thn Keg.	2400 1 Thn Keg.	11000 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	• Pengembangan PPIP (5 Thn Keg.)		250 1 Thn Keg.	260 1 Thn Keg.	270 1 Thn Keg.	280 1 Thn Keg.	290 1 Thn Keg.	1350 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Program Gerakan Membangun Desa Menata Kota	• Gerakan Membangun Desa Menata Kota		200 1 Thn Keg.	250 1 Thn Keg.	300 1 Thn Keg.	350 1 Thn Keg.	400 1 Thn Keg.	1500 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang
8	Program Peningkatan Kualitas perumahan Layak Huni bagi MBR	• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS Kemenpera (5 Thn Keg.)		150 1 Thn Keg.	170 1 Thn Keg.	190 1 Thn Keg.	210 1 Thn Keg.	230 1 Thn Keg.	950 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang

VI	Perencanaan Pembangunan										
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang mempunyai Target, Tujuan & Sasaran Yang Jelas & Terukur (%) 	1.521	967 100 %	1025 100 %	1035 100 %	1045 100 %	1050 100 %	5122 100 %	Bappeda	
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (%) 	255	218 100 %	226 100 %	230 100 %	235 100 %	240 100 %	1149 100 %	Bappeda	
3	Program Perencanaan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya (%) 	43	25 100 %	30 100 %	35 100 %	40 100 %	45 100 %	175 100 %	Bappeda	
4	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya Penegasan Batas Wilayah Adm. Pemerintahan 		300 1 Thn Keg.	315 1 Thn Keg.	331 1 Thn Keg.	347 1 Thn Keg.	365 1 Thn Keg.	1658 5 Thn Keg.	Bappeda, Sekretariat Daerah	
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 		270 1 Thn Keg.	284 1 Thn Keg.	298 1 Thn Keg.	313 1 Thn Keg.	328 1 Thn Keg.	1493 5 Thn Keg.	Bappeda	
VII Perhubungan											
1	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat (10 Keg.)	626 -	3417 10 Keg.	3467 10 Keg.	3517 10 Keg.	3567 10 Keg.	3617 10 Keg.	17585 10 Keg.	Dinas perhubungan	

2	Program Peningkatan & Pengawasan Lalu Lintas	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> Traffic Light Marka Jalan 	493 2 Pasang 1 Paket	1000 2 Pasang 1 Paket	2650 2 Pasang 1 Paket	2700 2 Pasang 1 Paket	2750 2 Pasang 1 Paket	2800 2 Pasang 1 Paket	11900 2 Pasang 1 Paket	Dinas perhubungan
3	Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terpeliharanya Prasarana & Fasilitas LLAJ (7 Keg.)		2574 7 Keg.	1874 6 Keg.	1899 6 Keg.	1924 6 Keg.	1949 6 Keg.	10220 7 Keg.	Dinas perhubungan

4	Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan Darat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengembangan Tranportasi Darat (3 Keg.) 	474	- 600 3 Keg.	- 625 3 Keg.	- 650 3 Keg.	- 675 3 Keg.	- 700 3 Keg.	- 3250 3 Keg.	Dinas perhubungan
5	Program Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Angkutan	Tersedianya Sarana Transportasi Masyarakat Perdesaan/Terpencil (Unit Tranportasi)		950 Unit Transportasi	975 Unit Transportasi	1.000 Unit Transportasi	1025 Unit Transportasi	1050 Unit Transportasi	5000 Unit Transportasi	Dinas perhubungan
6	Program Peningkatan Kualitas & Disiplin SDM Aparatur Perhubungan Darat	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Kelengkapan Personil (Paket) 		60 1 Paket	62 1 Paket	64 1 Paket	66 1 Paket	68 1 Paket	320 5 Paket	Dinas perhubungan
7	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT : Program Pengadaan Sarana & Prasarana Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Persen Terbangunnya Pelabuhan Laut Belopa Tersedianya Sarana & Prasarana Perhub. Laut (3 Keg.) 	- 60%	21650 70% 3 Keg.	20750 75% 3 Keg.	21268 80% 3 Keg.	21800 85% 3 Keg.	22345 90% 3 Keg.	107813 90% 3 Keg.	Dinas perhubungan
8	Program Penataan Regulasi Bid. Perhubungan Laut	Sosialisasi & Penyusunan PERDA Sektor Perhub. Laut (2 Paket Keg.)		300 2 Paket Keg.	310 2 Paket Keg.	320 2 Paket Keg.	330 2 Paket Keg.	340 2 Paket Keg.	340 2 Paket Keg.	Dinas perhubungan
9	Program Peningkatan SDM Aparatur Perhub.Laut	<ul style="list-style-type: none"> Diklat & Peningkatan Disiplin Personil Perhub.Laut (3Paket Keg.) 		450 3Paket Keg.	475 3Paket Keg.	500 3Paket Keg.	525 3Paket Keg.	550 3Paket Keg.	2500 3Paket Keg.	Dinas perhubungan
10	BIDANG PERHUBUNGAN UDARA : Program Pengadaan Sarana & Prasarana Perhub. Udara	Persentase Terbangunnya Sarana Perparkiran Bandar Udara	0%	65 75%	75 95%	- -	- -	- -	140 95%	Dinas perhubungan
11	Program Pengembangan Sarana Komunikasi & Penyebarluasan Informasi Bid.Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Keg.Bidang Kominfo (9 Keg.) 		2390 9 Keg.	2440 9 Keg.	2490 9 Keg.	2540 9 Keg.	2590 9 Keg.	15450 9 Keg.	Dinas perhubungan
12	Program Peningkatan PAD Sektor Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan PAD TV Kabel (1 Keg.) 		150 1 Keg.	155 1 Keg.	160 1 Keg.	165 1 Keg.	170 1 Keg.	800 1 Keg.	Dinas perhubungan
13	Program Pembinaan & Pengawasan TV Kabel	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi TV Kabel (1 Keg.) 		90 1 Keg.	92 1 Keg.	94 1 Keg.	96 1 Keg.	98 1 Keg.	470 1 Keg.	Dinas perhubungan
14	Program Pengembangan SDM Bid.Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> Diklat Bidang Kominfo (1 Keg.) 		100 1 Keg.	105 1 Keg.	110 1 Keg.	115 1 Keg.	120 1 Keg.	550 1 Keg.	Dinas perhubungan

VIII	Lingkungan Hidup									
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sarana & Prasarana Persampahan : 5 Paket Keg./Thn 	2.744 Paket Keg./Thn	-	1630 8 Paket Keg./Thn	1500 7 Paket Keg./Thn	1650 7 Paket Keg./Thn	1600 7 Paket Keg./Thn	6380 29 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan : 49 Paket Keg./5 Thn 	191 Paket Keg./Thn	1830 12 Paket Keg.	652 11 Paket Keg.	675 11 Paket Keg.	600 10 Paket Keg.	725 10 Paket Keg..	4482 54 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Sumber Daya Alam Paket Keg./Thn 	110 1 Thn/Keg.	-	355 3 Paket Keg./Thn	360 3 Paket Keg./Thn	365 3 Paket Keg./Thn	370 3 Paket Keg./Thn	1450 12 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Data & Informasi Tentang Lingk.Hidup : Paket Keg./Thn 	97 Paket Keg.	48 3 Paket Keg./Thn	105 3 Paket Keg./Thn	120 3 Paket Keg./Thn	140 3 Paket Keg./Thn	155 3 Paket Keg./Thn	568 15 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Pengembangan & Pengawasan RTH Paket Keg./Thn 	229 Paket/Keg	207 2 Paket Keg./Thn	375 5 Paket Keg./Thn	390 5 Paket Keg./Thn	405 5 Paket Keg./Thn	415 5 Paket Keg./Thn	1792 22 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
6	Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan & Rehabilitasi Sumber Daya Alam Paket Keg./Thn 	79 2 Paket Keg./Thn	300 6 Paket Keg./Thn	450 6 Paket Keg./Thn	510 6 Paket Keg./Thn	540 6 Paket Keg./Thn	1879 26 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup	
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	<ul style="list-style-type: none"> Pengujian Emisi/Polusi & Pencemaran Limbah Paket Keg./Thn 		-	225 3 Paket Keg./Thn	230 3 Paket Keg./Thn	235 3 Paket Keg./Thn	240 3 Paket Keg./Thn	930 12 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup

8	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Konservasi Laut Paket Keg./Thn 		-	100 1 Paket Keg./Thn	105 1 Paket Keg./Thn	110 1 Paket Keg./Thn	115 1 Paket Keg./Thn	430 4 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata
9	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Persentase Terbangunnya Sanitasi di Wilayah permukiman (%)	380 45%	399 50%	419 55%	440 60%	462 65%	485 70%	2205 70%	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
10	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana	Terehabilitasinya Sarana & Prasarana Pasca Bencana : 1 Thn/Keg.	1286 1 Thn/Keg.	1350 1 Thn/Keg.	1418 1 Thn/Keg.	1489 1 Thn/Keg.	1563 1 Thn/Keg.	1641 1 Thn/Keg.	7461 1 Thn/Keg.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terbangunnya Sarana Armada Kebakaran Kabupaten : Unit Pemadam	2.177	2231 1 Unit Pemadam	2287 1 Unit Pemadam	2344 1 Unit Pemadam	2400 1 Unit Pemadam	2460 1 Unit Pemadam	11722 1 Unit Pemadam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Ekosistem & Laut (Paket Keg./Thn) 		100 1 Paket Keg./Thn	-	105 1 Paket Keg./Thn	-	110 1 Paket Keg./Thn	315 3 Paket Keg./5 Thn	Badan Lingkungan Hidup
13	Program Pengembangan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 Paket Keg. 		160 1 Paket Keg.	165 1 Paket Keg.	170 1 Paket Keg.	175 1 Paket Keg.	180 1 Paket Keg.	850 5 Paket Keg.	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
IX Pertanahan										
1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Tanah Pemerintah (5 Thn Keg.) 		550 1 Thn Keg.	578 1 Thn Keg.	593 1 Thn Keg.	608 1 Thn Keg.	624 1 Thn Keg.	2953 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
X Kependudukan dan Catatan Sipil										
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah KTP, KK & Akta Capil Data Capil 	654	- 720 1 Paket	- 792 1 Paket	- 871 1 Paket	- 985 1 Paket	- 1054 1 Paket	- 4395 1 Paket	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				50 1 Paket	55 1 Paket	60 1 Paket	66 1 Paket	73 1 Paket	305 1 Paket	

		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Kependudukan Monev Kependudukan Mobilitas Penduduk Pendetang 		100 1 Thn	121 1 Thn	133 1 Thn	146 1 Thn	161 1 Thn	661 5 Thn	
				68 1 Thn	74 1 Thn	82 1 Thn	90 1 Thn	99 1 Thn	413 5 Thn	
				50 1 Keg.	60 1 Keg.	70 1 Keg.	80 1 Keg.	90 1 Keg.	350 5 Keg.	
XI	Pemberdayaan Perempuan									
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran Perempuan & Anak (2 Keg.) 	257	60 2 Keg.	62 2 Keg.	64 2 Keg.	66 2 Keg.	68 2 Keg.	320 2 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Organisasi Kewanitaan (1 Keg.) 	135	50 1 Keg	52 1 Keg	54 1 Keg	56 1 Keg	58 1 Keg	270 1 Keg	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
3	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya SDM Perempuan (3 Kegiatan) 	171	135 3 Keg.	140 3 Keg.	145 3 Keg.	150 3 Keg.	155 3 Keg.	725 3 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kesetaraan Gender (6 keg.) 	381	338 6 keg.	343 6 keg.	348 6 keg.	353 6 keg.	358 6 keg.	1740 6 keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
5	Program Pembangunan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data & Informasi (1 Thn) 	25	26 1 Thn	28 1 Thn	29 1 Thn	30 1 Thn	32 1 Thn	145 5 Thn	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
6	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Nilai-Nilai Perjuangan Wanita (1 Keg.) 		60 1 Keg.	62 1 Keg.	64 1 Keg.	66 1 Keg.	68 1 Keg.	320 1 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup & perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Keluarga Berkualitas (1 Keg.) 		35 1 Keg.	35 1 Keg.	40 1 Keg.	40 1 Keg.	45 1 Keg.	205 1 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

8	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Remaja (2 Keg.) 		50 2 Keg.	52 2 Keg.	54 2 Keg.	56 2 Keg.	58 2 Keg.	270 2 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Keluarga Sejahtera (2 Keg.) 		60 2 Keg.	62 2 Keg.	64 2 Keg.	66 2 Keg.	68 2 Keg.	320 2 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
10	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Masalah Sosial Keluarga (1 Keg.) 		30 1 Keg.	32 1 Keg.	34 1 Keg.	36 1 Keg.	38 1 Keg.	170 1 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
XII	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	Program Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Akseptor KB (13 Keg.) Pengadaan Kantor PPLLKB/UPT KB (1 Unit) 		500 13 Keg. 800 1 Unit	505 13 Keg. - -	510 13 Keg. - -	515 13 Keg. - -	520 13 Keg. - -	2550 13 Keg. 800 1 Unit	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengetahuan Remaja (3 Keg.) 	122	- 100 3 Keg.	- 105 3 Keg.	- 110 3 Keg.	- 115 3 Keg.	- 120 3 Keg.	- 532 3 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
3	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi & Penguatan Data (10 Keg.) 	189	400 10 Keg.	405 10 Keg.	410 10 Keg.	415 10 Keg.	420 10 Keg.	2050 10 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
4	Program Pelayanan Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi (8 Keg.) 		600 8 Keg.	605 8 Keg.	610 8 Keg.	615 8 Keg.	620 8 Keg.	3050 8 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
5	Program Pengembangan Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Anak & Balita (4 Keg.) 		160 4 Keg.	165 4 Keg.	170 4 Keg.	175 4 Keg.	180 4 Keg.	850 4 Keg.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
XIII	Sosial									

1	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Data Base PMKS (%) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Jumlah Rumah) Pemberdayaan KAT (%) Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin (%) Peningkatan KUBE (%) 	1.063	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				100	118	130	142	154	514		
				65%	65%	65%	65%	65%	65%		
			1063	1063	1113	1163	1213	1263	5815		
			100 Rumah	500 Rumah							
				50	52	54	56	58	270		
				65%	65%	65%	65%	65%	65%		
				35	37	39	41	43	195		
				65%	65%	65%	65%	65%	65%		
				50	52	54	56	58	270		
				70%	70%	70%	70%	70%	70%		
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi Bencana (%) Rehabilitasi TMP (Paket) Pendampingan PKH (%) Sosialisasi Bahaya Eksploitasi Perdagangan Perempuan (%) Bantuan JSLU (%) Peningkatan Kapasitas Tagana (Jumlah Org) Penyediaan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana (Paket) 	489	180	185	190	195	200	950		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				80%	80%	80%	80%	80%	80%		
				100	105	110	115	120	550		
				1 Paket							
				250	255	260	265	270	1300		
				65%	65%	65%	65%	65%	65%		
				50	52	54	56	58	270		
				60%	60%	60%	60%	60%	60%		
				100	120	140	160	180	700		
				60%	60%	60%	60%	60%	60%		
				50	52	54	56	58	270		
				35 Org							
				100	105	110	115	120	550		
				3 paket							
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Penyandang Cacat (%) Bantuan Penyandang Cacat Berat & Usia Lanjut (100 Org/Thn) 		70	73	76	79	82	380		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				70%	70%	70%	70%	70%	70%		
				1000	1100	1200	1300	1400	6000		
				100 Org							
4	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Kesejahteraan Panti Asuhan (9 Panti) 		140	210	220	230	240	1040		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				12 Panti							

5	Pembinaan EKS Penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi & Konseling Penyakit Sosial (1 Thn) 	32	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Karang Taruna (3 Keg.) Pemberdayaan PSM & TKSK (%) Sosialisasi LK3 (%) Data Base Fakir Miskin (%) 	67	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Anak terlantar (Thn) 		85	89	94	98	103	469	5 Thn	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah
XIV Tenaga Kerja											
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Mutu SDM Bagi Pencari Kerja (1 Thn) 	735	772	810	851	893	938	4264	5 Thn	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pelatihan Tenaga Kerja, Dikpora, Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Bursa Kerja Online (%) Pelaksanaan Sosialisasi (%) 	29	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (23 Kec.) Pembinaan/Penegakan Norma Ketenagakerjaan (60 Perusahaan) Sosialisasi UU 	17	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

		Ketenagakerjaan (1 kali/Thn)									
4	Program Pendidikan & Pelatihan Bagi Pencari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Diklat Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (4223/5 Thn) 		1307 591 Org	1595 720 Org	1938 896 Org	2098 976 Org	2213 1040 Org	9151 4223 Org	Kantor Pelatihan Tenaga kerja Kab. Luwu	
XV Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan & Pelatihan UMKM 	59	- 60 50 UMKM	- 62 50 UMKM	- 64 50 UMKM	- 66 50 UMKM	- 68 50 UMKM	- 258 250 UMKM	Dinas Koperindag,	
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Bergulir UMKM. Sarana/Prasarana Produksi UMKM Promosi Produk UMKM 	122	350 490 UMKM 2 Unit 2 Kali	400 490 UMKM 2 Unit 2 Kali	450 490 UMKM 3 Unit 2 Kali	500 490 UMKM 3 unit 2 Kali	550 490 UMKM 3 unit 2 Kali	2250 490 UMKM 13 Unit 10 Kali	Dinas Koperindag,	
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koperasi Yang Dibina 	95	95 300 Unit	100 300 Unit	105 400 Unit	110 400 Unit	115 400 Unit	525 400 Unit	Dinas Koperindag,	
4	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Pelaku UMKM 500 Org. Pembangunan Galery Produk UMKM (1 Unit) Pembinaan UMKM 		125 100 Org. 400 1 Unit 35 Keg/Thn	145 100 Org. 150 40 Keg/Thn	150 100 Org. - 45 Keg/Thn	155 100 Org. - 50 Keg/Thn	160 100 Org. - 55 Keg/Thn	735 500 Org. 550 1 Unit 225 Keg/Thn	Dinas Koperindag,	
XVI Penanaman Modal Daerah											
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kerjasama Investasi & Promosi (5 Thn Keg.) 		200 1 Thn Keg.	210 1 Thn Keg.	220 1 Thn Keg.	230 1 Thn Keg.	240 1 Thn Keg.	1100 5 Thn Keg.	BP3M	

2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	• Koordinasi & Profil Investasi Daerah (5 Thn Keg.)		350 1 Thn Keg.	355 1 Thn Keg.	360 1 Thn Keg.	365 1 Thn Keg.	370 1 Thn Keg.	1800 5 Thn Keg.	BP3M
3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	• Peningkatan Investasi Daerah (5 Thn Keg.)		250 1 Thn Keg.	260 1 Thn Keg.	270 1 Thn Keg.	280 1 Thn Keg.	290 1 Thn Keg.	1350 5 Thn Keg.	BP3M
4	Program Peningkatan Pelayanan Kepada Pelaku Ekonomi Dalam Hal Perizinan	• Peningkatan Pelayanan Perizinan (5 Thn Keg.)		150 1 Thn Keg.	158 1 Thn Keg.	165 1 Thn Keg.	174 1 Thn Keg.	182 1 Thn Keg.	679 5 Thn Keg.	BP3M
5	Program Penguatan Kualitas Perizinan Non Perizinan & Penanaman Modal	• Sosialisasi & Koordinasi Pelayanan Perizinan (5 Thn Keg.)		190 1 Thn Keg.	195 1 Thn Keg.	200 1 Thn Keg.	205 1 Thn Keg.	210 1 Thn Keg.	1000 5 Thn Keg.	BP3M
6	Program Pengendalian & Pengawasan Perizinan	• Koordinasi & Penyusunan Data Base Perizinan & Penanaman Modal (5 Thn Keg.)		100 1 Thn Keg.	105 1 Thn Keg.	110 1 Thn Keg.	115 1 Thn Keg.	120 1 Thn Keg.	550 5 Thn Keg.	BP3M
XVII Kebudayaan										
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	• - • Pelestarian & Penguatan Lembaga Adat & Budaya Lokal Daerah (3 Keg.)	50	- 1000 3 Keg.	- 250 1 Keg.	- 1200 3 Keg.	- 300 3 Keg.	- 300 3 Keg.	- 3050 3 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	• - • Peningkatan Kelestarian Sejarah Purbakala Lokal & Lembaga Adat (8 Keg.)	55	- 1400 8 Keg.	- 75 1 Keg.	- 525 8 Keg.	- 100 1 Keg.	- 2000 8 Keg.	- 4100 8 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	• - • Pengembangan Budaya Daerah (5 Keg.)	270	- 530 5 Keg.	- 450 2 Keg.	- 1100 5 Keg.	- 550 2 Keg.	- 1070 4 Keg.	- 3700 5 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	• Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya Tradisional (3 Keg.)		380 3 Keg.	200 1 Keg.	470 3 Keg.	200 1 Keg.	500 3 Keg.	1750 3 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

XVIII	Pemuda dan Olah Raga										
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kepemudaan	• Pengembangan Kepemudaan (1 Thn)	213	225 1 Thn	250 1 Thn	275 1 Thn	300 1 Thn	325 1 Thn	1375 5 Thn	Dikpora	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	• Peningkatan Sarana & Prasarana Olah Raga (5 Thn Keg.)	483	500 1 Thn Keg.	550 1 Thn Keg.	600 1 Thn Keg.	650 1 Thn Keg.	700 1 Thn Keg.	3000 5 Thn Keg.	Dikpora	
3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	• Pelatihan Paskibraka Tk. Kab, Tk.Prov dan Tk.Pusat (1 Thn)	253	300 1 Thn	308 1 Thn	316 1 Thn	324 1 Thn	333 1 Thn	1581 5 Thn	Dikpora	
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	• Pembinaan Klub, Kejurda, Liga Pelajar, Olympiade Olah Raga (1 Thn)	314	300 1 Thn	308 1 Thn	316 1 Thn	324 1 Thn	333 1 Thn	1581 5 Thn	Dikpora, Sekretariat Daerah	
5	Program Pembinaan Kepemudaan	• Workshop/Pelatihan Pemuda	29	50 1 Thn	53 1 Thn	55 1 Thn	58 1 Thn	61 1 Thn	277 5 Thn	Dikpora	
XIX	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat										
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	• - • Operasi Penertiban & Penegakan PERDA (5 Thn Keg.)	511	- 315 1 Thn Keg.	- 332 1 Thn Keg.	- 340 1 Thn Keg.	- 350 1 Thn Keg.	- 355 1 Thn Keg.	- 1692 5 Thn Keg.	Badan KESBANG LINMAS, Satpol PP	
2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	• - • Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat (6 Keg.)	588	- 890 6 Keg.	- 1110 6 Keg.	- 1285 6 Keg.	- 1385 6 Keg.	- 1570 6 Keg.	- 6240 6 Keg.	Badan KESBANG LINMAS, Satpol PP	
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	• - • Pembinaan Wawasan Kebangsaan Masyarakat (7 Keg.)	114	- 690 7 Keg.	- 770 7 Keg.	- 825 7 Keg.	- 670 6 Keg.	- 950 7 Keg.	- 3905 7 Keg.	Badan KESBANG LINMAS	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	• Sistim Keamanan Swakarsa (1 Thn)	231	243 1 Thn	255 1 Thn	267 1 Thn	281 1 Thn	295 1 Thn	1341 5 Thn	Badan KESBANG LINMAS	

5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan & Pengembangan Politik Masyarakat (11 Keg.) 	135	- 360 4 Keg.	- 501 4 Keg.	- 713 6 Keg.	- 945 8 Keg.	- 885 6 Keg.	- 3404 11 Keg.	Badan KESBANG LINMAS
6	Program Peningkatan Kualitas Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pejabat, Pengamanan Aset & Pelaksanaan Upacara Sipil (3 Keg.) 	868	926 3 Keg.	938 3 Keg.	943 3 Keg.	950 3 Keg.	950 3 Keg.	4707 3 Keg.	Satpol PP
7	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi & Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol (5 Thn) 		40 1 Thn	42 1 Thn	44 1 Thn	46 1 Thn	48 1 Thn	220 5 Thn	Badan KESBANG
8	Program Penikatan Kinerja PPNS	<ul style="list-style-type: none"> Operasional PPNS (1 Keg. 25 Org.) 		120 25 Org.	125 25 Org.	130 25 Org.	135 25 Org.	140 25 Org.	650 125 Org.	Satpol PP
XX	Pemerintahan Umum									
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Operasional DPRD (5 Thn Keg.) 	7216	7577 1 Thn Keg.	7956 1 Thn Keg.	8553 1 Thn Keg.	8771 1 Thn Keg.	9210 1 Thn Keg.	41867 5 Thn Keg.	Sekretariat DPRD
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (5 Thn Keg.) 	2.719	3000 1 Thn Keg.	3100 1 Thn Keg.	3200 1 Thn Keg.	3300 1 Thn Keg.	3400 1 Thn Keg.	16000 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan & Pengembangan Pengelolaan ADM Keuangan Daerah (5 Thn Keg.) 	4.975	4980 1 Thn Keg.	4985 1 Thn Keg.	4990 1 Thn Keg.	4995 1 Thn Keg.	5000 1 Thn Keg.	24950 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPKD
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Majelis TPTGR & Pengawasan Internal Secara Berkala (5 Thn Keg.) 	1211	1550 1 Thn Keg.	1600 1 Thn Keg.	1650 1 Thn Keg.	1700 1 Thn Keg.	1750 1 Thn Keg.	8250 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPKD
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek Pengembangan Aparatur Pengawas (5 Thn Keg.) 		250 1 Thn Keg.	260 1 Thn Keg.	270 1 Thn Keg.	280 1 Thn Keg.	290 1 Thn Keg.	1350 5 Thn Keg.	Inspektorat

6	Program Peningkatan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LHP) 		850 93 LHP	970 93 LHP	1065 93 LHP	1170 93 LHP	1260 93 LHP	5315 93 LHP	Inspektorat
7	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Keuangan Akuntabilitas SKPD Pemkab. (50 Laporan) 		161 10 Laporan	178 10 Laporan	192 10 Laporan	207 10 Laporan	220 10 Laporan	958 50 Laporan	Inspektorat
8	Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan 7 pemuakhiran Data TLHP (30 Laporan) 		400 6 Laporan	470 6 Laporan	517 6 Laporan	568 6 Laporan	624 6 Laporan	2579 30 Laporan	Inspektorat
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan & Penilaian Angka Kredit Aparatur Pengawas (Org) 		300 82 Org	325 82 Org	360 82 Org	393 82 Org	420 82 Org	1798 410 Org	Inspektorat
10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (5 Thn Keg.) 	148	155 1 Thn Keg.	163 1 Thn Keg.	171 1 Thn Keg.	180 1 Thn Keg.	189 1 Thn Keg.	858 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah (5 Thn Keg.) 	450	473 1 Thn Keg.	496 1 Thn Keg.	521 1 Thn Keg.	547 1 Thn Keg.	574 1 Thn Keg.	2611 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi & Pendukung Proses Pemekaran Daerah (5 Thn Keg.) 	250	252 1 Thn Keg.	254 1 Thn Keg.	256 1 Thn Keg.	258 1 Thn Keg.	260 1 Thn Keg.	1280 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
13	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5 Thn Keg.) 	2.233	2345 1 Thn Keg.	2462 1 Thn Keg.	2585 1 Thn Keg.	2714 1 Thn Keg.	2850 1 Thn Keg.	12956 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah, BPMD
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Kelembagaan, Fasilitasi, Pembinaan & Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan (5 Thn Keg.) 	417	420 1 Thn Keg.	422 1 Thn Keg.	424 1 Thn Keg.	426 1 Thn Keg.	428 1 Thn Keg.	2120 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
15	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Pengkoordinasian, Pengendalian & Evaluasi Tata Kelola Administrasi SDA (5 Thn Keg.) 	182	191 1 Thn Keg.	201 1 Thn Keg.	211 1 Thn Keg.	221 1 Thn Keg.	232 1 Thn Keg.	1056 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah

16	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi kemasyarakatan	• Monev, Pengawasan & Pengendalian Kebijakan Kemasyarakatan (5 Thn Keg.)	114	120 1 Thn Keg.	125 1 Thn Keg.	130 1 Thn Keg.	135 1 Thn Keg.	140 1 Thn Keg.	650 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
17	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	• Fasilitas & Pembinaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan (5 Thn Keg.)	5.017	5000 1 Thn Keg.	5050 1 Thn Keg.	5100 1 Thn Keg.	5150 1 Thn Keg.	5200 1 Thn Keg.	25500 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
18	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perekonomian	• Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Tugas Pemerintahan Bid.Perekonomian (5 Thn Keg.)	173	200 1 Thn Keg.	205 1 Thn Keg.	210 1 Thn Keg.	215 1 Thn Keg.	220 1 Thn Keg.	1050 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
19	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	• Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Tugas Pemerintahan Bid.Adm. Pemeritahan (5 Thn Keg.)	336	340 1 Thn Keg.	342 1 Thn Keg.	344 1 Thn Keg.	346 1 Thn Keg.	348 1 Thn Keg.	1720 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
20	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pembangunan	• Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Tugas Pemerintahan Bid.Adm. Pembangunan (5Thn Keg.)	456	455 1 Thn Keg.	457 1 Thn Keg.	459 1 Thn Keg.	461 1 Thn Keg.	463 1 Thn Keg.	2295 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
21	Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Humas dan Protokol	• Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Tugas Pemerintahan Bid.Adm.Humas & Protokol (5 Thn Keg.)		25 1 Thn Keg.	26 1 Thn Keg.	28 1 Thn Keg.	29 1 Thn Keg.	30 1 Thn Keg.	130 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah
23	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	• Penyediaan Layanan LPSE, Website Pemkab & Kehumasan (5 Thn Keg.)		425 1 Thn Keg.	430 1 Thn Keg.	435 1 Thn Keg.	440 1 Thn Keg.	445 1 Thn Keg.	2180 5 Thn Keg.	Sekretariat Daerah

24	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	• Koordinasi, Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah (5 Thn Keg.)	1211	1300 1 Thn Keg.	1325 1 Thn Keg.	1350 1 Thn Keg.	1375 1 Thn Keg.	1400 1 Thn Keg.	6750 5 Thn Keg.	DPKD
25	Program Eksentifikasi Pendapatan Daerah	• Koordinasi & Pengendalian, Peningkatan pendapatan Daerah (5 Thn Keg.)		70 1 Thn Keg.	74 1 Thn Keg.	77 1 Thn Keg.	81 1 Thn Keg.	85 1 Thn Keg.	387 5 Thn Keg.	DPKD
26	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi/Pajak Daerah (5 Thn Keg.)	492	550 1 Thn Keg.	575 1 Thn Keg.	600 1 Thn Keg.	625 1 Thn Keg.	650 1 Thn Keg.	3000 5 Thn Keg.	DPKD
27	Program Meteranisasi Wajib Pajak Air Tanah	• Pengadaan Peralatan (5 Thn Keg.)		25 1 Thn Keg.	30 1 Thn Keg.	35 1 Thn Keg.	40 1 Thn Keg.	45 1 Thn Keg.	175 5 Thn Keg.	DPKD
28	Program Peningkatan Kinerja, Fasilitasi & Pengembangan SDM	• Sosialisasi Peningkatan Kinerja Aparatur (5 Thn Keg.)		40 1 Thn Keg.	42 1 Thn Keg.	44 1 Thn Keg.	46 1 Thn Keg.	48 1 Thn Keg.	220 5 Thn Keg.	DPKD
XXI	Kepegawaian									
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• - • Diklat Kepegawain (1151 Org.)	814	- 5320 1031 Org	- 660 30 Org	- 670 30 Org	- 680 30 Org	- 700 30 Org	- 8030 1151 Org	BKD
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	• - • Pembinaan & Pengembangan Aparatur (13 keg.)	952	- 1105 14 keg.	- 1332 14 keg.	- 1381 14 keg.	- 1437 14 keg.	- 1511 14 keg.	- 6766 14 keg.	BKD, Kantor Pelatihan & Tenaga Kerja
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	• - • Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas/Pemeriksa (1 Thn)	220	- 231 1 Thn	- 243 1 Thn	- 255 1 Thn	- 267 1 Thn	- 281 1 Thn	- 1277 5 Thn	Inspektorat, Dikpora, Sekretariat Daerah, DPKD
4	Program Peningkatan Kinerja Fasilitasi & Pengembangan SDM	• Sosialisasi Peningkatan Kinerja SDM (1 Keg.)		50 1 Keg.	52 1 Keg.	54 1 Keg.	56 1 Keg.	58 1 Keg.	270 1 Keg.	Sekretariat KORPRI

5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur/pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan & Rehab. Sarana & Prasarana Pemerintahan 	12519 1 Tahun	10000 1 Thn Keg.	10100 1 Thn Keg.	10200 1 Thn Keg.	10300 1 Thn Keg.	10400 1 Thn Keg.	51000 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Sekretriari Daerah, BKD, Sekretriari Korpri
XXII	Pembangunan Masyarakat dan Desa									
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pendataan & Evaluasi Profil Desa/Kelurahan Berbasis Website	111	115 227 Desa/Kel	126 227 Desa/Kel	139 227 Desa/Kel	153 227 Desa/Kel	169 227 Desa/Kel	169 227 Desa/Kel	BPMD
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Pasar Desa Pembinaan & pengembangan BUMDes Peningkatan Manajemen Kelembagaan pasar Desa 	189	550 1 Keg. 140 3 Keg.	605 1 Keg. 336 4 Keg.	665 1 Keg. 99 2 keg.	732 1 Keg. 108 2 Keg.	805 1 Keg. 120 2 Keg.	805 1 Keg. 803 13 Keg.	BPMD
3	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan & Pengawasan ADD Perlombaan Desa Musyawarah pembangunan desa/Kel. Pengawasan Dana Desa Pemamfaatan Baruga Sayang 	1.375	195 207 Desa 143 207 Desa 38 227 desa/Kel. 195 207 Desa 55 1 Keg.	214 207 Desa 157 207 Desa 42 227 desa/Kel. 214 207 Desa 60 1 Keg.	236 207 Desa 173 207 Desa 46 227 desa/Kel. 236 207 Desa 66 1 Keg.	259 207 Desa 190 207 Desa 51 227 desa/Kel. 259 207 Desa 73 1 Keg.	285 207 Desa 209 207 Desa 56 227 desa/Kel. 285 207 Desa 80 1 Keg.	1189 207 Desa 872 207 Desa 233 227 desa/Kel. 1189 207 Desa 334 5 Keg.	BPMD
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Monev & Pelaporan Pemerintahan Desa Pelatihan & Pembinaan Peningkatan Kapasitas Desa 	687	43 207 Desa 1500 9 Keg.	48 207 Desa - -	52 207 Desa - -	58 207 Desa - -	63 207 Desa - -	201 207 Desa 1500 9 keg.	BPMD

5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Pokjandal Posyandu Workshop Perempuan Desa 		50 23 Kec. 40 1 Keg.	55 23 Kec. 45 1 Keg.	60 23 Kec. 50 1 Keg.	65 23 Kec. 55 1 Keg.	70 23 Kec. 60 1 Keg.	300 23 Kec. 250 5 Keg.	BPMD
6	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> - TTG Tk. Nasional Pelatihan TTG Perdesaan 	109	43 15 org. 100 1 Angk.	48 15 org. 110 1 Angk.	52 15 org. 121 1 Angk.	58 15 org. 133 1 Angk.	63 15 org. 146 1 Angk.	265 75 org. 610 5 Angk.	BPMD
XXIII Statistik										
1	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Data/Informasi/ Statistik Daerah (1 Thn) 	757	950 1 Thn	955 1 Thn	960 1 Thn	965 1 Thn	970 1 Thn	4800 5 Thn	Bappeda, BPS, ,Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan,Dinas Perumahan Tata Ruang & Cipta Karya
XIV Kearsipan										
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek kearsipan (1 Thn) 		60 1 Thn	70 1 Thn	80 1 Thn	90 1 Thn	100 1 Thn	400 5 Thn	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya naskah arsip dengan baik 	64	325 4 keg.	90 3 keg.	100 3 keg.	110 3 keg.	120 3 keg.	745 4 keg.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Program Pemberdayaan Perpustakaan Umum, Desa & Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana & Prasarana Perpustakaan (4 Keg.) 		2150 3 Keg.	2155 3 Keg.	2400 4 Keg.	2160 3 Keg.	2165 3 Keg.	11030 4 Keg.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perpustakaan (20 Keg.) 		1468 18 Keg.	1136 17 Keg.	1568 18 Keg.	1230 17 Keg.	1763 18 Keg.	7165 20 Keg.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

5	Program Peningkatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kearsipan	• Pengadaan Sarana & Prasarana Kearsipan (3 Keg.)		400 2 Keg.	150 1 Keg.	150 1 Keg.	1650 2 Keg.	160 1 Keg.	2510 3 Keg.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
6	Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	• Pembinaan Sistem Kearsipan (5 Keg.)		115 5 Keg.	125 5 Keg.	140 5 Keg.	151 5 Keg.	161 5 Keg.	691 5 Keg.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
XXV Komunikasi dan Informatika										
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penyiaran/Publikasi PEMDA LUWU	712 70%	748 75%	785 80%	824 85%	865 90%	909 95%	4131 95%	Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah,
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	Terbangunnya Penyebarluasan Info. Website Serta Pengawasan & Sosialisasi Internet : Paket Keg.	128 Paket Keg.	134 Paket Keg.	141 Paket Keg.	148 Paket Keg.	156 Paket Keg.	163 Paket Keg.	742 Paket Keg.	Dinas Perhubungan Kominfo
3	Program Peningkatan Pelayanan Informatika dan Telekomunikasi	Tersedianya Sistem Komunikasi Data Intranet & Internet	914 1 Tahun	960 1 Tahun	1.008 1 Tahun	1.058 1 Tahun	1.111 1 Tahun	1.167 1 Tahun	5340 5 Tahun	Dinas Perhubungan Kominfo
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terbangunnya Kerjasama Info. Dengan Media Massa	947 65%	994 70%	1.044 75%	1.096 80%	1.151 85%	1.209 90%	5.352 90%	RSUD Batara Guru, Sekretariat Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dishubkominfo, Diklat Naker, RSUD Batara Guru
5	Program Pengembangan Sarana Komunikasi & Penyebarluasan Informasi Bid.Kominfo	Terbangunnya Sarana Komunikasi Bid.Kominfo : Paket Keg.	-	2.000 9 Keg.	2.025 9 Keg.	2.050 9 Keg.	2.075 9 Keg.	2.100 9 Keg.	10.250 9 Keg.	Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Pemerintahan : Paket Keg.	-	60 Paket Keg.	63 Paket Keg.	66 Paket Keg.	69 Paket Keg.	73 Paket Keg.	331 Paket Keg.	Sekretariat daerah
7	Program Peningkatan PAD Sektor Komunikasi & Informatika	Persentase Peningkatan PAD TV Kabel		150 %	153 %	157 %	160 %	165 %	785 %	Dinas Perhubungan Kominfo

8	Program Pembinaan & Pengawasan Pengusaha TV Kabel	Terwujudnya kesadaran Masy. Tentang ketentuan Pengolaan TV Kabel : Paket Keg.		90 1 Keg.	92 1 Keg.	94 1 Keg.	96 1 Keg.	98 1 Keg.	470 1 Keg.	Dinas Perhubungan Kominfo
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------------------

Tabel 8.2.Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Untuk Urusan Pilihan

No	Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah 2014-2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal 2014 (Juta)	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN					Kondisi Kinerja Akhir 2019 (Juta)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2015	2016	2017	2018	2019		
				RP (Juta)/ Outcome						
URUSAN PILIHAN										
I	Urusan Pertanian									
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kompetensi & Kemandirian Petani ,Peternak & Nelayan (6 Paket Keg/Thn) Penyelenggaraan PENAS XIV (1 Kali) 	696	- 297 6 Paket Keg/Thn	- 219 6 Paket Keg/Thn	- 350 6 Paket Keg/Thn	- 211 6 Paket Keg/Thn	- 467 6 Paket Keg/Thn	- 1544 6 Paket Keg/Thn	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
				-	-	-	600 1 Kali	-	600 1 Kali	
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan (5 Keg.) Ketersediaan Pangan & Penanganan Kerawanan Pangan (2 Keg.) Jumlah Dokumen Data & Analisis Akses Pangan (3 Keg.) Skor Pola Pangan Harapan (Skor 95 Di Thn 2019) Pengembangan Keamanan Pangan Segar (2 Keg.) Koordinasi Ketahanan Pangan (1 Keg.) 	2.235	- 904 5 Keg.	- 964 5 Keg.	- 1027 5 Keg.	- 1087 5 Keg.	- 1152 5 Keg.	- 5134 5 Keg.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
				26 1 Keg.	28 1 Keg.	110 2 Keg.	32 1 Keg.	34 1 Keg.	230 2 Keg.	
				55 2 Keg.	56 2 keg.	57 2 keg.	238 3 Keg.	59 2 Keg.	465 3 Keg.	
				421 6 Keg.	472 6 Keg.	523 6 Keg.	595 6 Keg.	469 6 Keg.	2480 6 Keg.	
				42 2 Keg.	45 2 Keg.	48 2 Keg.	51 2 Keg.	54 2 Keg.	240 2 Keg.	
				25 1 Keg.	27 1 Keg.	29 1 Keg.	31 1 Keg.	33 1 Keg.	145 1 Keg.	
				1500	500	-	-	-	2000	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Balai Benih Tan.Pangan (1 Unit) • Pengembangan IKB Padi (1 Keg.) • Peningkatan Ketersediaan Pangan (3 Keg.) 		1 Unit						1 Unit	
				1400	1410	1420	1430	1440	7100		
				1 Keg.							
				400	410	420	430	440	2100		
				3 Keg.							
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • - • Ketersediaan Alsintan (1 Keg.) • Fasilitas Pelepasan Beras Unggul Lokal 	2.945	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				500	510	520	530	540	3150		
				1 Keg.							
				275	280	285	290	295	1425		
				1 Keg.							
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Pangan (3 Keg.) 	-	500	510	520	530	540	3150		Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan
				3 Keg.							
5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • - • Terciptanya Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kehutanan Yang Profesional (11 Keg.) 	2.260	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				1212	1159	1612	1254	1372	6609		
				11 Keg.	10 Keg.	11 Keg.	10 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> • - • Penurunan Penyakit Menular Ternak (%) 	87	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				170	175	180	185	190	900		
				10 %	8 %	6 %	4 %	2 %	2 %	2 %	
7	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertambahan Populasi Ternak (4 Keg.) 	1.124	1180	1239	1301	1366	1435	6551		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				4 Keg.							
8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • - • Pemeliharaan Kebun Induk Holtikultura 	186	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				75	77	79	81	83	395		
				1 Keg.							
9	Program Pematapan Sistem Penyuluhan Pertanian / Perikanan dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • - • Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian (2 Keg.) • Penyediaan Sarana & Psarana Balai Penyuluh (3 Keg.) 	413	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
				326	259	375	384	412	1756		
				2 Keg.							
				5700	4650	3350	3350	3150	20200		
				3 Keg.	3 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	3 Keg.	3 Keg.	

10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (1 Thn) 	6.485	- 2500 1 Thn Keg.	- 2550 1 Thn Keg.	- 2600 1 Thn Keg.	- 2650 1 Thn Keg.	- 2700 1 Thn Keg.	- 13000 1 Thn Keg.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
11	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya (WISMP-2) (1 Thn) 	413	434 1 Thn	455 1 Thn	478 1 Thn	502 1 Thn	527 1 Thn	2396 5 Thn	BAPPEDA,PSDA,Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan
12	Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Kelembagaan irigasi (WISMP-2) (1 Thn) 	124	400 1 Thn Keg.	410 1 Thn Keg.	415 1 Thn Keg.	420 1 Thn Keg.	425 1 Thn Keg.	2070 1 Thn Keg.	BAPPEDA,PSDA,Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan
13	Program Peningkatan Pengelolaan Lahan & Air	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana Pengelolaan Lahan & Air (6 Keg.) 		4000 6 Keg.	4100 6 Keg.	4200 6 Keg.	4300 6 Keg.	4400 6 Keg.	21000 6 Keg.	Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan
II Urusan Kehutanan										
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Rehabilitasi Hutan & Lahan (3 Keg.) 	965	300 3 Keg.	350 3 Keg.	400 3 Keg.	450 3 Keg.	500 3 Keg.	2000 3 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Perlindungan & Konservasi Hutan (17 Keg.) 	766	6895 17 Keg.	6900 17 Keg.	6905 17 Keg.	6910 17 Keg.	6915 17 Keg.	34525 17 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Kerusakan Hutan (1 Thn) 	1.202	- 700 1 Thn	- 750 1 Thn	- 800 1 Thn	- 850 1 Thn	- 900 1 Thn	- 4000 5 Thn	Kehutanan dan Perkebunan
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Hutan & Kemasyarakatan (2 Keg.) 	91	148 2 Keg.	162 2 Keg.	180 2 Keg.	196 2 Keg.	216 2 Keg.	902 2 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
5	Program Pemberdayaan Petani & Keluarganya	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Petani : Klp. Tani sasaran	- 0 Klp.	40 2 Klp/Thn	44 2 Klp/Thn	48 2 Klp/Thn	53 2 Klp/Thn	58 2 Klp/Thn	58 2 Klp/Thn	Kehutanan dan Perkebunan

6	Program Pengawasan & Pengamanan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengawasan & Pengamanan Hutan (3 Keg.) 		375 3 Keg.	412 3 Keg.	453 3 Keg.	498 3 Keg.	547 3 Keg.	2285 3 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
7	Program Pelayanan Perizinan & Peredaran Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pengawasan & Pengendalian Hasil Hutan (4 Keg.) 		40 4 Keg.	45 4 Keg.	50 4 Keg.	55 4 Keg.	60 4 Keg.	250 4 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
8	Program Optimalisasi Usaha Tani Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Perkebunan (4 Keg.) 		1030 4 Keg.	1133 4 Keg.	1245 4 Keg.	1369 4 Keg.	1506 4 Keg.	1506 4 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
9	Program Peningkatan Mutu Hasil & Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Hasil & Produksi (5 Keg.) 		800 5 Keg.	852 4 Keg.	937 4 Keg.	1030 4 Keg.	1159 5 Keg.	4778 5 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
10	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Organisme Pengganggu (4 Keg.) 		237 4 Keg.	260 4 Keg.	286 4 Keg.	314 4 Keg.	346 4 Keg.	1443 4 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
11	Program Peningkatan Prioritas Sumber Daya Petugas & Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM Petuga & Petani (3 Keg.) 		500 3 Keg.	550 3 Keg.	223 3 Keg.	245 3 Keg.	269 3 Keg.	1787 3 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
12	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana & Prasarana Perkebunan (4 Keg.) 		2230 4 Keg.	2233 2 Keg.	2456 2 Keg.	2701 2 Keg.	3171 4 Keg.	12791 4 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
13	Program Pelaksanaan Panen Pengolaan Hasil & Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengolaan Hasil & Pemasaran (3 Keg.) 		400 3 Keg.	440 3 Keg.	483 3 Keg.	531 3 Keg.	585 3 Keg.	2439 3 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
14	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi & Pemasaran Produk Unggulan Daerah (1 Keg.) 	120	180 1 Keg.	185 1 Keg.	190 1 Keg.	195 1 Keg.	200 1 Keg.	950 1 Keg.	Kehutanan dan Perkebunan
III	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • - • Regulasi Pertambangan & energi • Penertiban Tambang Liar • Monitoring & Pemetaan IUP 	66	75 1 Keg.	82 1 Keg.	90 1 Keg.	99 1 Keg.	109 1 Keg.	455 5 Keg.	Distamben
				50 1 Keg.	55 1 Keg.	60 1 Keg.	66 1 Keg.	73 1 Keg.	305 5 Keg.	
				60 2 Keg.	65 2 Keg.	72 2 Keg.	79 2 Keg.	87 2 Keg.	405 10 Keg.	

2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan PLTNH Desa Inventarisasi Energi & Ketenagalistrikan Pengembangan Energi Baru & Terbarukan Pengembangan & Intalasi Biogas Rumah Tangga Pemasangan Intalasi PLTS Peralatan Sarana Listrik Pedesaan Swadaya Daya Listrik Pemkab Luwu 	3.414	800 1 Unit 25 1 Keg. 200 1 Keg. 700 50 Unit 350 40 Unit 650 1 Keg. 150 1 Paket	880 1 Unit 27 1 Keg. 220 1 Keg. 770 50 Unit 385 40 Unit 715 1 Keg. 165 1 Paket	968 1 Unit 30 1 Keg. 242 1 Keg. 847 50 Unit 423 40 Unit 785 1 Keg. 181 1 Paket	- - 33 1 Keg. 266 1 Keg. 931 50 Unit 465 40 Unit 865 1 Keg. 199 1 Paket	- - 36 1 Keg. 292 1 Keg. - - 512 40 Unit 951 1 Keg. 219 1 Paket	2650 3 Unit 151 5 Keg. 1220 5 Keg. 3250 200 Unit 2135 200 Unit 3966 5 Keg. 915 5 Paket	Distamben
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Geologi Dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Permohonan IUP Kegiatan Air Tanah Pemetaan Geologi Sumber Daya Mineral Diklat Proses Pengolahan Batuan 	237	- 65 20 IUP 1010 3 Keg. 50 2 Kec. 250 20 Org	- 93 20 IUP 1111 3 Keg. 55 2 Kec. 275 20 Org	- 102 20 IUP 1222 3 Keg. 60 2 Kec. 302 20 Org	- 113 20 IUP 1343 3 Keg. 65 2 Kec. 332 20 Org	- 124 20 IUP 1478 3 Keg. 73 2 Kec. 366 20 Org	- 497 100 IUP 6164 3 Keg. 303 2 Kec. 1525 100 Org	Distamben
4	Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Bidang Pertambangan Dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Profil Potensi Tambang & Energi Pameran Investasi Tambang & Energi 	81	- 75 1 Keg. 150 1 Keg.	- 82 1 Keg. 165 1 Keg.	- 90 1 Keg. 181 1 Keg.	- 99 1 Keg. 199 1 Keg.	- 109 1 Keg. 219 1 Keg.	- 455 5 Keg. 914 5 Keg.	Distamben
5	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pemasangan & Pemeliharaan PJU 	1.721	1631 4 Jenis Keg.	1295 4 Jenis Keg.	1381 4 Jenis Keg.	1287 4 Jenis Keg.	1425 4 Jenis Keg.	7019 4 Jenis Keg.	Distamben
6	Program Sistem Informasi Geologi Berkala Yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Tambang Batuan & Mineral Non Logam 		320 1 Keg.	352 1 Keg.	367 1 Keg.	425 1 Keg.	466 1 Keg.	1930 5 Keg.	Distamben

IV	Urusan Pariwisata									
1	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Informasi & Data Base (7 Keg.) 	143	- 520 7 Keg.	- 510 7 Keg.	- 390 7 Keg.	- 775 7 Keg.	- 610 7 Keg.	- 2805 7 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Obyek Wisata (3 Keg.) 	357	1400 3 Keg.	1500 3 Keg.	1650 3 Keg.	1860 3 Keg.	1880 3 Keg.	8290 3 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kunjungan Wisata (4 Keg.) 		750 4 Keg.	720 4 Keg.	750 4 Keg.	777 4 Keg.	922 4 Keg.	3919 4 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Destinasi Sarana & Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Aset Pariwisata (3 Keg.) 		350 3 Keg.	800 3 Keg.	550 3 Keg.	1100 3 Keg.	1700 3 Keg.	4500 3 Keg.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Program Revitalisasi Kawasan Wisata Yang bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan & Penataan Kawasan Wisata & Bersejarah (5 Thn Keg.) 		500 1 Thn Keg.	510 1 Thn Keg.	520 1 Thn Keg.	530 1 Thn Keg.	540 1 Thn Keg.	2600 5 Thn Keg.	Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan & Pariwisata
V	Urusan Perikanan dan Kelautan									
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Terbinanya Kelompok Masy.Pesisir (159 Klp) 	144 25 159 Klp	- 27 24 Klp	- 29 24 Klp	- 31 24 Klp	- 33 24 Klp	- 35 24 Klp	- 145 295 Klp	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian Sumber Daya Kelautan & Perikanan (8 Keg.) 	131 1 Lokasi	450 1 Lokasi	495 1 Lokasi	381 1 Lokasi	417 1 Lokasi	435 1 Lokasi	2309 1 Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 	4557	4450 16000 Ton	4895 16500 Ton	5384 16600 Ton	5922 16800 Ton	6100 17000 Ton	26751 82900 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya & Benih Ikan 	5.280	5.450 579.345 Ton	5.995 608.312 Ton	6.594 638.728 Ton	7.253 670.665 Ton	7.753 700.665 Ton	38.325 2.657.715 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan

		• Terlaksananya Demplot Budidaya Perikanan	80,6 45 Org	100 45 Org	110 45 Org	121 45 Org	133 45 Org	143 45 Org	607 270 Org	
5	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Pengembangan Usaha & Pemasaran Hasil (3 Keg.)	682	420 230 Ton	462 235 Ton	508 239 Ton	559 249 Ton	609 250 Ton	2258 1203 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	• Penyuluhan Masy.Pesisir		470 4 Jenis	517 4 Jenis	568 4 Jenis	625 4 Jenis	575 4 Jenis	2761 4 Jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	• Pengendalian Pembangunan kelautan & Perikanan		850 4 Keg.	55 1 Keg.	60 1 Keg.	116 2 Keg.	65 1 Keg.	1146 4 Keg.	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	• Peningkatan Penyuluhan Masy. Pesisir (50 Org/Thn)		20 50 Org	25 50 Org	30 50 Org	35 50 Org	40 50 Org	150 250 Org	Dinas Kelautan dan Perikanan
VI Urusan Perdagangan										
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	• - • Pembangunan Kantor & Lab.Kemetrologian • Pembinaan & Operasional Kemetrologian • Pengawasan Alat UTTP (3000 Unit) • Informasi Pasar/Harga Barang • Pengawasan Peredaran Barang & Jasa • Pembinaan & Fasilitas LPKSM & BPSK 1 Paket Keg.	213	- 4500 150 83 50 52 Kali 50 150 1 Paket Keg.	- - 155 85 55 52 Kali 55 200 Keg.	- - 160 87 60 60 250 Keg.	- - 165 89 65 65 300 Keg.	- - 170 91 70 70 350 Keg.	- 4500 800 435 300 260 Kali 300 1250 Keg.	Dinas Koperindag

2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pameran Produksi Nasional & Regional Terlaksananya Pasar Murah (23 Kec.) Terlaksananya Pemb. & Rehabilitasi Pasar Desa (6 Kec.) Pemantauan Harga Barang (48 Kali/Thn) Magang Pengelolaan SRG (2 Org.) 	277	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindag
				200	205	210	215	220	1050		
				2 Kali	10 Kali						
				300	305	310	315	320	950		
				23 Kec.							
				1000	700	300	1500	500	1500		
				(Psr.Bone Lemo)	(Psr.Sampe ang)	(Psr.Binturu)	(Psr.Bone Pute)	(Psr.To'Le mo)	(Psr.Suli)		
				150	175	180	185	190	880		
				48 Kali/Thn	240/5 Thn						
				75	80	-	-	-	155		
				1 Org.	1 Org.	-	-	-	2 Org		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Sarana & Prasarana Pasar Desa/Kec. (3 Pasar Desa) 	2.516 3 Pasar Desa	2,500 3 Pasar Desa	Dinas Koperindag						
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima & Asongan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengetahuan/Keterampilan (300 PKL) 		150 300 Org.	Dinas Koperindag						
5	Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SDM Pelaku Ekspor & Impor (50 Org/Thn) 		150 50 Org/Thn	155 50 Org/Thn	160 50 Org/Thn	165 50 Org/Thn	170 50 Org/Thn	800 250 Org/Thn		
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima & Asongan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan & Penyuluhan PKL (300 Org.) 		150 60 Org.	155 60 Org.	160 60 Org.	165 60 Org.	170 60 Org.	800 300 Org.		
VII Urusan Perindustrian											
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Industri kecil & Menengah (3 Keg.) Pelatihan Produk Makanan Minuman (5 Angkt.) Pelatihan Manajemen & Kewirausahaan (5 Angkt.) 	325	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperindag	
				775	780	785	790	795	3925		
				3 Keg.							
				75	77	79	81	83	395		
				1 Angkt.							
				60	62	64	66	68	320		
				1 Angkt.							

2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Terlatihnya SDM Bengkel Alsintan • Tersedianya Alat/Mesin Pengolaan IKM (5 Unit) • Tersedianya Mesin Pengupas & Pengolah Kopi (10 Unit) 		50 5 Org.	52 5 Org.	54 5 Org.	56 5 Org.	58 5 Org.	270 25 Org. 425 5 Unit	Dinas Koperindag
3	Program Peningkatan Kemampuan IPTEK Sistim Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas & Teknologi Produksi (5 Unit) • Pelatihan Teknologi Produksi (50 Org) 		50 1 Unit	55 1 Unit	60 1 Unit	65 1 Unit	70 1 Unit	300 5 Unit 550 50 Org	Dinas Koperindag
4	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Kecil Mikro Pedesaan (Paket Keg.) 		250 4 Paket Keg.	255 4 Paket Keg.	260 4 Paket Keg.	265 4 Paket Keg.	270 4 Paket Keg.	1300 20 Paket Keg.	Dinas Koperindag
VIII Urusan Transmigrasi										
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Serta Kawasan Transmigrasi (P2MKT)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Pertanian (1 Thn) 	-	100 30 Org	105 30 Org	110 30 Org	115 30 Org	120 30 Org	550 30 Org	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Transmigrasi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Warga Transmigrasi 	-	50 30 Org	51 30 Org	52 30 Org	53 30 Org	54 30 Org	260 30 Org	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Transmigrasi Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Peningkatan Study RTSP) 	-	70 30 Org	75 30 Org	80 30 Org	85 30 Org	90 30 Org	90 30 Org	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Prasarana Jalan • Terbangunnya Drainase/Plat Deukker • Rehabilitasi Sarana Air Bersih • Rehabilitasi Fasilitas 	-	200 2 Paket 100 1 Paket 100 1 Paket 100	205 2 Paket 102 1 Paket - - -	210 2 Paket 105 1 Paket - - -	215 2 Paket 107 1 Paket 105 1 Paket 105	220 2 Paket 110 1 Paket - -	220 2 Paket 110 1 Paket - -	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		Umum & Rumah Ibadah		1 Paket	-	-	1 Paket			
--	--	---------------------	--	---------	---	---	---------	--	--	--

Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia (people centred development) dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih, semua program strategis tersebut telah tercakup dalam table 8.1 antara lain :

1. Melanjutkan 10 Program periode pertama :
 - Bebas biaya Akte Kelahiran, KK, dan KTP tercakup dalam urusan kependudukan dan catatan sipil
 - Bebas biaya pendidikan dan pengobatan tercakup dalam urusan pendidikan dan kesehatan
 - Bebas biaya pengadaan bibit jagung, cengkeh dan coklat kepada Petani Serta Bantuan Hand Traktor Melalui Kelompok Tani tercakup dalam urusan pertanian
 - Bebas biaya S1 bagi guru Tk, SD, SMP & SMA bagi yang belum Sarjana urusan pendidikan
 - Peningkatan status jalan poros Belopa – bastem, Palopo – Bastem & Toraja – Bastem menjadi jalan Provinsi tercakup dalam urusan pekerjaan umum
 - Memediasi percepatan pembentukan Kab. Luwu Tengah tercakup dalam urusan pemerintahan umum
 - Dana bergulir 100 juta per desa tercakup dalam Urusan Pembangunan Masyarakat dan Desa
 - Menciptakan sistim pelayanan yang baik, cepat dan murah tercakup dalam semua urusan
 - Menciptakan keadilan ekonomi bagi pengusaha kecil dan pemerataan pembangunan tercakup dalam urusan tenaga kerja, urusan penanaman modal daerah, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Perdagangan

- Pemimpin semua golongan tercakup dalam urusan kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan umum, Urusan Pembangunan Masyarakat dan Desa, urusan transmigrasi
- 2. Membangun infra-struktur jalan dan jembatan jalan 1.000 km jembatan 100 unit tercakup dalam urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan
- 3. Semua kecamatan terjangkau sarana air bersih PDAM tercakup dalam urusan pekerjaan umum dan urusan tata ruang
- 4. Melanjutkan pendidikan gratis mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA tercakup dalam urusan pendidikan
- 5. Meningkatkan status puskesmas kecamatan menjadi puskesmas rawat inap, dan RS. Batara Guru menjadi rumah sakit rujukan minimal wilayah Luwu Raya tercakup dalam urusan kesehatan
- 6. Membangun bendung, bendungan dan jaringan irigasi tercakup dalam urusan pekerjaan umum
- 7. Mengusahakan jaringan listrik pada desa yang belum terjangkau aliran listrik tercakup dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Peningkatan produksi pertanian dengan sistim full mekanisasi tercakup dalam urusan pertanian
- 9. Mendorong investasi dan industrialisasi tercakup dalam urusan pariwisata, urusan perikanan dan kelautan, urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan lingkungan hidup, urusan statistik, urusan komunikasi dan informatika
- 10. Membangun sport centre di Bukit Limpujang dan mengembangkan olah raga di kecamatan tercakup dalam urusan pemuda dan olah raga peningkatan kapasitas tokoh agama dan tokoh masyarakat tercakup dalam urusan kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan umum, Urusan Pembangunan Masyarakat dan Desa, urusan transmigrasi

Keberhasilan suatu program tidak dapat terlepas dari segi pelaksanaannya, maka penilaian terhadap suatu program akan menyangkut berbagai hal yang terkait, baik yang menyangkut kualitas masukan, kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan program. Selain itu, penilaian dapat dilaksanakan atas dasar

konsekuensi implementasi program, dapat pula dilakukan terhadap komponen program. Prinsip-prinsip tersebut diatas perlu di implementasikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah maka perlu dilakukan pemerataan dan perluasan akses pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai tingkat Kabupaten serta dalam rangka menyentuh akar permasalahan pembangunan maka diperlukan sinergitas atau Gerakan Bersama seluruh stakeholder menuju Kabupaten Luwu yang lebih maju, mandiri, mampu berdaya saing dan bernuansa religius.